

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data Kualitatif dan Kuantitatif

1. Data Kualitatif

a. Deskripsi Lokasi Penelitian

1) SMA Negeri 1 Sleman

SMA Negeri 1 Sleman merupakan sekolah tertua di Sleman yang berdiri pada tanggal 1 Agustus 1963. SMA Negeri 1 Sleman terletak di Jalan Magelang Km. 14, tepatnya di Medari, Caturharjo, Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki lingkungan cukup asri dan sejuk dengan menempati gedung sekolah yang memiliki luas halaman 5.653 m². SMAN 1 Sleman merupakan sekolah unggulan di Kabupaten Sleman yang mengukir banyak prestasi, baik prestasi akademik dan non-akademik. SMA Negeri 1 Sleman memiliki beberapa program unggulan yaitu: 1) Mengembangkan Sikap dan Kompetensi Keagamaan; 2) Mengembangkan Potensi Siswa Berbasis *Multiple Intelligence*; 3) Mengembangkan Budaya daerah; dan 5) Mengembangkan Kemampuan bahasa dan Teknologi Informasi.

a) Struktur Organisasi Sekolah

Struktur organisasi SMA Negeri 1 Sleman seperti pada umumnya terdiri dari kepala sekolah dan komite sekolah, serta dibantu oleh wakil kepala sekolah. Berikut adalah struktur organisasi SMAN 1 Sleman. Kepala Sekolah: Fadmiyati, S.Pd., M.Pd., Wakil Urusan Kesiswaan; Handaka Dwi Wardaya, S.Pd. M.M., Wakil Urusan

Kurikulum: Drs. Arif Priyatmanta, Wakil Urusan Sarana: Drs. Sutana., dan Wakil Urusan Humas: Agus Suprpto, S.Pd. M.M.

b) Data Siswa

Jumlah peserta didik SMAN 1 Sleman adalah 606 siswa, terdiri dari 178 siswa laki-laki dan 428 siswa perempuan. Kelas X berjumlah 221 siswa, kelas XI berjumlah 193 siswa, dan kelas XII berjumlah 192 siswa.

c) Data Guru PPKn

Jumlah guru PPKn di SMAN 1 Sleman sebanyak 2 guru, terdiri dari Bapak Kaswadi, S.Pd., yang mengajar kelas XI MIPA 1, 2, 3, 4, 5, dan XI IPS 1, 2. Dan Ibu Nasirah S.Pd., yang mengajar kelas X MIPA 1, 2, 3, 4, 5, X IPS 1, 2, XII MIPA 1, 2, 3, 4, 5, dan XII IPS 1, 2.

d) Ekstrakurikuler

Ekstrakurikuler pilihan artinya siswa dapat memilih satu atau lebih kegiatan yang sesuai dengan bakat dan minatnya untuk diikuti, yaitu: 1) Futsal; 2) Palang; Merah Remaja (PMR); 3) Nasyid/Hadroh; 4) Bulutangkis; 5) Karawitan; 6) Taekwondo; 7) Renang; 8) SMANSA English Club; 9) Peleton Inti; 10) Bola Basket; 11) Kelompok Ilmiah Remaja (KIR); 12) Majalah Dinding (Majalah Dinding)/Jurnalistik; 13) Seni Baca Al-Qur'an; 14) Band; dan 15) Seni Tari. Ekstrakurikuler wajib artinya siswa wajib mengikuti kegiatan tersebut adalah kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Siswa kelas X dan XI wajib mengikuti ekstrakurikuler pramuka.

e) Kurikulum Sekolah

Struktur dan muatan kurikulum SMAN 1 Sleman meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama tiga tahun mulai kelas X sampai dengan kelas XII. Kurikulum yang dikembangkan adalah Kurikulum 2013 untuk kelas X, XI, dan XII.

2) SMA Negeri 2 Bantul

Awal berdirinya SMAN 2 Bantul pada tanggal 1 Januari 1976, dan mulai operasional pada 1 Februari 1976. Pada saat itu SMAN 2 Bantul masih bernama SMPP Negeri 44 Bantul. Pergantian nama dari SMPP 44 Bantul ke SMAN 2 Bantul terjadi pada tahun 1985. Terletak di Jalan R.A. Kartini, SMAN 2 Bantul merupakan salah satu sekolah favorit di Kabupaten Bantul yang memiliki 27 kelas dengan 719 siswa yang terbagi dalam program/peminatan IPA dan IPS. SMAN 2 Bantul memiliki beberapa program yang dikembangkan seperti Sekolah Sehat, Sekolah Adiwiyata, Program Cerdas Istimewa, Sekolah Budaya, dan Meningkatkan Daya serap ke Perguruan Tinggi Favorit.

a) Struktur Organisasi Sekolah

Struktur organisasi SMA Negeri 2 Bantul seperti pada umumnya terdiri dari kepala sekolah dan dewan sekolah, serta dibantu oleh wakil kepala sekolah. Berikut adalah struktur organisasi SMAN 2 Bantul. Kepala Sekolah: Drs. Kabul Mulyana M.Pd., Wakil Urusan Kesiswaan: Suwartini, M. Pd., Wakil Urusan Kurikulum: Yakun Paristri, S. Pd., Wakil Urusan Sarana: Rahmat Budiyanto, S.Pd., dan Wakil Urusan Humas: Jumarudin, S.Pd.

b) Data Siswa

Jumlah peserta didik SMAN 2 Bantul adalah 772 siswa, terdiri dari 223 siswa laki-laki dan 549 siswa perempuan. Kelas X berjumlah 265 siswa, kelas XI berjumlah 260 siswa, dan kelas XII berjumlah 247 siswa.

c) Data Guru PPKn

Jumlah guru PPKn di SMAN 2 Bantul sebanyak 3 guru, terdiri dari Bapak Mardiman, S.Pd. yang mengajar kelas XI MIPA 1, 2, 3, XII MIPA 7, dan XII IPS 1, 2. Selanjutnya Ibu Dra. Rinta Rihayani, yang mengajar kelas XI MIPA 6,7, XI IPS 1,2, dan XII MIPA 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan Bapak Drs. Sugiyarto, M.Pd. yang mengajar kelas X MIPA 1, 2, 3, 4, 5, 6, X IPS 1, 2, dan XI MIPA 4, 5.

d) Ekstrakurikuler

Kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan SMAN 2 Bantul meliputi Keagamaan (Rohani Islam, Rohani Kristen, dan Katolik); Keolahragaan (basket, bola voli, karate, Pencak silat); Kepemimpinan (Paskibra/Pleton inti); Palang Merah Remaja; Seni (Teater, Band, Seni Tari, Paduan Suara); Kelompok Ilmiah Remaja (Smadaba *Research Community*); Kelompok Majalah kreasi; Kewirausahaan; dan Pembinaan Olimpiade Sains dan Teknologi.

e) Kurikulum Sekolah

Struktur dan muatan kurikulum SMAN 2 Bantul meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama tiga tahun mulai kelas X sampai dengan kelas XII. Kurikulum yang dikembangkan adalah Kurikulum 2013 untuk kelas X, XI, dan XII.

3) SMA Negeri 6 Yogyakarta

Awal berdirinya SMAN 6 Yogyakarta berlatar belakang karena untuk menutupi kekurangan tenaga pamong praja di negara bagian Yogyakarta pada tahun 1950. Pada saat itu SMA yang ada adalah SMA/A dan SMA/B maka akhirnya SMA Yuridis Ekonomi berubah menjadi SMA/C dan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan pada 1 Juli 1950. Beberapa tahun kemudian ada kebijakan perubahan nama sekolah dengan mengurutkannya sesuai jumlah SMA Negeri yang ada di Kota Yogyakarta sehingga SMA/C berubah menjadi SMA 6C beralamat di Jalan Cornelis Simanjuntak 2. Khususnya nama SMA 6C maka SMAN 6 Yogyakarta terkenal dengan sebutan “SMA Namche”. Program unggulan SMAN 6 Yogyakarta adalah menjadi sekolah yang berbasiskan riset dan menjadi sekolah pelaksana program Kewirausahaan.

a) Struktur Organisasi Sekolah

Struktur organisasi SMA Negeri 6 Yogyakarta seperti pada umumnya terdiri dari kepala sekolah dan komite sekolah, serta dibantu oleh wakil kepala sekolah. Berikut adalah struktur organisasi SMAN 6 Yogyakarta. Kepala Sekolah: Drs. Munjid Nur Alamsyah, MM., Wakil Urusan Kesiswaan: Drs. Akhmad Fatoni, M.SI., Wakil Urusan Kurikulum: Drs. Raden Gigih Kuncara, Wakil Urusan Sarana: Dra. Eni Widayanti, M.Eng, Wakil Urusan Humas: Andriyani Triwulandari, M.Pd.

b) Data Siswa

Jumlah peserta didik SMAN 6 Yogyakarta adalah 762 siswa, terdiri dari 288 siswa laki-laki dan 474 siswa perempuan. Kelas X berjumlah 255 siswa, kelas XI berjumlah 254 siswa, dan kelas XII berjumlah 253 siswa.

c) Data Guru PPKn

Jumlah guru PPKn di SMAN 6 Yogyakarta sebanyak 2 guru, terdiri dari Ibu Purwantini, S.Pd. yang mengajar kelas X MIPA 3, 4, 5, 6, 7, XII MIPA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan XII IPS 1, 2. Dan Ibu Dra. Niken Yulia, yang mengajar kelas X MIPA 1, 2, X IPS 1, XI MIPA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan XI IPS 1.

d) Ekstrakurikuler

Kegiatan ekstrakurikuler di SMAN 6 Yogyakarta terbagi menjadi lima jenis ekstrakurikuler, bidang olahraga meliputi PBB, Bola Voli, Futsal, Basket Ball, Bulutangkis, dan Bela diri Karate; bidang keterampilan berbahasa meliputi Bahasa Perancis, Bahasa Jepang, dan English Study Club; bidang kesenian meliputi Paduan Suara, Teater, Karawitan, Nasyid, Seni Baca Al-Quran, Seni Tari, dan Seni Musik; bidang keahlian meliputi KIR (Kelompok Ilmiah Remaja), Jurnalistik, dan Fotografi; bidang sosial-kemasyarakatan meliputi PMR dan Pecinta alam; dan ada bentuk ekstrakurikuler tambahan yaitu Pramuka yang wajib diikuti oleh kelas X dan XI.

e) Kurikulum Sekolah

Struktur dan muatan kurikulum SMAN 6 Yogyakarta meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama tiga tahun mulai kelas X sampai dengan kelas XII. Kurikulum yang dikembangkan adalah Kurikulum 2013 untuk kelas X, XI, dan XII.

b. Deskripsi Data Penelitian

Data penelitian tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi Sebagai Upaya Pembentukan Warga Negara Muda Berintegritas di Daerah Istimewa

Yogyakarta terbagi menjadi beberapa pembahasan. Pertama, penelitian ini membahas tentang implementasi Pendidikan Antikorupsi melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Kedua, implementasi Pendidikan Antikorupsi melalui kegiatan ekstrakurikuler. Ketiga, membahas tentang warga negara muda berintegritas. Ketiga pokok pembahasan data penelitian tersebut akan dijelaskan sebagai berikut.

1) Implementasi Pendidikan Antikorupsi

Data penelitian tentang implementasi Pendidikan Antikorupsi terdiri dari dua bagian, yaitu pertama secara kurikuler, melalui mata pelajaran PPKn. Dan kedua melalui kegiatan ekstrakurikuler.

a) Implementasi Pendidikan Antikorupsi Melalui Program Kurikuler

Implementasi pendidikan antikorupsi melalui program kurikuler, yaitu dilakukan melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Dalam deskripsi data penelitian pada bagian ini dapat dikategorikan menurut lokasi/tempat penelitian. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ada tiga sekolah menengah atas negeri (SMAN) di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai lokasi/tempat penelitian, diantaranya: SMA Negeri 1 Sleman, SMA Negeri 2 Bantul, dan SMA Negeri 6 Yogyakarta.

SMA Negeri 1 Sleman

Berdasarkan data penelitian yang telah diolah, SMA Negeri 1 Sleman turut mengembangkan Pendidikan Antikorupsi secara terintegrasi ke dalam mata pelajaran. AP,(1-8)SMAN1,5/19 menyampaikan bahwa upaya yang dilakukan dalam mengembangkan pendidikan antikorupsi melalui kurikulum yaitu dilakukan

secara terintegrasi dengan mata pelajaran yang memungkinkan seperti PPKn dan Pendidikan Agama. Selain itu dalam meningkatkan kapasitas integral (*integral capacity building*) di kalangan guru dalam menyusun *action plan* pendidikan antikorupsi secara terintegrasi dalam mata pelajaran atau lintas mata pelajaran sekolah memiliki peran yang strategis. Pada setiap tahun ajaran baru Bapak/Ibu Guru biasanya melakukan penyamaan persepsi dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dengan mempertimbangkan kebijakan-kebijakan terbaru baik dari Pemerintah Pusat maupun Dinas Pendidikan Provinsi (AP,(1-8)SMAN1,5/19).

Pengembangan pendidikan antikorupsi yang terintegrasi, diterapkan ke dalam kurikulum sekolah dan pelaksanaannya terintegrasi melalui kurikulum 2013. Dalam kurikulum 2013 ada aspek sikap dan keterampilan yang menjadi bagian dari aspek yang dinilai sehingga dalam penanaman nilai-nilai antikorupsi dapat bersinergi dalam kedua aspek tersebut. Pendidikan antikorupsi yang diterapkan yaitu dengan mengintegrasikan materi dan nilai antikorupsi pada mata pelajaran serta materi yang sesuai (AP,(1-8)SMAN1,5/19). Lebih khusus dilakukan dengan mengintegrasikan materi ke dalam kompetensi dasar (KD) yang relevan dan menginternalisasi nilai-nilai antikorupsi ke dalam kegiatan belajar mengajar (KBM) (KS,(1-21)SMAN1,5/19).

Strategi yang dapat digunakan dalam mengimplementasikan pendidikan antikorupsi melalui mata pelajaran yaitu melalui penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Bapak/Ibu Guru dihimbau merancang model pembelajaran dengan menyisipkan materi antikorupsi atau menginternalisasi nilai-nilai

antikorupsi ke dalam setiap kegiatan belajar mengajar (KBM) sebagai upaya penanaman nilai-nilai antikorupsi kepada siswa. Pendekatan pembelajaran yang digunakan berupa Saintifik dengan model pembelajaran *discovery learning* dan *problem Based Learning* (PBL), serta metode yang digunakan adalah tanya jawab, wawancara, diskusi dan bermain peran. Berdasarkan data dokumentasi RPP pada semester genap kelas XI milik KS,(1-21)SMAN1,5/19 terdapat 3 kompetensi dasar (KD), yaitu Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional, Ancaman terhadap Integrasi Nasional, dan Makna Kesatuan dan Persatuan Bangsa. Dapat diketahui bahwa pada setiap KBM dalam RPP mengembangkan nilai-nilai antikorupsi.

Nilai-nilai antikorupsi yang dikembangkan meliputi kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggungjawab, kerja keras, keberanian, dan kepedulian. Dalam mengembangkan nilai kejujuran, siswa menyampaikan hasil diskusi tentang materi berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tulisan, atau media lainnya. Dalam mengembangkan nilai peduli dengan saling tukar informasi sehingga memperoleh pengetahuan baru dan menekankan pembelajaran berbasis lingkungan di setiap materinya.

Dalam mengembangkan nilai kemandirian yaitu dengan memberikan waktu kepada siswa untuk melakukan kegiatan belajar secara mandiri seperti mengamati dan membaca materi, serta menyusun daftar pertanyaan yang belum dimengerti. Dalam mengembangkan nilai kedisiplinan yaitu dengan selalu memeriksa kehadiran peserta didik dan rutin melakukan kegiatan literasi dengan mencari dan membaca berbagai referensi dari berbagai sumber guna menambah pengetahuan

dan pemahaman tentang materi. Dalam mengembangkan nilai tanggung jawab, siswa dituntut untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan.

Dalam mengembangkan nilai kerja keras yaitu dengan mencatat semua informasi tentang materi yang diperoleh dengan tulisan yang rapi dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dalam mengembangkan nilai keberanian yaitu dengan memberikan kesempatan siswa untuk bertanya atas materi yang disampaikan oleh peserta didik lain. Serta dalam mengembangkan nilai keadilan yaitu dengan membentuk siswa menjadi beberapa kelompok.

Pelaksanaan pembelajaran PPKn dengan mengembangkan pendidikan antikorupsi dilakukan dengan memperhatikan RPP, dimulai dengan memberikan motivasi kepada siswa untuk jujur, disiplin, tanggung jawab, berani, dan kerja keras (KS,(1-21)SMAN1,5/19). Hasil Pengamatan,G-SMAN1S(1/1)5/19 di kelas XI MIPA 3, XI MIPA 4 dan XI IPS 2 menunjukkan bahwa Bapak Guru dalam memulai KBM terbilang sangat baik dengan menertibkan siswa terlebih dahulu, menegur siswa yang belum tertib, selanjutnya menjelaskan KD yang akan dipelajari siswa beserta indikator pencapaian kompetensi yang akan dinilai. Selanjutnya pada Pengamatan,G-SMAN1S(1/2)5/19 tentang kegiatan inti, Bapak Guru sangat baik dalam menyampaikan materi, didukung dengan penggunaan teknologi seperti laptop dan LCD proyektor. Materi yang disampaikan pada saat itu tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada pelaksanaan kegiatan inti, KS,(1-21)SMAN1,5/19 menambahkan jika teknologi seperti *handphone* dapat mendukung terhadap pengembangan pendidikan

antikorupsi melalui pembelajaran PPKn seperti ketika berdiskusi. Siswa dipersilahkan menggunakan hp-nya untuk mencari materi beserta sumbernya. Bentuk aktivitas seperti itu akan mengajarkan siswa untuk jujur dalam mengutip karya orang lain.

Pembelajaran yang menekankan pada penanaman nilai-nilai antikorupsi tentunya dapat membangun iklim antikorupsi di kelas. Dalam membangun iklim antikorupsi di kelas dapat dimulai pada aktivitas siswa yang melakukan analisis terhadap suatu permasalahan dengan mencari pemecahan masalahnya. Ditambah dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengekspresikan pemikiran antikorupsi mereka melalui kegiatan diskusi. Secara aktivitas, siswa diharapkan berani jujur dalam menyampaikan pendapatnya dan tanggungjawab terhadap apa yang disampaikannya.

Selain itu penanaman nilai-nilai antikorupsi yang dilakukan melalui pembelajaran PPKn dapat berupa pembiasaan-pembiasaan pada kegiatan siswa, seperti jujur tidak mencontek, disiplin dengan tidak terlambat, tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, mandiri dalam mengerjakan tugas, dan kerja keras untuk menyelesaikan tugas dengan tuntas. Dalam pembiasaan penanaman nilai-nilai antikorupsi tersebut dapat didukung dengan memberikan penguatan kepada siswa, baik secara verbal maupun non-verbal.

Secara verbal penguatan yang diberikan dapat berupa teguran kepada siswa dan memberikan motivasi kepada mereka seperti menyampaikan bahwa keberhasilan yang besar itu dimulai dari keberhasilan yang kecil. Jadi anak-anak yang ingin menjadi orang yang sukses jangan melalaikan hal-hal yang kecil.

Sedangkan secara non-verbal, penguatan yang dilakukan yaitu melalui pendekatan kepada siswa dengan memberikan sentuhan atau menyentuh pundak siswa agar tidak mengulangi perilaku yang melanggar peraturan (KS,(1-21)SMAN1,5/19).

Pada kegiatan penutup Bapak Guru memberikan kesimpulan dengan baik atas materi yang telah disampaikan kepada siswa. Dan secara jelas menyampaikan kisi-kisi untuk penilaian akhir tahun, serta memberikan motivasi kepada siswa untuk belajar dengan sungguh-sungguh agar mendapatkan prestasi yang baik (Pengamatan,G-SMAN1S(1/3)5/19).

Evaluasi pembelajaran PPKn yang dilakukan dengan mengembangkan pendidikan antikorupsi, lebih menyesuaikan pada materi yang sesuai dengan pendidikan antikorupsi sehingga dalam memberikan penilaian dapat relevan. Sedang evaluasi untuk nilai-nilai antikorupsi dilakukan pada setiap pembelajaran PPKn, tidak hanya pada materi yang membahas pendidikan antikorupsi, tetapi pada semua KD karena muatan nilai-nilai antikorupsi dapat dinilai menggunakan penilaian sikap (KS,(1-21)SMAN1,5/19).

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi pendidikan antikorupsi melalui mata pelajaran PPKn di SMAN 1 Sleman dilakukan dengan memperhatikan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Pendekatan yang digunakan berupa saintifik dengan model pembelajaran *discovery learning* dan problem Based Learning (PBL), serta metode yang digunakan adalah tanya jawab, wawancara, diskusi dan bermain peran. Dalam pembelajaran PPKn dengan mengembangkan pendidikan antikorupsi, memiliki muatan berupa materi antikorupsi dan nilai-nilai antikorupsi seperti kejujuran, kepedulian, kemandirian,

kedisiplinan, tanggungjawab, kerja keras, keberanian, dan kepedulian..Pengembangan materi antikorupsi dilakukan secara integrasi ke dalam KD yang relevan seperti ancaman terhadap integrasi negara, dan untuk penanaman nilai-nilai antikorupsi di internalisasi ke dalam aktivitas belajar siswa di kelas.

SMA Negeri 2 Bantul

Berdasarkan data penelitian yang telah diolah, SMA Negeri 2 Bantul turut mengembangkan Pendidikan Antikorupsi secara terintegrasi ke dalam mata pelajaran. YP,(1-8)SMAN2,4/19 menjelaskan jika pendidikan antikorupsi dapat dilakukan melalui kurikulum sekolah dengan terintegrasi ke dalam mata pelajaran tertentu, seperti PPKn dan Agama. Strategi sekolah dalam menerapkan pendidikan antikorupsi melalui mata pelajaran, dilakukan dengan memasukkan ke dalam proses KBM. Hal ini dapat dilihat dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) Bapak/Ibu Guru pengampu masing-masing mata pelajaran, bagaimana Bapak/Ibu Guru menginternalisasi nilai-nilai antikorupsi ke dalam proses pembelajaran.

Pada setiap awal tahun pelajaran sekolah memfasilitasi Bapak/Ibu Guru melalui kegiatan workshop atau pelatihan-pelatihan guru dalam penyusunan perangkat pembelajaran (memperhatikan muatan-muatan pengembangan sikap siswa). Karena sekolah memiliki peran strategis dalam meningkatkan kapasitas integral (*integral capacity building*) di kalangan guru dalam menyusun *action plan* pendidikan antikorupsi secara terintegrasi dalam mata pelajaran atau lintas mata pelajaran.

Pengembangan pendidikan antikorupsi yang terintegrasi ke dalam kurikulum sekolah dalam pelaksanaannya diterapkan melalui kurikulum 2013 yang

turut menilai aspek sikap sehingga dalam penanaman nilai-nilai antikorupsi dapat dikembangkan dalam aktivitas kegiatan belajar mengajar. Pengembangan pendidikan antikorupsi secara kurikuler ini dilakukan dengan melakukan pemetaan muatan pada KD di setiap mata pelajaran. MA,(1-21)SMAN2,4/19 menambahkan bahwa pengembangan pendidikan antikorupsi secara umum bisa diterapkan melalui penguatan pendidikan karakter yang terintegrasi dalam mata pelajaran, salah satunya PPKn. Muatan pendidikan antikorupsi dapat kita masukan dengan memperhatikan KD.

Pada tahap perencanaan pembelajaran PPKn dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi dasar (KD) yang relevan dan dikembangkan ke dalam RPP (RR,(1-21)SMAN2,4/19). Atau dapat dilakukan memulai perencanaan dengan mempersiapkan materi yang linier, selanjutnya mengintegrasikan muatan pendidikan antikorupsi ke dalam kegiatan pembelajaran. Bentuk pengintegrasian ini hanya bersifat tersirat karena dalam kurikulum tidak ada muatan khusus tentang antikorupsi (MA,(1-21)SMAN2,4/19).

Berdasarkan data hasil dokumentasi tentang rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) semester genap kelas XI milik RR,(1-21)SMAN2,4/19 dan MA,(1-21)SMAN2,4/19 terdapat 3 kompetensi dasar (KD), yaitu Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional, Ancaman terhadap Integrasi Nasional, dan Makna Kesatuan dan Persatuan Bangsa. Dapat diketahui bahwa pada setiap KBM dalam RPP mengembangkan nilai-nilai antikorupsi. Pendekatan pembelajaran yang digunakan yaitu saintifik, dengan

model pembelajaran berbasis kooperatif dan pembelajaran berbasis masalah, serta metode yang digunakan adalah diskusi kelompok, tanya jawab dan kuis.

Nilai-nilai antikorupsi yang dikembangkan dalam RPP meliputi kejujuran, kedisiplinan, tanggungjawab, keberanian, kerja keras, adil, kesederhanaan, mandiri, dan peduli. Dalam mengembangkan nilai kejujuran, siswa diberi menemukan suatu konsep, teori melalui sumber yang tersedia. Konsep yang telah disimpulkan sendiri di periksa apakah sesuai atau tidak dengan yang ada di sumber belajar. Dalam mengembangkan nilai disiplin yaitu dengan selalu memeriksa kehadiran siswa. Dalam mengembangkan nilai tanggungjawab siswa diminta menyusun laporan hasil telaah tentang materi yang telah dipelajari dan menyajikan hasil analisis tentang materi. Dalam mengembangkan nilai berani siswa diberi kesempatan untuk menyampaikan hasil analisis dan pengamatan, menanyakan hal-hal yang belum dimengerti, dan mempresentasikan hasil diskusi di hadapan kelompok lain.

Dalam mengembangkan nilai kerja keras siswa dituntut untuk mengembangkan sebanyak mungkin informasi dan mengidentifikasi jawaban atas pertanyaan tentang materi. Dalam mengembangkan nilai keadilan siswa dikelompokkan secara merata yang terdiri dari 4-5 kelompok, dan melakukan kerja sama dalam kelompok. Dalam mengembangkan nilai mandiri siswa secara mandiri mengembangkan sebanyak mungkin informasi dan merumuskan pertanyaan terkait dengan materi. Dalam mengembangkan nilai kesederhanaan yaitu dengan melakukan refleksi manfaat proses pembelajaran yang telah dilaksanakan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan. Serta mengembangkan nilai peduli

dengan mengajak siswa untuk memeriksa dan menjaga kebersihan dan kerapian keras.

Pelaksanaan pembelajaran PPKn dengan mengembangkan pendidikan antikorupsi salah satunya dapat dilakukan dengan tidak melakukan korupsi terhadap waktu. Dalam hal pendidikan antikorupsi melalui pembelajaran PPKn RR,(1-21)SMAN2,4/19 selalu menekan kepada anak-anak untuk tepat waktu, disiplin, dan tidak canggung kepada siswa untuk memberikan teladan dengan mengakui atau memohon maaf ketika melakukan korupsi waktu semacam itu.

Pada kegiatan belajar mengajar yang telah berlangsung, berdasarkan hasil Pengamatan,G-SMAN2B(1/1)4-5/19 yang diperoleh selama kegiatan belajar mengajar di kelas XI MIPA 1 dan 2 oleh Bapak Guru, dan XI IPS 1 dan 2 oleh Ibu Guru berlangsung sangat baik. Dapat di deskripsikan bahwa Bapak Guru sebelum masuk pada kegiatan ini menjelaskan terlebih dahulu KD yang akan dipelajari beserta indikator pencapaian kompetensinya. Pada kegiatan awal belajar mengajar Bapak Guru memberikan penguatan nilai-nilai antikorupsi kepada siswa agar senantiasa belajar dengan giat, kerja keras, disiplin, dan jujur.

Sedangkan Ibu Guru dalam memulai kegiatan belajar mengajar dengan menyampaikan materi yang akan diajarkan dan mengabsen siswa yang ada di kelas. Dan memberikan teguran kepada siswa yang terlambat masuk kelas agar lebih disiplin lagi. Ibu Guru dalam sangat tegas dalam menanamkan nilai kejujuran kepada siswa. Hal ini terlihat dari pelaksanaan ulangan di kelas XI IPS I, Ibu Guru melakukan metode sumpah kepada siswa untuk tidak mencontek dan jujur dalam

mengerjakan soal. Ibu Guru menyampaikan pesan kepada siswa bahwa betapa pentingnya untuk membiasakan berperilaku jujur.

Selanjutnya dalam Pengamatan,G-SMAN2B(1/2)4-5/19 peran Guru pada kegiatan inti berlangsung sangat baik. Bapak Guru dengan jelas dalam menyampaikan pokok materi, serta tidak segan mengingatkan siswa ketika ada yang gaduh agar tenang. Sedangkan Ibu Guru dalam kegiatan belajar mengajar menjelaskan materi terakhir yaitu tentang persatuan dan kesatuan di kelas XI IPS II dengan jelas. Ibu Guru menjelaskan betapa pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia pasca pemilihan presiden yang telah berlalu.

Materi yang relevan dalam mengembangkan pendidikan antikorupsi adalah sistem hukum dan peradilan nasional dan ancaman terhadap integrasi negara (MA,(1-21)SMAN2,4/19 dan RR,(1-21)SMAN2,4/19). Metode yang digunakan dalam menunjang pendidikan antikorupsi yaitu dengan meminta siswa untuk menganalisis sebuah isu atau masalah-masalah yang dihadapi bangsa Indonesia. Contohnya membahas tentang isu korupsi sebagai ancaman ketahanan NKRI beserta solusi penanganannya. RR,(1-21)SMAN2,4/19 secara singkat menyebutkan jika metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam menunjang pengembangan pendidikan antikorupsi melalui pembelajaran PPKn salah satunya pembelajaran berbasis pemecahan masalah (*problem based learning*). Berdasarkan data hasil dokumentasi dalam RPP RR,(1-21)SMAN2,4/19 dan MA,(1-21)SMAN2,4/19, diketahui pendekatan yang digunakan adalah *scientific approach*, model pembelajaran menggunakan *problem based learning*, dan metode pembelajaran adalah tanya jawab, dan diskusi kelompok.

Bapak dan Ibu Guru memiliki strategi dalam menggunakan bahan ajar dan teknologi agar materi tentang antikorupsi dapat di serap siswa secara luas. Seperti yang disampaikan RR,(1-21)SMAN2,4/19 bahwa dengan *me-manage* jamnya yang begitu sedikit jadi strategi yang digunakan yaitu menggunakan *handout*, ppt, dan isu-isu terkini yang ada media elektronik untuk kita analisis. Terlebih anak-anak juga menggunakan hp-nya untuk mencari materi ketika sedang menganalisis tentang tindakan pejabat yang korup.

Dalam pelaksanaan kegiatan inti pembelajaran PPKn dengan mengembangkan pendidikan antikorupsi tidak hanya terpaku pada muatan materi saja, tetapi juga pada nilai yang penting untuk ditanamkan kepada siswa. Penanaman nilai-nilai antikorupsi dapat dilakukan melalui penguatan pendidikan karakter dengan membiasakan siswa untuk berperilaku tidak korup, contohnya jujur, siswa yang menemukan barang atau uang itu dilaporkan ke sekolah. Selanjutnya untuk ujian siswa dibiasakan untuk tidak mencontek (MA,(1-21)SMAN2,4/19). Atau penanamannya melalui pembiasaan-pembiasaan seperti membiasakan kepada siswa untuk mengamalkan nilai-nilai antikorupsi, seperti jujur ketika ulangan. Dalam hal ini siswa dibiasakan untuk berani melakukan ulangan tanpa ada pengawasan. Selain itu siswa harus dibiasakan untuk disiplin masuk kelas, mengumpulkan tugas (RR,(1-21)SMAN2,4/19).

Dengan demikian melalui beberapa aktivitas yang kontra terhadap tindakan korupsi diatas akan menghasilkan sebuah iklim antikorupsi. RR,(1-21)SMAN2,4/19 menambahkan usaha dalam membangun iklim antikorupsi di kelas yaitu dengan selalu menekankan kepada siswa untuk jujur, siswa ditantang

untuk melakukan sumpah agar jujur ketika ulangan meskipun tidak saya awasi. Selain itu saya berani untuk tidak memberikan nilai kepada mereka yang ketahuan mencontek.

Usaha lain yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu Guru dalam membangun iklim antikorupsi di kelas yaitu dengan memberikan penguatan baik secara verbal maupun non-verbal serta hukuman kepada siswa yang melanggar peraturan. Secara verbal, RR,(1-21)SMAN2,4/19 memberikan penguatan kepada siswa berupa mengingatkan kepada anak-anak untuk jujur, disiplin, kerja keras ketika mengerjakan tugas atau ulangan. MA,(1-21)SMAN2,4/19 menambahkan dengan memberikan teguran kepada siswa ketika mereka melakukan pelanggaran.

Secara non-verbal MA,(1-21)SMAN2,4/19 penguatan yang diberikan kepada siswa ketika di kelas berupa *treatment* hukuman kegiatan kepada mereka, contohnya membersihkan kelas. RR,(1-21)SMAN2,4/19, bentuk penguatan non-verbal yang diberikan berupa memberikan teladan kepada siswa. Hasil Pengamatan,G-SMAN2B(1/4)4-5/19 menunjukkan bahwa Bapak dan Ibu Guru sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar mengabsen siswa dan memberikan teguran kepada siswa yang terlambat masuk kelas. Bapak Guru juga memberikan tepuk tangan kepada siswa yang berani menyampaikan gagasannya dengan tepat. Sedangkan Ibu Guru menjelaskan bahwa korupsi tidak hanya berupa uang tetapi juga waktu. Ibu Guru senantiasa menyampaikan kepada siswa untuk selalu disiplin, terhadap waktu.

Dalam melengkapi usaha membangun iklim antikorupsi di kalangan siswa. Ada bentuk hukuman yang diberikan ketika melanggar peraturan atau nilai-nilai

antikorupsi. Bentuk hukuman yang biasa diberikan kepada siswa yang melanggar peraturan atau nilai-nilai antikorupsi ketika di kelas berupa hukuman menata buku, menyapu, atau hukuman lain yang sifatnya untuk mendidik (MA,(1-21)SMAN2,4/19).

RR,(1-21)SMAN2,4/19 memiliki pandangan tersendiri soal hukuman yang diberikan kepada siswa lebih berdasar pada tata tertib sekolah, karena di sekolah siswa terikat dan harus taat dengan tata tertib sekolah. Misalnya ketika terlambat hukumannya tidak bisa mengikuti jam pertama dan ada hukuman lain yaitu ikut membersihkan lingkungan sekolah ditambah poin 5. Kalau tiga kali berturut-turut maka orang tua akan dipanggil dan anak akan mendapat sanksi tambahan menjadi tim tata tertib selama seminggu untuk berangkat pagi-pagi.

Sampai pada tahap kegiatan penutup, peran Guru PPKn berdasarkan Pengamatan,G-SMAN2B(1/3)4-5/19 berlangsung sangat baik. Dapat dijelaskan bahwa Bapak Guru dalam kegiatan penutup tidak lupa memberikan kesimpulan atas materi yang telah disampaikan, dan menyelipkan pesan-pesan kepada siswa yang akan menghadapi ulangan dan ujian sekolah agar mempersiapkan dengan baik, giat dalam belajar. Sedangkan Ibu Guru dalam kegiatan penutup memberikan kesimpulan atas materi yang telah disampaikan dan memberikan motivasi kepada siswa yang akan melakukan ulangan untuk belajar dengan keras, serta mengerjakan soal-soal ujian dengan jujur.

Dalam kegiatan evaluasi pembelajaran PPKn dengan mengembangkan pendidikan antikorupsi yaitu pada akhir pembelajaran PPKn dapat dilakukan dengan memberikan arahan kepada siswa agar tidak melakukan tindakan korupsi

meskipun dalam bentuk sekecil apapun, dan tidak melakukan hal-hal lain yang sifatnya melanggar norma atau peraturan (MA,(1-21)SMAN2,4/19). Dan dapat dilakukan dengan merujuk pada kurikulum 2013 yaitu ada penilaian sikap spiritual, pengetahuan, sikap sosial, dan keterampilan. Dalam prosesnya untuk penilaian sikap sosial siswa melakukan penilaian terhadap diri sendiri dan teman-temannya yang lain. Proses ini tentunya akan melatih kejujuran dan tanggung jawab anak-anak (RR,(1-21)SMAN2,4/19).

Berdasarkan urian diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi pendidikan antikorupsi melalui mata pelajaran PPKn di SMAN 2 Bantul dilakukan dengan memperhatikan muatan materi dan muatan nilai-nilai yang akan diintegrasikan ke dalam RPP sebagai rencana pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Materi atau kompetensi dasar (KD) yang relevan dalam mengembangkan pendidikan antikorupsi yaitu sistem hukum dan peradilan nasional dan ancaman terhadap integrasi negara. Pendekatan pembelajaran yang digunakan yaitu saintifik, dengan model pembelajaran berbasis kooperatif dan pembelajaran berbasis masalah, serta metode yang digunakan adalah diskusi kelompok, tanya jawab dan kuis. Sedangkan nilai-nilai antikorupsi di internalisasi dalam mata pelajaran PPKn diantaranya kejujuran, kedisiplinan, tanggungjawab, keberanian, kerja keras, adil, kesederhanaan, mandiri, dan peduli.

SMA Negeri 6 Yogyakarta

Berdasarkan data penelitian yang telah diolah, SMA Negeri 6 Yogyakarta turut mengembangkan Pendidikan Antikorupsi secara terintegrasi ke dalam mata pelajaran. GK,(1-8)SMAN6,4/19 menyebutkan jika pengembangan pendidikan

antikorupsi melalui kurikulum sekolah bersifat tersirat sehingga strategi sekolah dalam menerapkan pendidikan antikorupsi melalui mata pelajaran pelaksanaannya melalui himbauan kepada siswa agar memiliki sikap antikorupsi. Hal ini dilakukan karena dalam kurikulum nasional belum diatur. GK,(1-8)SMAN6,4/19 menegaskan jika Sekolah dalam melakukan pembangunan kapasitas integral (*integral capacity building*) di kalangan guru dalam menyusun *action plan* pendidikan antikorupsi secara terintegrasi dalam mata pelajaran dilakukan ketika di awal tahun pelajaran. Proses internalisasi nilai-nilai antikorupsi ke dalam kurikulum sekolah dilakukan dengan memberikan instruksi kepada Bapak/Ibu pengampu mata pelajaran untuk mengaplikasikan nilai-nilai antikorupsi ke dalam aktivitas pembelajaran.

NY,(1-21)SMAN6,4/19 sebagai Guru PPKn menuturkan jika pengembangan pendidikan antikorupsi yang dilakukan melalui mata pelajaran PPKn yaitu dengan melakukan pembelajaran berbasis portofolio, yang didukung dengan pendekatan pembelajaran berbasis saintifik, dan model pembelajaran *discovery learning*, serta metode pembelajaran yang digunakan yaitu *problem based learning* (PBL).

Tahap dalam mengembangkan pendidikan antikorupsi melalui mata pelajaran PPKn dilakukan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap perencanaan yaitu dengan menyesuaikan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), mengaitkan materi dan nilai antikorupsi dengan kompetensi dasar (KD) yang sesuai. Berdasarkan data hasil dokumentasi tentang RPP semester genap kelas XI milik NY,(1-21)SMAN6,4/19 terdapat 3 kompetensi dasar (KD), yaitu Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan

internasional, Ancaman terhadap Integrasi Nasional, dan Makna Kesatuan dan Persatuan Bangsa. Dapat dijelaskan bahwa pada setiap KBM dalam RPP mengembangkan nilai-nilai antikorupsi.

Nilai-nilai antikorupsi yang dikembangkan dalam RPP meliputi kejujuran, kepedulian, kedisiplinan, kemandirian, tanggungjawab, keberanian, kerja keras, dan adil. Dalam mengembangkan nilai kejujuran, siswa secara jujur merangkum tentang hasil presentasi dalam kertas dan melakukan refleksi serta menyimpulkan materi yang telah dibahas pada setiap pertemuan. Dalam mengembangkan nilai mandiri yaitu dengan memerintahkan siswa merangkum hasil presentasi dalam kertas.

Dalam mengembangkan nilai disiplin yaitu dengan selalu memeriksa presensi kehadiran dan kesiapan siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Dalam mengembangkan nilai tanggungjawab siswa diminta untuk menyelesaikan tugas dalam menyusun presentasi. Dalam mengembangkan nilai keberanian, siswa diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi secara bergantian dan siswa yang lain dipersilahkan untuk menanggapi.

Dalam mengembangkan nilai kerja keras siswa diminta mencari informasi lanjutan dengan membaca berbagai sumber lain yang relevan dari buku, internet, web, media sosial untuk menyusun portofolio sesuai dengan sistematika yang sudah ditentukan. Dalam mengembangkan nilai keadilan yaitu dengan membagi siswa menjadi beberapa kelompok dengan cara berhitung secara berurutan tanpa memilih-milih teman dalam kelompoknya. Serta mengembangkan nilai peduli dengan meminta siswa untuk memperhatikan kebersihan dan kerapian ruang kelas.

Pelaksanaan pembelajaran PPKn dengan mengembangkan pendidikan antikorupsi yang dilakukan dengan metode portofolio dimulai dari kegiatan identifikasi yang dilakukan oleh siswa pada KBM. Pada kegiatan ini dari hasil Pengamatan, G-SMAN6Y(1/2)4-5/19 di kelas XI MIPA 3, 6, dan IPS 1, Ibu Guru menyampaikan materi dengan baik, dengan mengaitkan isu-isu terbaru. Misalnya dalam materi kasus-kasus ancaman terhadap Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Ibu Guru sempat menyinggung korupsi termasuk sebagai ancaman terhadap sektor politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dalam kegiatan ini Ibu Guru memberikan teladan kepada siswa untuk berani mengakui kesalahannya dengan memohon maaf saat kurang tepat dalam menyampaikan materi.

NY,(1-21)SMAN6,4/19 dalam mengembangkan pendidikan antikorupsi melalui pembelajaran PPKn menggunakan bahan ajar atau teknologi berupa menggunakan LCD proyektor ketika menyampaikan materi, kalau siswa selain menggunakan LCD proyektor ketika presentasi, juga menggunakan *handphone*-nya untuk mencari materi. Dalam kegiatan belajar mengajar yang berlangsung, siswa memiliki kesempatan untuk mengekspresikan pemikirannya tentang antikorupsi. Seperti yang disampaikan NY,(1-21)SMAN6,4/19 bahwa dalam kegiatan pembelajaran yang berbasis portofolio, ada kesempatan bagi tim penyaji untuk menyampaikan pemikiran atau gagasannya. Misalkan membahas tentang antikorupsi, para siswa akan menyampaikan gagasan-gagasan mereka tentang antikorupsi.

Perihal penanaman nilai-nilai antikorupsi kepada siswa melalui pembelajaran PPKn NY,(1-21)SMAN6,4/19 menyampaikan jika dilakukan secara kurikulum tersembunyi (*hidden curriculum*), dalam pembelajaran PPKn yaitu melalui penyelesaian portofolio. Melalui model portofolio ini beberapa nilai antikorupsi dapat di internalisasi, seperti kejujuran, kedisiplinan, kerja keras, tanggung jawab, keberanian. Guru PPKn memiliki peran dalam membangun iklim antikorupsi melalui pembelajaran yang dilakukan di kelas. Peran yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan penguatan dan hukuman kepada siswa. Secara verbal penguatan yang diberikan berupa komentar kepada siswa ketika siswa tidak serius dalam mempresentasikan tugasnya, atau ada jawaban yang tidak tepat disampaikan siswa saya berikan tambahan kira-kira yang tepat seperti apa. Selain juga dengan teguran ketika siswa berperilaku yang kurang baik seperti makan dengan tangan kiri, atau menjegal kaki temannya.

Secara non-verbal NY,(1-21)SMAN6,4/19 menyampaikan bentuk penguatan yang diberikan berupa acungan jempol ketika siswa tepat dalam menjawab atau mengerjakan tugas sesuai perintah. Selain dalam memperkuat iklim antikorupsi yang terbangun di kelas, hukuman yang bisa diberikan kepada siswa ketika melanggar peraturan atau berbuat tidak sesuai nilai-nilai antikorupsi dengan memberikan teguran.

Usaha lain dalam membangun iklim antikorupsi di kelas disampaikan NY,(1-21)SMAN6,4/19 yaitu dilakukan dengan membiasakan anak-anak untuk tertib ketika di kelas. Saya menekankan kepada para siswa harus tepat waktu. Selain itu, ketika ujian ada siswa yang ketahuan mencontek lembar jawaban akan

saya ambil. Anak tersebut akan saya berikan tugas lain yang berbeda dari soal sebelumnya. Berdasarkan hasil Pengamatan,LS-SMAN6Y(2/7)4-5/19, siswa dalam pembelajaran tentang kasus-kasus ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan juga turut mendiskusikan korupsi sebagai salah satu ancaman bagi negara menyampaikan bahwa korupsi termasuk ancaman terhadap ketahanan negara yang harus diperangi dan diberantas.

Pada tahap kegiatan penutup, peran Guru PPKn yaitu memberikan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan. Hasil Pengamatan,G-SMAN6Y(1/3)4-5/19 menunjukkan bahwa Ibu Guru mengakhiri kegiatan belajar mengajar dengan memberikan kesimpulan atas materi yang telah disampaikan dan tidak lupa memberikan refleksi kepada siswa agar kelak ketika menjadi pejabat publik bisa amanah menjalankan tugasnya dengan baik. Selain itu ada bentuk refleksi yang dapat diberikan dalam membangun kesadaran antikorupsi siswa yaitu dengan memberikan refleksi pada simpulan akhir pembelajaran. Misalnya ketika membahas masalah lembaga-lembaga negara dan pejabat yang korup. Disitu saya menyampaikan dampak-dampak yang dihasilkan oleh perilaku yang korup, baik personal maupun publik.

Bentuk evaluasi pembelajaran PPKn dengan mengembangkan pendidikan antikorupsi yang dilakukan melalui model portofolio, penilaiannya dilakukan dengan mempertimbangkan muatan kejujuran seperti dari mana materinya, kedisiplinan seperti kapan pengumpulannya, kerja keras seperti usaha dalam penyusunan portofolio, tanggung jawab seperti tanggung jawab menyelesaikan tugas, keberanian dengan berani menyampaikan gagasannya. Ketika ada yang salah

atau kurang, tinggal kita tegur dan memberi komentar terhadap kekurangan yang disampaikan oleh siswa.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi pendidikan antikorupsi melalui mata pelajaran PPKn di SMAN 6 Yogyakarta dilakukan berbasis portofolio. Dalam pembelajaran PPKn dengan mengembangkan pendidikan antikorupsi berbasis portofolio, pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah saintifik, dan model pembelajarannya *discovery learning*. Serta metode pembelajaran yang digunakan yaitu *problem based learning* (PBL). Muatan materi antikorupsi dan nilai-nilai antikorupsi secara relevan terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran PPKn. Pengembangan materi antikorupsi dilakukan secara integrasi ke dalam KD yang relevan seperti ancaman terhadap integrasi negara, dan untuk penanaman nilai-nilai antikorupsi di internalisasi ke dalam aktivitas belajar siswa di kelas. Nilai antikorupsi yang ditanamkan meliputi kejujuran, kepedulian, kedisiplinan, kemandirian, tanggungjawab, keberanian, kerja keras, dan adil.

b) Implementasi Pendidikan Antikorupsi Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler

Data penelitian tentang implementasi Pendidikan Antikorupsi melalui kegiatan ekstrakurikuler dapat dikategorikan menurut lokasi/tempat penelitian. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ada tiga sekolah menengah atas negeri (SMAN) di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai lokasi/tempat penelitian, diantaranya: SMA Negeri 1 Sleman, SMA Negeri 2 Bantul, dan SMA Negeri 6 Yogyakarta.

SMA Negeri 1 Sleman

Berdasarkan data penelitian yang telah diolah, SMA Negeri 1 Sleman telah mengembangkan Pendidikan Antikorupsi melalui kegiatan ekstrakurikuler. Dalam implementasi pendidikan antikorupsi yang dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler di SMAN 1 Sleman mendapat dukungan dari Kepala Sekolah dan ditunjang oleh sarana dan prasarana. Sekolah dalam mengembangkan pendidikan antikorupsi di integrasi ke dalam program penguatan pendidikan karakter seperti pengenalan lingkungan sekolah, dan dikembangkan melalui kegiatan ekstrakurikuler agar siswa karakternya terbentuk secara menyeluruh (HD,(1-19)SMAN1,5/19).

Berdasarkan hasil Pengamatan,LS-SMAN1S(2/6)5/19, bidang kesiswaan memiliki tim dalam mengembangkan bakat minat siswa serta pembentukan karakter siswa. Bidang kesiswaan selalu responsif terhadap kegiatan-kegiatan siswa dan memberikan bimbingan agar siswa dapat mandiri dalam melaksanakan kegiatannya. Adanya pelanggaran yang dilakukan siswa, bidang kesiswaan selalu tanggap dalam memberikan tindakan agar pelanggaran tersebut tidak menjadi kebiasaan yang dilakukan siswa. Serta ada hukuman yang diberikan kepada siswa berupa teguran, tugas mandiri di perpustakaan untuk meringkas, kalau lebih dari itu hukumannya langsung saja menggunakan tata tertib sekolah.

Secara khusus dalam pengembangan pendidikan antikorupsi melalui kegiatan ekstrakurikuler di SMAN 1 Sleman dilakukan melalui kantin kejujuran, kewirausahaan, dan secara umum melalui kegiatan ekstrakurikuler yang pilihan dan wajib diikuti siswa. Sekolah mewajibkan siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler

di kelas X dan XI. Untuk siswa kelas X dan XI wajib untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka dan ekstrakurikuler pilihan. Melalui kegiatan ekstrakurikuler ini merupakan upaya sekolah dalam menginternalisasi nilai-nilai antikorupsi kepada siswa (HD,(1-19)SMAN1,5/19).

Selain pramuka, berdasarkan data hasil dokumentasi ada berbagai kegiatan ekstrakurikuler di SMAN 1 Sleman sebagai wadah dalam mengembangkan pendidikan antikorupsi, seperti KIR, jurnalistik, band, seni tari, karawitan, palang merah remaja (PMR), pencak silat, bola voli, bola basket, futsal, bulu tangkis, dan seni baca Al Qur'an. Hasil Pengamatan,LS-SMAN1S(2/5)5/19 pada kegiatan ekstrakurikuler pramuka dan basket, dapat di deskripsikan bahwa kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka dan bola basket juga menginternalisasi nilai-nilai antikorupsi pada siswa. Dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka siswa diajarkan untuk disiplin dengan segala tindakan dilakukan dengan tepat waktu, jujur dalam berbicara dan bertindak, tanggungjawab terhadap tugas, peduli terhadap teman yang lain dengan saling tolong-menolong dan terhadap lingkungan seperti membersihkan tempat yang kotor karena telah digunakan latihan, berani dalam menyampaikan pendapat, kerja keras dalam menyelesaikan tugas, adil terhadap semua rekan dengan tidak membedakan, serta sederhana dalam berperilaku. Sedangkan dalam kegiatan ekstrakurikuler basket siswa dituntut untuk kerja keras dalam berlatih, mandiri dalam mempersiapkan event, disiplin dalam latihan, dan tanggung jawab terhadap job desk yang sudah di bagi karena sedang melakukan persiapan untuk *event development basketball league* (DBL).

Dalam mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler, setiap awal tahun pelajaran selalu ada rapat yang membahas tentang perencanaan program ekstrakurikuler yang akan dilaksanakan beserta program kerja yang dibentuk anak-anak sendiri. Dalam pelaksanaannya dengan mengembangkan pendidikan antikorupsi, kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti siswa akan menanamkan nilai-nilai antikorupsi kepada seperti kedisiplinan, kemandirian, kesederhanaan, keberanian, tanggung jawab, dan kepedulian, dst (HD,(1-19)SMAN1,5/19).

Kegiatan ekstrakurikuler dapat disebut sebagai wadah mengekspresikan pemikiran siswa tentang antikorupsi karena dalam kegiatan ekstrakurikuler, siswa diberikan kesempatan dan kebebasan dalam mengelola ekstrakurikuler masing-masing. Kebebasan yang dapat dilakukan siswa mulai dari perencanaan, penyusunan anggaran, pelaksanaan dan laporan pertanggung jawaban.

Sebagai Waka. Kesiswaan yang membawahi seluruh kegiatan ekstrakurikuler (HD,(1-19)SMAN1,5/19) tidak lupa untuk memberikan penguatan secara verbal kepada siswa dengan memberikan gambaran tentang korupsi dengan menjelaskan bahwa awal mulanya korupsi itu dari yang kecil-kecil, seperti korupsi waktu, uang 10 ribu, 20 ribu, pelanggaran-pelanggaran kecil semacam ini jika tidak langsung diberi penjelasan maka akan menjadi kebiasaan. Bentuk penguatan secara verbal ini diberikan agar siswa amanah dalam mengelola setiap kegiatan ekstrakurikuler yang mereka laksanakan.

HD,(1-19)SMAN1,5/19 menambahkan jika sekolah dalam upayanya memberikan pendidikan antikorupsi kepada siswa dilakukan dengan mengundang pihak luar sekolah seperti mengundang kyai atau ustaz dalam memberikan ceramah

kepada siswa tentang pentingnya hidup jujur. Mengundang Komando Distrik Militer (KODIM) dalam rangka kegiatan penguatan karakter siswa agar disiplin, kerja keras, tanggung jawab, berani. Selanjutnya ada kegiatan ke pesantren selama tiga menginap di sana dan yayasan yatim piatu dalam rangka membentuk karakter peduli, adil, mandiri, dan sederhana siswa. Kegiatan-kegiatan semacam itu dapat dikategorikan sebagai bentuk penguatan non-verbal yang dilakukan kepada siswa. Tujuannya adalah untuk memperkuat karakter siswa agar tidak terjebak dalam perilaku yang korup. Selain itu secara non-verbal, ada simbol-simbol dan tulisan berupa pentingnya kejujuran, hindari korupsi yang ditempel di dinding-dinding sekolah.

Berdasarkan hasil Pengamatan,LS-SMAN1S(2/8)5/19 tentang iklim antikorupsi di lingkungan sekolah dapat di deskripsikan bahwa sekolah serius dalam membangun iklim antikorupsi di lingkungan sekolah. Hal ini terbukti banyak simbol-simbol yang mengajak untuk memerangi korupsi dan ajakan untuk jujur. Dalam kegiatan yang berlangsung di kantin kejujuran, siswa terlatih untuk jujur dalam membeli sesuatu. Siswa dalam membeli sesuatu di koperasi kejujuran juga tidak pernah ada masalah, siswa membayarkan sesuai harga barang yang dibeli dan sesuai mengambil uang kembalian. Selain itu sekolah juga mengajarkan siswa untuk transparansi dengan memberikan laporan keuangan secara terbuka yang dipajang pada papan informasi sekolah.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi pendidikan antikorupsi yang dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler dikembangkan dengan mengadopsi program penguatan pendidikan karakter.

Pengembangan pendidikan antikorupsi melalui kegiatan ekstrakurikuler dilakukan melalui kantin kejujuran, kewirausahaan, dan secara umum melalui ekstrakurikuler Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib dan ekstrakurikuler pilihan seperti KIR, jurnalistik, band, seni tari, karawitan, palang merah remaja (PMR), pencak silat, bola voli, bola basket, futsal, bulu tangkis, dan seni baca Al Qur'an. Nilai-nilai antikorupsi yang dikembangkan dalam kegiatan yaitu jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, berani, kerja keras, mandiri, adil dan sederhana.

SMA Negeri 2 Bantul

Berdasarkan data penelitian yang telah diolah, SMA Negeri 2 Bantul telah mengembangkan Pendidikan Antikorupsi melalui kegiatan ekstrakurikuler. Pengembangan pendidikan antikorupsi yang dilakukan dengan memasukannya ke dalam program penguatan pendidikan karakter / PPK yang memiliki nilai utama yaitu integritas, gotong royong, kemandirian, nasionalisme dan religiositas, melalui PPK pendidikan antikorupsi kepada siswa dapat dikembangkan.

Program penguatan pendidikan karakter yang diimplementasikan ke dalam semua kegiatan sekolah termasuk ekstrakurikuler juga mengembangkan pendidikan antikorupsi. PPK memiliki muatan pokok yang menunjang penerapan pendidikan antikorupsi kepada siswa. Dalam penerapan pendidikan antikorupsi melalui kegiatan ekstrakurikuler dapat dilakukan dengan menginternalisasi nilai-nilai antikorupsi pada kegiatan ekstrakurikuler yaitu dengan memberikan para siswa tanggung jawab di setiap kegiatan, seperti sebagai panitia pelaksana atau penanggung jawab kegiatan ekstrakurikuler. Dari pemberian tanggung jawab

semacam itu siswa akan terlatih untuk jujur, disiplin, tanggung jawab, mandiri, dan kerja keras (SU,(1-19)SMAN2,4/19).

SU,(1-19)SMAN2,4/19 menuturkan, belum adanya kebijakan khusus tentang program pendidikan antikorupsi sehingga dalam pelaksanaannya masih di integrasi ke dalam kegiatan ekstrakurikuler. Perencanaannya dilakukan setiap tahun secara implisit dengan melibatkan siswa dari berbagai ekstrakurikuler yang mereka ikuti. Bapak/Ibu Guru selalu mendampingi siswa mulai dari penyusunan program kerja sampai dengan pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban. Dalam pelaksanaannya, siswa diharapkan berpartisipasi pada semua kegiatan yang dilakukan sekolah.

Pengembangan pendidikan antikorupsi bisa terintegrasi ke dalam semua kegiatan ekstrakurikuler seperti Keagamaan (Rohani Islam, Rohani Kristen dan Katolik), Kepemimpinan (Paskibra dan Pramuka), selain itu ada kegiatan-kegiatan insidental berupa peringatan hari besar, disitu ada presensi yang harus siswa isi sendiri dan melalui aktivitas seperti itu akan melatih kejujuran siswa. Selain itu ada kegiatan yang biasa dilakukan sekolah dalam menunjang pengembangan pendidikan antikorupsi kepada siswa diantaranya kegiatan-kegiatan yang dikelola oleh ROHIS, karena dalam kegiatan keagamaan akan memberikan refleksi kepada siswa untuk tidak berbuat buruk atau korup.

Selain itu dalam menunjang pengembangan pendidikan antikorupsi melalui kegiatan ekstrakurikuler, sekolah memiliki konstitusi siswa berupa tata tertib yang menjadi pedoman siswa dalam berperilaku sebagai warga sekolah dengan baik. Dalam tata tertib termuat aturan baku terhadap pelanggaran ringan, sedang, dan

berat, disertai sanksi-sanksi terhadap bentuk pelanggaran yang dilakukan (SU,(1-19)SMAN2,4/19).

Berdasarkan hasil Pengamatan,LS-SMAN2B(2/5)4-5/19 yang diperoleh dari kegiatan ekstrakurikuler seperti paskibra, basket, pembinaan lomba cerdas cermat (LCC) juga menginternalisasi nilai-nilai antikorupsi pada setiap kegiatannya. Seperti paskibra yang merupakan jenis ekstrakurikuler kepemimpinan, mengajarkan siswa untuk disiplin dengan datang latihan tepat waktu, tanggung jawab sebagai petugas upacara, kerja keras dalam berlatih, mandiri sebagai pribadi, peduli terhadap sesama rekan, dan berani mengambil resiko dan menyampaikan pendapat, adil dalam membagi tugas, jujur dalam menyampaikan pendapat, serta sederhana dengan berpakaian rapi. Dalam ekstrakurikuler basket yang sedang melakukan persiapan untuk event DBL, siswa dituntut untuk kerja keras dalam berlatih, mandiri dalam mempersiapkan event, disiplin dalam menjalankan instruksi pelatih, dan tanggung jawab terhadap job desk yang sudah di bagi. Dan dalam ekstrakurikuler pembinaan lomba cerdas cermat (LCC) siswa diajarkan untuk kerja keras sampai pulang larut malam untuk melakukan persiapan lomba, disiplin dalam persiapan, adil dalam membagi tugas, tanggung jawab terhadap job desk masing-masing, mandiri mencari materi, berani mengambil keputusan, jujur ketika mengalami kesulitan dan berani mengambil menyampaikan gagasan.

Bapak/Ibu Guru dalam pengembangan pendidikan antikorupsi juga dapat memberikan penguatan secara verbal maupun non-verbal dalam kegiatan ekstrakurikuler kepada siswa agar perilaku korup yang ada dalam diri siswa tidak

menjadi endemik. SU,(1-19)SMAN2,4/19 menjelaskan jika secara verbal Bapak/Ibu Guru selalu memberikan teguran ketika ada siswa yang melakukan pelanggaran dan memberikan motivasi kepada siswa misalnya “harus disiplin” dan jangan terlambat lagi. Secara non-verbal bentuk penguatan kepada siswa yang Bapak/Ibu Guru lakukan yaitu memberikan hukuman yang bersifat mendidik, berupa kegiatan-kegiatan.

Upaya lain yang dilakukan sekolah dalam mengembangkan pendidikan antikorupsi yaitu dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang bekerja sama dengan pihak luar sekolah, seperti bekerja sama dengan kapolsek, Lembaga pemasyarakatan, pondok pesantren, panti asuhan, dan pihak lainnya dengan tujuan sebagai upaya penguatan karakter siswa dengan mengembangkan pendidikan antikorupsi kepada siswa.

Sekolah juga memberikan kesempatan kepada siswa dalam mengekspresikan pemikiran mereka tentang antikorupsi. Setiap akhir semester sekolah selalu mengadakan forum dialog terbuka yang diikuti siswa, dalam kegiatan tersebut kita melakukan evaluasi atas kegiatan-kegiatan baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler yang telah berlangsung selama satu semester. Dalam forum itu para siswa dipersilahkan menyampaikan pemikiran atau masukan-masukannya. Secara khusus untuk evaluasi terhadap implementasi pendidikan antikorupsi terintegrasi dalam kegiatan ekstrakurikuler. Untuk evaluasi menyesuaikan kegiatan-kegiatan tersebut dengan dilakukan di setiap habis kegiatan, langsung diadakan kegiatan evaluasi.

Dalam pelaksanaan pendidikan antikorupsi yang dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler terdapat faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukungnya secara sarana sudah memadai, dan kesiswaan memiliki tim pembinaan siswa sebanyak 10 orang tugasnya untuk menangani kegiatan siswa serta penguatan karakter siswa seperti kedisiplinan, kejujuran, tanggung jawab, dst. Sedangkan faktor penghambat dalam pengembangan pendidikan antikorupsi melalui kegiatan ekstrakurikuler yaitu karakteristik siswa yang bermacam-macam sehingga sulit untuk menangani siswa secara menyeluruh.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi pendidikan antikorupsi yang dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler dikembangkan dengan mengadopsi program penguatan pendidikan karakter. Pengembangan pendidikan antikorupsi dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti keagamaan (Rohani Islam, Rohani Kristen dan Katolik), kepemimpinan (Paskibra dan Pramuka), keolahragaan (basket, bola voli, karate, Pencak silat), Palang Merah Remaja, seni (Teater, Band, Seni Tari, Paduan Suara), Kelompok Ilmiah Remaja (*Smadaba Research Community*), Kelompok Majalah kreasi; Kewirausahaan, dan Pembinaan Olimpiade Sains dan Teknologi. Nilai-nilai antikorupsi yang dikembangkan dalam kegiatan yaitu jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, berani, kerja keras, mandiri, berani dan sederhana.

SMA Negeri 6 Yogyakarta

Berdasarkan data penelitian yang telah diolah, SMA Negeri 6 Yogyakarta telah mengembangkan Pendidikan Antikorupsi melalui kegiatan ekstrakurikuler. SMAN 6 Yogyakarta dalam menunjang pengembangan pendidikan antikorupsi

kepada siswa yaitu melakukan kerja sama dengan Brigade Mobil (Brimob). Kegiatan tersebut sifatnya adalah penguatan pendidikan karakter yang berlangsung saat memasuki awal tahun pelajaran. Pada kegiatan tersebut karakter siswa akan dibentuk, seperti disiplin, mandiri, kerja keras, keberanian, kepedulian, dan tanggungjawab. Sebenarnya sekolah pernah bekerja sama dengan KPK, ada kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPK tentang pentingnya berperilaku antikorupsi sejak dini. Namun bentuk kerja sama itu dilakukan lima tahun yang lalu (AF,(1-19)SMAN6,4/19).

AF,(1-19)SMAN6,4/19 menambahkan jika sekolah dalam mengembangkan pendidikan antikorupsi juga dilakukan melalui kantin kejujuran, disitu siswa bayar sendiri, ambil kembalian sendiri, di situlah yang muncul pembiasaan pada siswa agar mengambil sesuai dengan haknya. Kegiatan seperti itu akan melahirkan sebuah iklim yang bernuansa antikorupsi di lingkungan sekolah. Berdasarkan hasil Pengamatan,LS-SMAN6Y(2/8)4-5/19, iklim antikorupsi di lingkungan sekolah cukup baik. Dari hasil pengamatan yang diperoleh dapat di deskripsikan bahwa siswa berani jujur melaporkan barang atau uang yang mereka temukan di lingkungan sekolah.

Perencanaan pengembangan pendidikan antikorupsi yang di lakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler menyesuaikan dengan bentuk kegiatan pada ekstrakurikuler masing-masing. Ada beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang mengembangkan pendidikan antikorupsi pada setiap kegiatannya, seperti kewirausahaan yang wajib diikuti seluruh siswa, dan beberapa kegiatan ekstrakurikuler lainnya seperti pramuka (AF,(1-19)SMAN6,4/19). Berdasarkan

data hasil dokumentasi, ada ekstrakurikuler yang sifatnya pengembangan potensi diri siswa. Beberapa ekstrakurikuler terdiri dari bidang olahraga, meliputi PBB, Bola Voli, Futsal, Basket Ball, Bulutangkis, dan Bela diri Karate; bidang keterampilan berbahasa meliputi Bahasa Perancis, Bahasa Jepang, dan English Study Club; bidang kesenian meliputi Paduan Suara, Teater, Karawitan, Nasyid, Seni Baca Al-Quran, Seni Tari, dan Seni Musik; bidang keahlian meliputi KIR (Kelompok Ilmiah Remaja), Jurnalistik, dan Fotografi; bidang sosial-kemasyarakatan meliputi PMR dan Pecinta alam.

AF,(1-19)SMAN6,4/19 menuturkan jika kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan dengan mengembangkan pendidikan antikorupsi akan menginternalisasi nilai-nilai antikorupsi. Proses internalisasi nilai-nilai antikorupsi yang dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler dapat dijelaskan bahwa siswa yang tergabung dalam ekstrakurikuler akan membentuk program kerja dan mendapat anggaran dalam melaksanakan program kerjanya. Selanjutnya siswa membuat SPJ untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang digunakan. Dalam hal ini ada nilai-nilai yang sudah diterapkan, misalnya kejujuran, kerja keras, mandiri dan tanggung jawab.

Selain itu berdasarkan Pengamatan,LS-SMAN6Y(2/5)4-5/19 tentang kegiatan ekstrakurikuler dalam mengamalkan nilai-nilai antikorupsi berlangsung dengan baik. Dapat di deskripsikan bahwa kegiatan ekstrakurikuler seperti teater, pramuka, dan basket mengajarkan siswa dalam penanaman nilai-nilai antikorupsi. Seperti teater dalam mempersiapkan pentas yang akan digelar siswa dituntut untuk kerja keras dalam menyukkseskan event, mandiri dalam melakukan persiapan,

disiplin dalam melakukan latihan, tanggung jawab terhadap *job desk* masing-masing, dan jujur dalam pengolahan dana. Dalam ekstrakurikuler basket yang akan mengikuti event DBL, siswa dituntut untuk disiplin ketika datang berlatih, kerja keras dalam berlatih, mandiri dalam mempersiapkan *event*, dan tanggung jawab terhadap menjalankan instruksi pelatih. Dan dalam ekstrakurikuler pramuka, semua nilai-nilai antikorupsi di internalisasi dalam ekstrakurikuler ini karena siswa diajarkan untuk jujur dalam menyampaikan pendapat, berani untuk berpendapat di depan umum, disiplin dengan menyelesaikan tugas tepat waktu, tanggung jawab terhadap tugas masing-masing, mandiri dalam menyelesaikan tugas, kerja keras dalam menyelesaikan pekerjaan, peduli terhadap lingkungan sekitar, sederhana sebagai pribadi, dan adil terhadap teman di sekitar.

Pengembangan pendidikan antikorupsi yang dilaksanakan melalui kegiatan ekstrakurikuler dapat diperkuat dengan adanya penguatan yang diberikan oleh Bapak/Ibu Guru di sekolah. Secara verbal penguatan yang diberikan Bapak/Ibu Guru kepada siswa berupa himbauan-himbauan saja ke anak-anak, untuk jujur, disiplin. Sedangkan secara non-verbal peran sekolah dalam membangun kesadaran antikorupsi siswa yaitu dengan kegiatan-kegiatan yang secara langsung berkenaan dengan siswa. Misalnya ada buku penemuan, siswa yang menemukan barang melaporkan dengan mencatat di buku tersebut, dan akan diumumkan. Selanjutnya ada kegiatan kewirausahaan, dalam kegiatan tersebut siswa berkenaan langsung dengan uang, lalu bagaimana siswa dapat mengelola uang tersebut dan bisa mempertanggungjawabkannya. Selain itu ada tata tertib siswa yang merupakan konstitusi siswa yang menunjang pengembangan pendidikan antikorupsi. Dalam

tata tertib tersebut tertulis pedoman siswa untuk berperilaku sebagai warga sekolah yang baik (AF,(1-19)SMAN6,4/19).

AF,(1-19)SMAN6,4/19 menegaskan jika kegiatan kewirausahaan termasuk upaya sekolah dalam memberikan pendidikan antikorupsi kepada siswa. Sekolah melalui Bapak dan Ibu Guru pernah membawa siswa ke lingkungan diluar sekolah seperti membuka kantin di Taman Pintar. Alur pada kegiatan ini yaitu siswa diberikan modal untuk membuat produk, hasil produk yang siswa telah buat akan dijual di sana. Setelah itu siswa harus membuat laporan dari hasil penjualan produknya.

Faktor pendukung dari implementasi pendidikan antikorupsi yang dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler yaitu adanya dukungan dari Kepala Sekolah berupa instruksi untuk mengembangkan program penguatan pendidikan karakter dan pengembangan sekolah berbasis kewirausahaan. Bentuk program tersebut menjadi faktor pendukung terhadap pengembangan pendidikan antikorupsi melalui kegiatan ekstrakurikuler (AF,(1-19)SMAN6,4/19).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi pendidikan antikorupsi yang dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler dikembangkan melakukan kerja sama dengan Brimob yang dilakukan saat memasuki awal tahun pelajaran. Pengembangan pendidikan antikorupsi dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti ekstrakurikuler bidang olahraga, meliputi PBB, Bola Voli, Futsal, Basket Ball, Bulutangkis, dan Bela diri Karate; bidang keterampilan berbahasa meliputi Bahasa Perancis, Bahasa Jepang, dan English Study Club; bidang kesenian meliputi Paduan Suara, Teater, Karawitan, Nasyid,

Seni Baca Al-Quran, Seni Tari, dan Seni Musik; bidang keahlian meliputi KIR (Kelompok Ilmiah Remaja), Jurnalistik, dan Fotografi; bidang sosial-kemasyarakatan meliputi PMR dan Pecinta alam. Nilai-nilai antikorupsi yang dikembangkan dalam kegiatan yaitu jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, berani, kerja keras, mandiri, berani dan sederhana.

2) Warga Negara Muda Berintegritas

Data penelitian tentang warga negara muda berintegritas dapat dikategorikan menurut lokasi/tempat penelitian. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ada tiga sekolah menengah atas negeri (SMAN) di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai lokasi/tempat penelitian, diantaranya: SMA Negeri 1 Sleman, SMA Negeri 2 Bantul, dan SMA Negeri 6 Yogyakarta.

a) SMA Negeri 1 Sleman

Berdasarkan hasil penelitian pada pembahasan sebelumnya, diketahui bahwa beberapa sekolah telah melaksanakan pendidikan antikorupsi yang terintegrasi melalui mata pelajaran PPKn dan kegiatan ekstrakurikuler. Dilaksanakannya pendidikan antikorupsi kepada siswa selain untuk memberikan pengetahuan tentang antikorupsi, juga untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi kepada mereka. Harapan dilaksanakannya pendidikan antikorupsi kepada siswa supaya siswa sebagai warga negara muda menjadi generasi penerus yang berintegritas.

Berdasarkan data penelitian yang telah diolah, siswa SMA Negeri 1 Sleman dapat dikategorikan sebagai warga negara muda yang berintegritas. Hal ini dapat dilihat dari cara mengamalkan perilaku antikorupsi di kehidupan sehari-hari, seperti

tidak mau mencontek, ketika meminjam barang teman harus izin pemiliknya, mengembalikan barang yang dipinjam, dan selektif terhadap penggunaan uang (NM,(1-14)SMAN1,5/19), serta berkata jujur saat ditanya (NA,(1-14)SMAN1,5/19).

Ada sembilan nilai antikorupsi yang dapat mencerminkan integritas dalam diri siswa. Sembilan nilai tersebut diantaranya: kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Dalam kehidupan sehari-hari (NM,(1-14)SMAN1,5/19; NA,(1-14)SMAN1,5/19) mengamalkan nilai kejujuran yaitu dengan tidak mencontek dan menjawab pertanyaan dengan sebenar-benarnya. Berdasarkan Pengamatan,PD-SMAN1S(3/2)5/19, aktivitas siswa dalam mengamalkan nilai kejujuran berupa membayar sesuai harga ketika membeli di koperasi kejujuran dan izin meninggalkan kelas/sekolah sesuai dengan keperluannya.

Aktivitas siswa dalam mengamalkan nilai kepedulian cukup baik, berdasarkan Pengamatan,PD-SMAN1S(3/3)5/19 yaitu membantu teman yang diperintah mengumpulkan tugas siswa satu kelas dan meminjami alat tulis kepada siswa lainnya. NM,(1-14)SMAN1,5/19 menyampaikan bahwa dalam mengamalkan nilai kepedulian yaitu memberikan perhatian kepada teman jika ada teman yang terlihat murung, membantu teman yang membutuhkan bantuan, dan membuang sampah pada tempatnya.

Aktivitas siswa dalam mengamalkan nilai kemandirian cukup baik, berdasarkan Pengamatan,PD-SMAN1S(3/4)5/19 dilakukan dengan berusaha menyelesaikan kegiatan sesuai job desk masing-masing dan mengerjakan tugas

yang diberikan oleh guru sendiri-sendiri. NM,(1-14)SMAN1,5/19; NA,(1-14)SMAN1,5/19 dalam mengamalkan nilai kemandirian yaitu tidak melempar pekerjaan ke orang lain dan mempersiapkan segala keperluan tanpa merepotkan orang lain.

Aktivitas siswa dalam mengamalkan nilai kedisiplinan cukup baik, NM,(1-14)SMAN1,5/19 dalam melatih kedisiplinan yaitu dengan membuat catatan dalam buku plan sehingga tugas dalam bentuk apapun tidak sampai telat dalam penyelesaiannya. Berdasarkan Pengamatan,PD-SMAN1S(3/5)5/19 kedisiplinan yang dilakukan siswa berupa datang tepat waktu ke sekolah dan mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu batas waktu yang ditentukan.

Aktivitas siswa dalam mengamalkan nilai tanggung jawab cukup baik, berdasarkan Pengamatan,PD-SMAN1S(3/6)5/19 bentuk tanggung jawab siswa dapat dilihat dari menyukseskan sebuah acara dengan merencanakan kegiatan dengan baik, mengembalikan buku teman yang di pinjam, dan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak/Ibu Guru sesuai dengan perintah. NM,(1-14)SMAN1,5/19; NA,(1-14)SMAN1,5/19 menambahkan bentuk tanggung jawab lain yang dilakukan oleh siswa berupa menyimpan uang organisasi sebaik mungkin, melaporkan keuangan sesuai dengan pemasukan dan pengeluaran, dan sebagai siswa untuk tidak lupa belajar.

Aktivitas siswa dalam mengamalkan nilai kerja keras cukup baik, berdasarkan Pengamatan,PD-SMAN1S(3/7)5/19 siswa bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu yang diberikan dan berusaha untuk menyukseskan sebuah kegiatan dengan berkonsultasi kepada Bapak/Ibu Guru

tentang rencana yang sudah dibuat. NM,(1-14)SMAN1,5/19 menambahkan jika bentuk kerja keras yang dilakukan yaitu berusaha mengumpulkan anggaran untuk dana usaha (DANUS) sesuai dengan target.

Aktivitas siswa dalam mengamalkan nilai kesederhanaan sangat baik, berdasarkan Pengamatan,PD-SMAN1S(3/8)5/19 siswa berpakaian sesuai dengan ketentuan sekolah, rapi, tidak banyak siswa yang menggunakan barang yang *branded*, dan membawa bekal makanan dari rumah. NA,(1-14)SMAN1,5/19 menambahkan jika dalam mengamalkan nilai kesederhanaan yaitu dengan membelanjakan uang saku sesuai kebutuhan, tidak meminta uang berlebih.

Aktivitas siswa dalam mengamalkan nilai keberanian cukup baik, berdasarkan Pengamatan,PD-SMAN1S(3/9)5/19 siswa dalam kegiatan belajar mengajar berani menyampaikan pendapatnya, atau bertanya kepada Bapak Guru tentang materi yang belum di mengerti. NA,(1-14)SMAN1,5/19; NM,(1-14)SMAN1,5/19 menambahkan jika dalam mengamalkan nilai keberanian yaitu berani memberikan urun pendapat ketika sedang berdiskusi atau rapat, dan melaporkan teman yang biasa mencontek.

Aktivitas siswa dalam mengamalkan nilai keadilan sangat baik, berdasarkan Pengamatan,PD-SMAN1S(3/10)5/19 siswa tidak memilih-memilih dalam berteman, meskipun ada siswa yang sedikit memiliki masalah mental para siswa tidak membedakan-bedakannya, dan dalam pembagian kelompok ketua kelas dapat membaginya secara adil.

Selain merujuk pada sembilan nilai antikorupsi diatas, integritas siswa dapat dijelaskan melalui perasaan mereka ketika melanggar peraturan atau berbuat tidak

sesuai nilai-nilai antikorupsi. NM,(1-14)SMAN1,5/19 mencontohkan ketika datang terlambat ada perasaan cemas (tidak tenang), dan NA,(1-14)SMAN1,5/19 tidak puas ketika mendapat nilai bagus dari hasil mencontek. Beberapa contoh tersebut menunjukkan jika perbuatan yang melanggar peraturan atau tidak sesuai nilai-nilai antikorupsi ketika dilakukan akan menimbulkan perasaan yang tidak tenang dalam diri siswa. Pada bulan April tercatat ada 15 siswa di buku pelanggaran yang melanggar peraturan. Mayoritas peraturan yang dilanggar oleh siswa adalah datang terlambat ke sekolah. Dengan demikian penerapan pendidikan antikorupsi penting untuk diberikan kepada siswa karena akan membiasakan siswa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai antikorupsi dan menambah wawasan siswa tentang antikorupsi sehingga akan membentuk integritas dalam diri mereka.

b) SMA Negeri 2 Bantul

Berdasarkan hasil penelitian pada pembahasan sebelumnya, diketahui bahwa beberapa sekolah telah melaksanakan pendidikan antikorupsi yang terintegrasi melalui mata pelajaran PPKn dan kegiatan ekstrakurikuler. Dilaksanakannya pendidikan antikorupsi kepada siswa selain untuk memberikan pengetahuan tentang antikorupsi, juga untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi kepada mereka. Harapan dilaksanakannya pendidikan antikorupsi kepada siswa supaya siswa sebagai warga negara muda menjadi generasi penerus yang berintegritas.

Berdasarkan data penelitian yang telah diolah, siswa SMA Negeri 2 Bantul dapat dikategorikan sebagai warga negara muda yang berintegritas. Hal ini dapat dilihat dari cara mengamalkan perilaku antikorupsi di kehidupan sehari-hari, seperti

AR,(1-14)SMAN2,4/19 dalam mengamalkan perilaku antikorupsi yaitu dengan selalu datang tepat waktu, mentaati peraturan, dan ketika menjadi bendahara kegiatan atau mendapatkan amanah dalam bentuk finansial harus memaksimalkan penggunaan dana sebaik-baiknya serta ikhlas sehingga tidak perlu mendapatkan imbalan (ND,(1-14)SMAN2,4/19). Hasil pengamatan peneliti Pengamatan,PD-SMAN2B(3/1)4-5/19 tentang segala aktivitas siswa dalam mentaati peraturan menunjukkan hasil yang baik, hal ditunjukkan oleh semua siswa dalam mentaati peraturan sekolah (tata tertib sekolah) dan cara berpakaian siswa yang rapi dalam segala aktivitasnya.

Ada sembilan nilai antikorupsi yang dapat mencerminkan integritas dalam diri siswa. Sembilan nilai tersebut diantaranya: kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Dalam mengamalkan nilai kejujuran di sekolah siswa mengamalkannya dengan membayar sesuai harga barang yang dibeli di kantin kejujuran dan ijin meninggalkan kelas dan sekolah dengan alasan yang sesuai (Pengamatan,PD-SMAN2B(3/2)4-5/19). ND,(1-14)SMAN2,4/19 menyebutkan jika dalam mengamalkan nilai kejujuran dalam kehidupan sehari-hari mereka berusaha jujur untuk mengatakan kesalahan dan tidak menutupinya, sedang AR,(1-14)SMAN2,4/19 ketika ditanya menjawab dengan apa adanya, serta tidak meminta uang yang melebih-lebihkan.

Aktivitas siswa dalam mengamalkan nilai kepedulian cukup baik, berdasarkan hasil Pengamatan,PD-SMAN2B(3/3)4-5/19 siswa membuang sampah pada tempatnya, menyirami tanaman yang ada di sekitar kelas, dan meminjami

teman uang ketika sedang membutuhkan. AR,(1-14)SMAN2,4/19 menegaskan jika dalam mengamalkan yaitu dengan membantu teman yang sedang kesusahan atau meminta tolong.

Aktivitas siswa dalam mengamalkan nilai kemandirian cukup baik, berdasarkan Pengamatan,PD-SMAN2B(3/4)4-5/19 siswa tidak tergantung pada orang lain dari setiap tugas yang diberikan oleh Bapak/Ibu Guru dan siswa sebagai panitia mempersiapkan agenda pekan olah raga, seni (Porseni) secara mandiri. Dalam mengamalkan nilai mandiri dapat dilakukan dengan tidak melibatkan orang lain dalam pekerjaan sendiri selagi masih mampu (ND,(1-14)SMAN2,4/19).

Aktivitas siswa dalam mengamalkan nilai kedisiplinan cukup baik, berdasarkan Pengamatan,PD-SMAN2B(3/5)4-5/19 siswa datang tepat waktu dan mengumpulkan tugas tepat waktu. ND,(1-14)SMAN2,4/19 dan AR,(1-14)SMAN2,4/19 sama menegaskan jika dalam mengamalkan nilai kedisiplinan dapat dilakukan dengan tidak telat untuk berangkat sekolah, dan menyelesaikan tugas tepat waktu.

Aktivitas siswa dalam mengamalkan nilai tanggungjawab sangat baik, berdasarkan pengamatan Pengamatan,PD-SMAN2B(3/6)4-5/19 siswa mengembalikan buku perpustakaan pada tempatnya dan mengembalikan alat kebersihan yang dipinjam. ND,(1-14)SMAN2,4/19 menambahkan jika dalam mengamalkan nilai tanggungjawab dapat dilakukan secara amanah ketika diberi mandat menjadi panitia kegiatan sebisa mungkin berusaha menyelesaikan acara, dan ketika di rumah orang tua meminta untuk menyelesaikan tugas rumah maka juga akan diselesaikan. Tegasnya bagi AR,(1-14)SMAN2,4/19 dalam

mengamalkan nilai tanggungjawab yaitu menyelesaikan tugas sampai dengan tuntas.

Aktivitas siswa dalam mengamalkan nilai kerja keras cukup baik, berdasarkan Pengamatan,PD-SMAN2B(3/7)4-5/19 siswa mempersiapkan lomba dengan sungguh-sungguh dan menyelesaikan ulangan dengan sungguh-sungguh. Sebagai pelajar dalam mengamalkan nilai kerja keras ND,(1-14)SMAN2,4/19 berusaha belajar terus-menerus. Dan AR,(1-14)SMAN2,4/19 memiliki pengalaman dalam mengamalkan nilai kerja keras yaitu mengerjakan tugas sampai lembur malam-malam, dan pernah mengumpulkan tugas proposal ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) sampai malam.

Aktivitas siswa dalam mengamalkan nilai kesederhanaan cukup baik, berdasarkan Pengamatan,PD-SMAN2B(3/8)4-5/19 siswa menggunakan seragam secara rapi dan tidak banyak siswa yang menggunakan barang branded. Bagi AR,(1-14)SMAN2,4/19 dalam mengamalkan nilai kesederhanaan yaitu dengan tidak mengikuti trend-trend, karena bisa bikin boros.

Aktivitas siswa dalam mengamalkan nilai keberanian sangat baik, berdasarkan Pengamatan,PD-SMAN2B(3/9)4-5/19 siswa berani menyampaikan gagasannya ketika diskusi dalam kegiatan belajar mengajar dan berani menyampaikan pendapatnya dalam forum dialog terbuka yang diadakan MPK dengan membahas masalah kebijakan sekolah tentang batas waktu berada di lingkungan sekolah. ND,(1-14)SMAN2,4/19 dalam menunjukkan nilai keberanian yaitu dengan berani menegur teman yang melakukan pelanggaran.

Aktivitas siswa dalam mengamalkan nilai keadilan cukup baik, berdasarkan Pengamatan,PD-SMAN2B(3/10)4-5/19 siswa tidak memilih-milih teman ketika pembagian kelompok. ND,(1-14)SMAN2,4/19 menjelaskan jika dalam mengamalkan nilai keadilan dalam sebuah kegiatan yaitu dengan menyesuaikan kelebihan orang lain, seperti untuk anak yang teliti saya jadikan bendahara, kalau yang cerdas dijadikan seksi-acara, dan kalau yang terlihat galak jadi keamanan.

Selain merujuk pada sembilan nilai antikorupsi diatas, integritas siswa dapat dijelaskan melalui perasaan mereka ketika melanggar peraturan atau berbuat tidak sesuai nilai-nilai antikorupsi. ND,(1-14)SMAN2,4/19 mencontohkan pernah melibatkan teman ketika sedang ulangan, ada perasaan was-was ketika melakukan hal tersebut. Contoh tindakan tersebut menunjukkan jika perbuatan yang melanggar peraturan atau tidak sesuai nilai-nilai antikorupsi ketika dilakukan akan menimbulkan perasaan yang tidak tenang dalam diri siswa. Pada bulan April tercatat ada 33 siswa di buku pelanggaran yang melanggar peraturan. Mayoritas peraturan yang dilanggar oleh siswa adalah datang terlambat ke sekolah. Dengan demikian penerapan pendidikan antikorupsi penting untuk diberikan kepada siswa karena akan membiasakan siswa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai antikorupsi dan menambah wawasan siswa tentang antikorupsi sehingga akan membentuk integritas dalam diri mereka.

c) SMA Negeri 6 Yogyakarta

Berdasarkan hasil penelitian pada pembahasan sebelumnya, diketahui bahwa beberapa sekolah telah melaksanakan pendidikan antikorupsi yang terintegrasi melalui mata pelajaran PPKn dan kegiatan ekstrakurikuler.

Dilaksanakannya pendidikan antikorupsi kepada siswa selain untuk memberikan pengetahuan tentang antikorupsi, juga untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi kepada mereka. Harapan dilaksanakannya pendidikan antikorupsi kepada siswa supaya siswa sebagai warga negara muda menjadi generasi penerus yang berintegritas.

Berdasarkan data penelitian yang telah diolah, siswa SMA Negeri 6 Yogyakarta dapat dikategorikan sebagai warga negara muda yang berintegritas. Hal ini dapat dilihat dari cara mengamalkan perilaku antikorupsi di kehidupan sehari-hari, seperti DA,(1-14)SMAN6,4/19 menyebutkan jika dalam mengamalkan perilaku antikorupsi lebih baik dengan memahami dampak yang dihasilkan dan berusaha untuk menghindarinya, serta dimulai dari hal yang kecil-kecil. Contohnya tidak berbohong ketika meminta uang dan tidak pernah membolos. FU,(1-14)SMAN6,4/19 menambahkan dalam mengamalkan perilaku antikorupsi dilakukan dengan mengelola uang sebaik mungkin, dan ketika meminta uang kepada orang tua akan menjelaskan untuk apa dan berapa jumlahnya. Berdasarkan Pengamatan,PD-SMAN6Y(3/1)4-5/19 siswa dalam menunjukkan integritas diri mereka yaitu dengan mentaati peraturan sekolah dan siswa berpakaian rapi dalam segala aktivitasnya.

Ada sembilan nilai antikorupsi yang dapat mencerminkan integritas dalam diri siswa. Sembilan nilai tersebut diantaranya: kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Dalam mengamalkan nilai kejujuran di sekolah, FU,(1-14)SMAN6,4/19 mengamalkannya dengan tidak pernah mencontek atau melihat jawaban teman

ketika ujian, lebih apa adanya mengerjakan sesuatu sesuai dengan kemampuan diri sendiri. Selanjutnya DA,(1-14)SMAN6,4/19 menambahkan dengan berbicara sesuai dengan fakta, tidak ikut-ikutan teman yang bertindak tidak jujur. Dalam sebuah event ketika mendapat tugas memegang uang, uang itu digunakan sesuai dengan kebutuhan. Melaksanakan tugas sesuai dengan *job desk*-nya. Berdasarkan Pengamatan,PD-SMAN6Y(3/2)4-5/19 aktivitas siswa dalam mengamalkan nilai kejujuran terbilang sangat baik yaitu dengan membayar sesuai harga jajan yang dibeli dari temannya, melaporkan uang yang ditemukan di lingkungan sekolah, dan meminta izin dengan alasan yang sesuai.

Aktivitas siswa dalam mengamalkan nilai kepedulian terbilang baik, berdasarkan Pengamatan,PD-SMAN6Y(3/3)4-5/19 siswa turut menjaga kondisi kelas tetap bersih dan membuang sampah pada tempatnya, serta peduli kepada teman ketika ada teman yang sakit dengan membawanya ke ruang UKS. DA,(1-14)SMAN6,4/19 dalam mengamalkan nilai kepedulian yaitu dengan menanyakan kabar teman, membantu teman yang sedang mengalami masalah, dan membantu teman-teman dalam menyukseskan event meskipun tidak menjadi panitia pelaksana. Sedang FU,(1-14)SMAN6,4/19 menyebutkan jika dalam mengamalkan nilai kepedulian sebagai berikut.

Saya tidak egois atau tidak mikirin diri sendiri, dengan bisa memahami orang lain membuka pikiran kita terhadap pendapat orang lain. Kalau untuk secara langsung, kebetulan saya ikut pramuka di setiap kegiatan untuk penegak diharuskan berbakti di masyarakat seperti ikut memperbaiki fasilitas umum, menjaga kebersihan.

Aktivitas siswa dalam mengamalkan nilai kemandirian terbilang baik, berdasarkan Pengamatan,PD-SMAN6Y(3/4)4-5/19 siswa mengerjakan tugas dengan kemampuan sendiri dan tidak bergantung pada orang lain.. DA,(1-

14)SMAN6,4/19 dalam mengamalkan nilai kemandirian yaitu dengan menyelesaikan tugas sendiri. FU,(1-14)SMAN6,4/19 menambahkan dengan lebih percaya diri dengan kemampuan sendiri dan tidak ikut teman-teman yang lain.

Aktivitas siswa dalam mengamalkan nilai kedisiplinan terbilang cukup. Berdasarkan Pengamatan,PD-SMAN6Y(3/5)4-5/19 siswa menyelesaikan tugas tepat waktu dan datang tepat waktu ke sekolah meskipun masih ada beberapa siswa yang masih datang terlambat dengan alasan kesiangan, macet, dan menunggu jemputan. FU,(1-14)SMAN6,4/19 menambahkan dengan berpakaian rapi dan lengkap.

Aktivitas siswa dalam mengamalkan nilai tanggung jawab terbilang sangat baik. Berdasarkan Pengamatan,PD-SMAN6Y(3/6)4-5/19 siswa menjalankan tugas jualan dalam kegiatan kewirausahaan sesuai jadwal yang telah disepakati, menyelesaikan tugas sesuai *job-desk* masing-masing, dan menjalankan tugas sebagai petugas upacara dengan baik. DA,(1-14)SMAN6,4/19 mengamalkan nilai tanggungjawab dengan menyelesaikan tugas sesuai dengan target, dan tidak melimpahkan tugas yang sudah saya terima. Sedang FU,(1-14)SMAN6,4/19 secara tegas menyebutkan dengan tidak menyepelekan tugas apapun yang diberikan, jadi semua tugas yang diberikan harus kita pertanggung jawabkan dengan menyelesaikannya secara sungguh-sungguh.

Aktivitas siswa dalam mengamalkan nilai kerja keras terbilang baik. siswa mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh dan mempersiapkan lomba dengan sungguh-sungguh. DA,(1-14)SMAN6,4/19 mengamalkan nilai kerja keras dengan

fokus untuk menyelesaikan proyek yang sudah ditargetkan waktunya. FU,(1-14)SMAN6,4/19 dalam mengamalkan nilai kerja keras sebagai berikut.

Lebih melawan kemalasan, karena di tingkat SMA ini banyak goda-godaan untuk malas seperti maen game dan nongkrong-nongkrong. Kalau saya dengan belajar dan membaca sudah sebagai bentuk kerja keras untuk meraih prestasi.

Aktivitas siswa dalam mengamalkan nilai kesederhanaan terbilang cukup.

Berdasarkan Pengamatan,PD-SMAN6Y(3/8)4-5/19 siswa menggunakan seragam sesuai dengan ketentuan sekolah dan rapi. DA,(1-14)SMAN6,4/19 dalam mengamalkan nilai kesederhanaan yaitu dengan berpakaian seadanya saja, misalkan seragam saya sudah keliatan kusam dan mau dibelikan baru saya tidak mau karena masih bisa dipakai. Tidak terlalu suka ikut-ikutan teman-teman yang suka nongkrong ke tempat-tempat baru. Dan saya lebih suka menggunakan kendaraan yang ada saja, tidak perlu beli baru karena uangnya bisa saya gunakan untuk hal lain seperti kuliah nanti. Sedang FU,(1-14)SMAN6,4/19 mengamalkan nilai kesederhanaan yaitu dengan tidak mengikuti perkembangan *style*, tidak gengsi, dan hidup secara apa adanya. Karena dengan tidak sederhana bisa saja kita terjerumus perilaku korupsi, misalkan karena gengsi kita curang atau ingin menjatuhkan teman.

Aktivitas siswa dalam mengamalkan nilai keberanian terbilang baik.

Berdasarkan Pengamatan,PD-SMAN6Y(3/9)4-5/19 siswa berani dalam menyampaikan gagasannya ketika sedang diskusi di kelas. DA,(1-14)SMAN6,4/19 menambahkan, dalam mengamalkan nilai keberanian dapat dilakukan dengan berani mengambil peran dalam *event-event* sekolah. Sedang FU,(1-14)SMAN6,4/19 dalam mengamalkan nilai keberanian sebagai berikut.

Ketika ulangan saya berani tidak memberikan jawaban kepada teman-teman. Dalam organisasi bentuk berani yang saya lakukan lebih pada memberikan kritikan secara langsung bukan menyalahkan, dan tidak membicarakannya di belakang.

Aktivitas siswa dalam mengamalkan nilai keadilan terbilang baik. Berdasarkan Pengamatan,PD-SMAN6Y(3/10)4-5/19 siswa tidak memilih-milih teman, di kelas maupun diluar kelas para siswa membaur dengan siswa-siswa lainnya, dan ketika ada pembagian kelompok semua siswa menerima untuk berkelompok dengan siapa saja. DA,(1-14)SMAN6,4/19 menegaskan dalam mengamalkan nilai keadilan dapat dilakukan dengan tidak membedakan gender teman-teman, dan ketika ada dalam organisasi atau event semua sama untuk bisa saling bekerjasama.

Selain merujuk pada sembilan nilai antikorupsi diatas, integritas siswa dapat dijelaskan melalui perasaan mereka ketika melanggar peraturan atau berbuat tidak sesuai nilai-nilai antikorupsi. FU,(1-14)SMAN6,4/19 mencontohkan pernah datang terlambat datang ke sekolah, dan DA,(1-14)SMAN6,4/19 sering mencontek. Dari kedua nara sumber menyebutkan ketika melanggar peraturan atau tidak sesuai nilai-nilai antikorupsi sama-sama merasa tidak enak dan bersalah. FU,(1-14)SMAN6,4/19 menyebutkan ketika melanggar peraturan ada perasaan yang mendorong untuk memperbaiki diri. Sedang DA,(1-14)SMAN6,4/19 mencoba untuk mengubah diri agar ke depannya terbiasa untuk mengerjakan sesuatu sesuai kemampuan diri sendiri. Pada bulan April tercatat ada 100 siswa di buku pelanggaran yang melanggar peraturan. Mayoritas peraturan yang dilanggar oleh siswa adalah datang terlambat ke sekolah. Dengan demikian penerapan pendidikan antikorupsi penting untuk diberikan kepada siswa karena akan membiasakan siswa

berperilaku sesuai dengan nilai-nilai antikorupsi dan akan menambah wawasan siswa tentang antikorupsi sehingga membentuk integritas dalam diri mereka.

2. Data Kuantitatif

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang persepsi dan perilaku antikorupsi siswa sebagai bentuk warga negara muda berintegritas di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Karakteristik responden dalam penelitian ini, yaitu siswa kelas XI sebanyak 112 siswa di SMAN 1 Sleman, siswa kelas XI sebanyak 133 siswa di SMAN 2 Bantul, dan siswa kelas XI sebanyak 130 siswa di SMAN 6 Yogyakarta tahun ajaran 2018/2019. Selanjutnya dibedakan menurut jurusan dan jenis kelamin. Berikut adalah tabel karakteristik responden dalam penelitian ini.

Tabel 11. Karakteristik Responden

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase
1.	Sekolah		
	SMAN 1 Sleman	112	30%
	SMAN 2 Bantul	133	35%
	SMAN 6 Yogyakarta	130	35%
2.	Jurusan		
	IPA	256	68,3%
	IPS	119	31,7%
3.	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	137	36,5%
	Perempuan	238	63,5%

Sumber: Data primer diolah, 2019

Selanjutnya dalam deskripsi data terdiri dari dua variabel, pertama variabel persepsi antikorupsi terdiri dari dimensi persepsi tentang antikorupsi, persepsi antikorupsi di lingkungan keluarga, persepsi antikorupsi di lingkungan komunitas, dan persepsi antikorupsi di lingkungan publik. Dan kedua variabel perilaku antikorupsi terdiri dari dimensi nilai-nilai antikorupsi, yaitu kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggungjawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan.

Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh menggunakan instrument berupa angket. Angket disebar kepada 375 responden yang terbagi menjadi tiga sub-sampel yaitu siswa di SMAN 1 Sleman, SMAN 2 Bantul dan SMAN 6 Yogyakarta. Hasil dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, bagian pertama menganalisis data secara individu mengenai variabel persepsi dan perilaku antikorupsi dan bagian kedua menganalisis data secara lembaga yang terdiri dari SMAN 1 Sleman, SMAN 2 Bantul, dan SMAN 6 Yogyakarta. Deskripsi data yang disajikan meliputi nilai *Mean* (M), *Median* (Me), *Modus* (Mo), Standar Deviasi (SD), *Range*, nilai minimum dan nilai maksimum. Selain itu akan disajikan grafik histogram dari masing-masing variabel. Berikut adalah deskripsi variabel persepsi dan perilaku antikorupsi siswa sebagai bentuk warga negara muda berintegritas di DIY.

a. Persepsi Antikorupsi Siswa

Variabel persepsi antikorupsi terdiri dari dimensi persepsi tentang antikorupsi, persepsi tentang antikorupsi di lingkungan keluarga, komunitas, dan publik. Instrumen yang digunakan untuk mengukur persepsi antikorupsi siswa

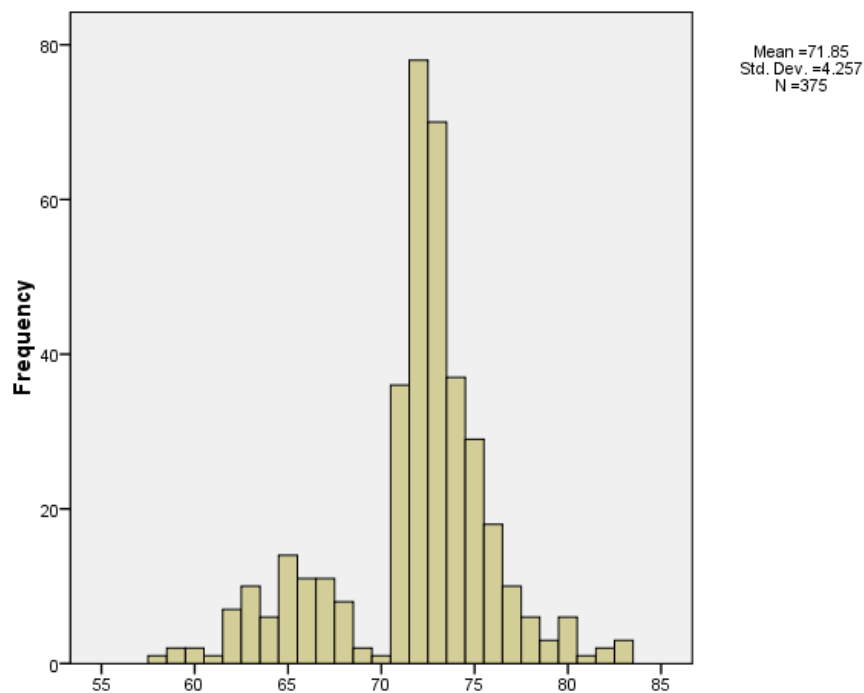
berupa angket yang terdiri dari 22 item pernyataan, yang masing-masing item pernyataan mempunyai 4 alternatif jawaban dengan rentang 1-4. Berikut ini adalah hasil analisis data variabel persepsi antikorupsi siswa di DIY.

Tabel 12. Hasil Uji Deskriptif Skor Persepsi Antikorupsi

Skor Persepsi Antikorupsi Siswa di DIY

N	Valid	375
	Missing	0
Mean		71.85
Median		72.00
Mode		72
Std. Deviation		4.257
Range		25
Minimum		58
Maximum		83

Sumber: Data primer diolah, 2019



Gambar 3. Histogram Kecenderungan Frekuensi Skor Persepsi Antikorupsi siswa di DIY

Dari data statistik dan grafik histogram diatas dapat diketahui bahwa jumlah responden sebanyak 375 siswa, memiliki nilai rata-rata persepsi antikorupsi sebesar 71,85 dengan nilai terendah 58 dan tertinggi 83 dengan range 25, dan nilai standar deviasi 4,26. Kecenderungan variabel persepsi antikorupsi ditentukan setelah skor rerata skor kelompok (\bar{X}) dan standar deviasi (SD) diketahui. Selanjutnya perhitungan persepsi dapat dilakukan dengan menggunakan rumus skor T sebagai berikut (Azwar, 2016: 156).

$$\text{Rumus Skor T} = 50 + 10\left(\frac{x - \bar{X}}{SD}\right)$$

Keterangan:

X = Skor Responden

\bar{X} = Rerata Skor Kelompok

SD = Standar Deviasi Kelompok

Setelah T Skor seluruh siswa diketahui, selanjutnya menghitung T Mean (\bar{X}_T) dengan rumus sebagai berikut.

$$\bar{X}_T = \frac{\sum T}{N}$$

Keterangan:

$\sum T$ = Jumlah Skor T

N = Jumlah Responden

Dari perhitungan diatas, peneliti membuat interval kategori dari skor dalam dua kategori. Berikut adalah kriteria kecenderungan skor variabel persepsi antikorupsi siswa di DIY.

Tabel 13. Konversi Skor Persepsi ke Kategori

No.	Interval Skor	Kategori
1.	$T > T \text{ Mean}$	Persepsi Positif
2.	$T < T \text{ Mean}$	Persepsi Negatif

Sumber Azwar (2016: 165)

Dari hasil analisis data dapat diketahui bahwa mean (M), median (Me), modus (Mo), standar deviasi (SD), range, nilai minimum, dan nilai maksimum skor T sebagai berikut.

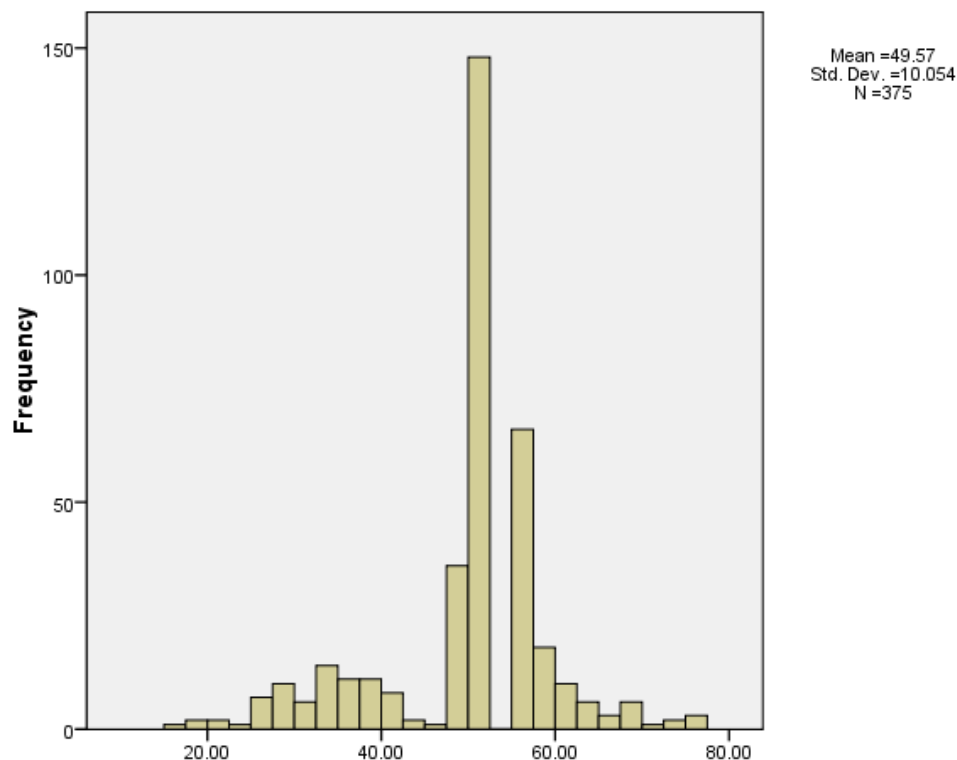
Tabel 14. Hasil Uji Skor T Persepsi Antikorupsi

Skor T Persepsi Antikorupsi Siswa DIY

N	Valid	375
	Missing	0
Mean		49.5653
Median		50.0000
Mode		50.00
Std. Deviation		1.00542E1
Range		59.00
Minimum		17.00
Maximum		76.00

Sumber: Data primer diolah, 2019

Dari hasil analisis data pada tabel diatas dapat diketahui bahwa rerata T skor siswa di DIY tentang persepsi antikorupsi sebesar 49,57 dengan nilai terendah 17 dan tertinggi 76 dengan 59. Dan untuk nilai yang sering muncul (modus) adalah 50. Untuk lebih jelasnya data tentang skor T persepsi antikorupsi siswa di DIY dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Gambar 4. Histogram Kecenderungan Frekuensi Skor T Persepsi Antikorupsi siswa di DIY

Selanjutnya untuk mengetahui skor T siswa berada pada interval positif atau negatif dilakukan analisis dengan perbandingan antara skor T siswa dengan nilai T Mean. Jika skor T siswa lebih besar dari T Mean maka siswa tersebut memiliki persepsi yang positif tentang antikorupsi. Sebaliknya, jika skor T siswa lebih rendah dari T Mean maka siswa tersebut memiliki persepsi yang negatif tentang antikorupsi.

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, dapat diuraikan bahwa dari 375 siswa di DIY ada 112 siswa dari SMAN 1 Sleman, 133 siswa dari SMAN 2 Bantul, dan 130 siswa dari SMAN 6 Yogyakarta. Berdasarkan asal sekolah siswa, ada 112 siswa di SMAN 1 Sleman yang menjadi sampel, sebanyak 75 siswa memiliki persepsi positif tentang antikorupsi, dan sebanyak 37 siswa memiliki

persepsi negatif tentang antikorupsi. Selanjutnya di SMAN 2 Bantul ada 133 siswa yang menjadi sampel, sebanyak 111 siswa memiliki persepsi positif tentang antikorupsi, dan sebanyak 22 siswa memiliki persepsi negatif tentang antikorupsi. Terakhir di SMAN 6 Yogyakarta ada 130 siswa yang menjadi sampel, sebanyak 77 siswa memiliki persepsi positif tentang antikorupsi, dan sebanyak 53 siswa memiliki persepsi negatif tentang antikorupsi.

Berdasarkan latar belakang jurusan siswa, ada 256 siswa jurusan IPA dan 119 siswa jurusan IPS. Dari 256 siswa jurusan IPA sebanyak 179 siswa memiliki persepsi positif tentang antikorupsi, dan sebanyak 77 siswa memiliki persepsi negatif tentang antikorupsi. Dan dari 119 siswa jurusan IPS, dapat diketahui bahwa 84 siswa memiliki persepsi positif tentang antikorupsi, dan 35 siswa memiliki persepsi negatif tentang antikorupsi.

Selanjutnya ditinjau berdasarkan dari jenis kelamin siswa, diketahui bahwa ada 137 siswa berjenis kelamin laki-laki dan 238 siswa berjenis kelamin perempuan. Dari 137 siswa laki-laki, sebanyak 100 siswa memiliki persepsi positif tentang antikorupsi, dan sebanyak 32 siswa memiliki persepsi negatif tentang antikorupsi. Dari 238 siswa perempuan, sebanyak 163 siswa memiliki persepsi positif tentang antikorupsi, dan sebanyak 75 siswa memiliki persepsi negatif tentang antikorupsi. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa dari 375 siswa di DIY, siswa yang memiliki persepsi positif sebanyak 263 siswa, dan yang memiliki persepsi negatif sebanyak 112 siswa (tabel hasil hitung data analisis persepsi siswa terlampir).

Selanjutnya untuk mengetahui kategori persepsi siswa di DIY secara keseluruhan dapat dilakukan dengan mengubah skor menjadi data kualitatif (data interval) dengan skala empat. Menurut Mardapi (2008: 123) acuan pengubahan skor menjadi skala empat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 15. Konversi Skor ke Kategori

No.	Skor	Kategori
1.	$X \geq \bar{X} + 1.SBx$	Sangat baik
2.	$\bar{X} + 1.SBx > X \geq \bar{X}$	Baik
3.	$\bar{X} > X \geq (\bar{X} - 1.SBx)$	Kurang baik
4.	$X < (\bar{X} - 1.SBx)$	Sangat kurang baik

Keterangan:

\bar{X} = rerata skor keseluruhan = $\frac{1}{2}$ (skor maksimal ideal+skor minimal ideal)

SBx = simpangan baku skor keseluruhan = $\frac{1}{6}$ (skor maksimal ideal-skor minimal ideal)

X = skor yang dicapai

Skor maksimal ideal = butir kriteria x skor tertinggi

Skor minimal ideal = butir kriteria x skor terendah

Kecenderungan persepsi antikorupsi siswa ditentukan setelah skor maksimal ideal dan skor minimal ideal diketahui, selanjutnya rerata skor keseluruhan (\bar{X}) dan simpangan baku skor keseluruhan (SBx) dapat dihitung sebagai berikut.

Skor maksimal ideal = butir kriteria x skor tertinggi

$$= 22 \times 4$$

$$= 88$$

Skor minimal ideal = butir kriteria x skor terendah

$$= 22 \times 1$$

$$= 22$$

$$\begin{aligned}
 (\bar{X}) &= \frac{1}{2} (\text{skor maksimal ideal} + \text{skor minimal ideal}) \\
 &= \frac{1}{2} (88+22) \\
 &= 55 \\
 SBx &= \frac{1}{6} (\text{skor maksimal ideal} - \text{skor minimal ideal}) \\
 &= \frac{1}{6} (88-22) \\
 &= 11
 \end{aligned}$$

Dari perhitungan di atas, peneliti membuat interval kategori dari skor mentah ke dalam skala empat. Berikut ini adalah kriteria kecenderungan persepsi antikorupsi siswa di DIY.

Tabel 16. Konversi Skor Persepsi ke Kategori

No.	Interval Skor	Kategori
1.	$X \geq 66$	Sangat baik
2.	$66 > X \geq 55$	Baik
3.	$55 > X \geq 44$	Kurang baik
4.	$X < 44$	Sangat kurang baik

Dari hasil analisis data dapat diketahui bahwa nilai rata-rata dari persepsi antikorupsi siswa sebesar 71,85 berada pada interval $X \geq 66$ yang berarti bahwa tingkat persepsi antikorupsi siswa di DIY tergolong **sangat baik**.

b. Perilaku Antikorupsi Siswa

Variabel perilaku antikorupsi terdiri dari dimensi nilai-nilai antikorupsi siswa yang meliputi kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggungjawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Instrumen yang digunakan untuk mengukur perilaku antikorupsi siswa berupa angket yang terdiri dari 36 item pernyataan, yang masing-masing item pernyataan mempunyai

4 alternatif jawaban dengan rentang 1-4. Pada setiap nilai antikorupsi terdiri dari 4 item pernyataan dan mempunyai 4 alternatif jawaban dengan rentang 1-4. Untuk mengetahui kategori nilai-nilai antikorupsi siswa di DIY dapat dilakukan dengan mengubah skor menjadi data kualitatif (data interval) dengan skala empat. Menurut Mardapi (2008: 123) acuan pengubahan skor menjadi skala empat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 17. Konversi Skor ke Kategori

No.	Skor	Kategori
1.	$X \geq \bar{X} + 1.SBx$	Sangat baik
2.	$\bar{X} + 1.SBx > X \geq \bar{X}$	Baik
3.	$\bar{X} > X \geq (\bar{X} - 1.SBx)$	Kurang baik
4.	$X < (\bar{X} - 1.SBx)$	Sangat kurang baik

Keterangan:

\bar{X} = rerata skor keseluruhan = $\frac{1}{2}$ (skor maksimal ideal+skor minimal ideal)

SBx = simpangan baku skor keseluruhan = $\frac{1}{6}$ (skor maksimal ideal-skor minimal ideal)

X = skor yang dicapai

Skor maksimal ideal = butir kriteria x skor tertinggi

Skor minimal ideal = butir kriteria x skor terendah

Berikut ini adalah hasil analisis data variabel perilaku antikorupsi siswa di DIY berdasarkan nilai-nilai antikorupsi.

1) Kejujuran

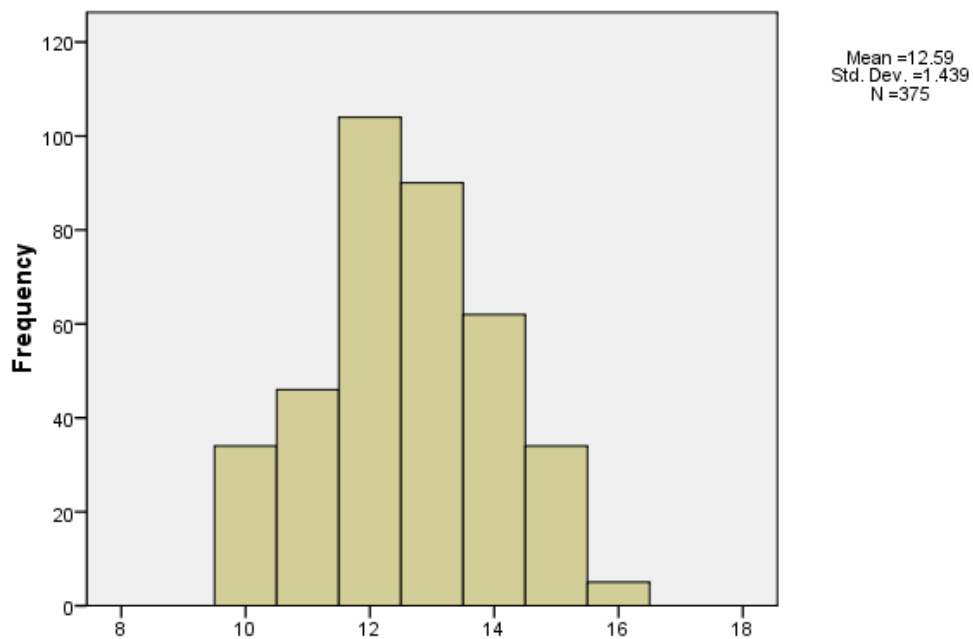
Instrumen yang digunakan untuk mengukur nilai kejujuran siswa di DIY berupa angket yang terdiri dari 4 item pernyataan yang terdiri dari pernyataan positif dan negatif, yang masing-masing item pernyataan mempunyai 4 alternatif

jawaban dengan rentang skor 1-4. Berikut ini adalah hasil analisis data nilai kejujuran siswa di DIY.

Tabel 18. Hasil Uji Nilai Kejujuran

Skor Kejujuran Siswa di DIY

N	Valid	375
	Missing	0
Mean		12.59
Median		13.00
Mode		12
Std. Deviation		1.439
Range		6
Minimum		10
Maximum		16



Gambar 5. Histogram Kecenderungan Frekuensi Nilai Kejujuran

Dari data statistik dan grafik histogram diatas dapat diketahui bahwa jumlah responden sebanyak 375 siswa, memiliki nilai rata-rata kejujuran sebesar 12,59 dengan nilai terendah 10 dan tertinggi 16 dengan *range* 6, dan nilai standar deviasi 1,44. Kecenderungan nilai kejujuran ditentukan setelah skor rerata skor keseluruhan

(\bar{X}) dan simpangan baku skor keseluruhan (SBx) diketahui. Selanjutnya untuk mengetahui kategori nilai kejujuran siswa di DIY dapat dilakukan dengan mengubah skor menjadi data kualitatif (data interval) dengan skala empat. Kecenderungan nilai kejujuran siswa ditentukan setelah skor maksimal ideal dan skor minimal ideal diketahui, selanjutnya rerata skor keseluruhan (\bar{X}) dan simpangan baku skor keseluruhan (SBx) dapat dihitung sebagai berikut.

Skor maksimal ideal = butir kriteria x skor tertinggi

$$= 4 \times 4$$

$$= 16$$

Skor minimal ideal = butir kriteria x skor terendah

$$= 4 \times 1$$

$$= 4$$

$$(\bar{X}) = \frac{1}{2} (\text{skor maksimal ideal} + \text{skor minimal ideal})$$

$$= \frac{1}{2} (16+4)$$

$$= 10$$

$$SBx = \frac{1}{6} (\text{skor maksimal ideal} - \text{skor minimal ideal})$$

$$= \frac{1}{6} (16-4)$$

$$= 2$$

Dari perhitungan di atas, peneliti membuat interval kategori dari skor mentah ke dalam skala empat. Berikut ini adalah kriteria kecenderungan skor nilai kejujuran siswa di DIY.

Tabel 19. Konversi Skor Kejujuran ke Kategori

No.	Interval Skor	Kategori
1.	$X \geq 12$	Sangat baik
2.	$12 > X \geq 10$	Baik
3.	$10 > X \geq 8$	Kurang baik
4.	$X < 8$	Sangat kurang baik

Dari hasil analisis data dapat diketahui bahwa nilai rata-rata dari nilai kejujuran siswa sebesar 12,59 atau berada pada interval $X \geq 12$ yang berarti bahwa tingkat nilai kejujuran siswa di DIY tergolong **sangat baik**.

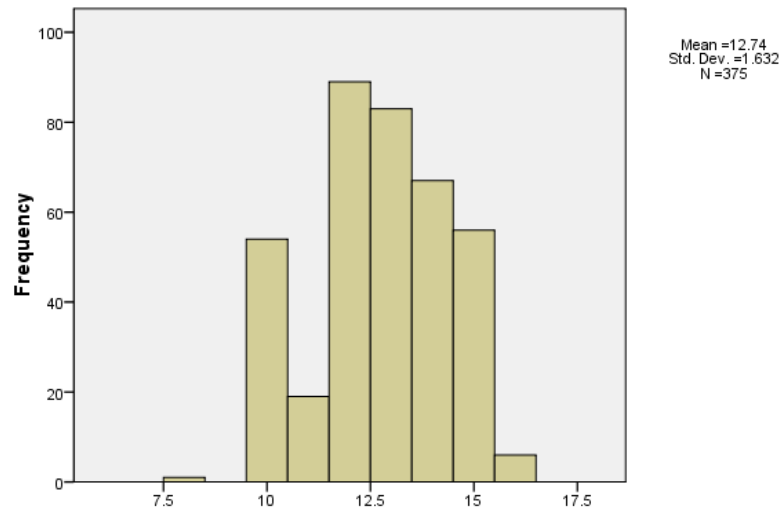
2) Kepedulian

Instrumen yang digunakan untuk mengukur nilai kepedulian siswa di DIY berupa angket yang terdiri dari 4 item pernyataan yang terdiri dari pernyataan positif dan negatif, yang masing-masing item pernyataan mempunyai 4 alternatif jawaban dengan rentang skor 1-4. Berikut ini adalah hasil analisis data nilai kepedulian siswa di DIY.

Tabel 20. Hasil Uji Nilai Kepedulian

Skor Kepedulian Siswa di DIY

N	Valid	375
	Missing	0
Mean		12.74
Median		13.00
Mode		12
Std. Deviation		1.632
Range		8
Minimum		8
Maximum		16



Gambar 6. Histogram Kecenderungan Frekuensi Nilai Kepedulian

Dari data statistik dan grafik histogram diatas dapat diketahui bahwa jumlah responden sebanyak 375 siswa, memiliki nilai rata-rata kepedulian sebesar 12,74 dengan nilai terendah 8 dan tertinggi 16 dengan *range* 8, dan nilai standar deviasi 1,6. Kecenderungan nilai kepedulian ditentukan setelah skor rerata skor keseluruhan (\bar{X}) dan simpangan baku skor keseluruhan (SBx) diketahui. Selanjutnya untuk mengetahui kategori nilai kepedulian siswa di DIY dapat dilakukan dengan mengubah skor menjadi data kualitatif (data interval) dengan skala empat. Kecenderungan nilai kepedulian siswa ditentukan setelah skor maksimal ideal dan skor minimal ideal diketahui, selanjutnya rerata skor keseluruhan (\bar{X}) dan simpangan baku skor keseluruhan (SBx) dapat dihitung sebagai berikut.

Skor maksimal ideal = butir kriteria x skor tertinggi

$$= 4 \times 4$$

$$= 16$$

Skor minimal ideal = butir kriteria x skor terendah

$$= 4 \times 1$$

$$= 4$$

$$\begin{aligned}
 (\bar{X}) &= \frac{1}{2} (\text{skor maksimal ideal} + \text{skor minimal ideal}) \\
 &= \frac{1}{2} (16+4) \\
 &= 10 \\
 SBx &= \frac{1}{6} (\text{skor maksimal ideal} - \text{skor minimal ideal}) \\
 &= \frac{1}{6} (16-4) \\
 &= 2
 \end{aligned}$$

Dari perhitungan di atas, peneliti membuat interval kategori dari skor mentah ke dalam skala empat. Berikut ini adalah kriteria kecenderungan skor nilai kepedulian siswa di DIY.

Tabel 21. Konversi Skor Kepedulian ke Kategori

No.	Interval Skor	Kategori
1.	$X \geq 12$	Sangat baik
2.	$12 > X \geq 10$	Baik
3.	$10 > X \geq 8$	Kurang baik
4.	$X < 8$	Sangat kurang baik

Dari hasil analisis data dapat diketahui bahwa nilai rata-rata dari nilai kepedulian siswa sebesar 12,74 atau berada pada interval $X \geq 12$ yang berarti bahwa tingkat nilai kepedulian siswa di DIY tergolong **sangat baik**.

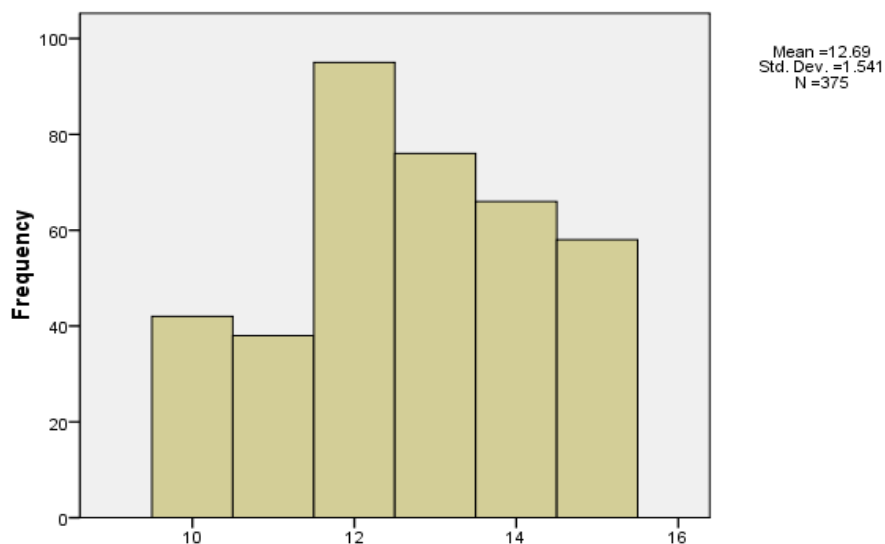
3) Kemandirian

Instrumen yang digunakan untuk mengukur nilai kemandirian siswa di DIY berupa angket yang terdiri dari 4 item pernyataan yang terdiri dari pernyataan positif dan negatif, yang masing-masing item pernyataan mempunyai 4 alternatif jawaban dengan rentang skor 1-4. Berikut ini adalah hasil analisis data nilai kemandirian siswa di DIY.

Tabel 22. Hasil Uji Nilai Kemandirian

Skor Kemandirian Siswa di DIY

N	Valid	375
	Missing	0
Mean		12.69
Median		13.00
Mode		12
Std. Deviation		1.541
Range		5
Minimum		10
Maximum		15



Gambar 7. Histogram Kecenderungan Frekuensi Nilai Kemandirian

Dari data statistik dan grafik histogram diatas dapat diketahui bahwa jumlah responden sebanyak 375 siswa, memiliki nilai rata-rata kemandirian sebesar 12,69 dengan nilai terendah 10 dan tertinggi 15 dengan *range* 5, dan nilai standar deviasi 1,54. Kecenderungan nilai kemandirian ditentukan setelah skor rerata skor keseluruhan (\bar{X}) dan simpangan baku skor keseluruhan (SBx) diketahui. Selanjutnya untuk mengetahui kategori nilai kemandirian siswa di DIY dapat

dilakukan dengan mengubah skor menjadi data kualitatif (data interval) dengan skala empat. Kecenderungan nilai kemandirian siswa ditentukan setelah skor maksimal ideal dan skor minimal ideal diketahui, selanjutnya rerata skor keseluruhan (\bar{X}) dan simpangan baku skor keseluruhan (SBx) dapat dihitung sebagai berikut.

Skor maksimal ideal = butir kriteria x skor tertinggi

$$= 4 \times 4$$

$$= 16$$

Skor minimal ideal = butir kriteria x skor terendah

$$= 4 \times 1$$

$$= 4$$

$$(\bar{X}) = \frac{1}{2} (\text{skor maksimal ideal} + \text{skor minimal ideal})$$

$$= \frac{1}{2} (16+4)$$

$$= 10$$

$$SBx = \frac{1}{6} (\text{skor maksimal ideal} - \text{skor minimal ideal})$$

$$= \frac{1}{6} (16-4)$$

$$= 2$$

Dari perhitungan di atas, peneliti membuat interval kategori dari skor mentah ke dalam skala empat. Berikut ini adalah kriteria kecenderungan skor nilai kemandirian siswa di DIY.

Tabel 23. Konversi Skor Kemandirian ke Kategori

No.	Interval Skor	Kategori
1.	$X \geq 12$	Sangat baik
2.	$12 > X \geq 10$	Baik
3.	$10 > X \geq 8$	Kurang baik
4.	$X < 8$	Sangat kurang baik

Dari hasil analisis data dapat diketahui bahwa nilai rata-rata dari nilai kemandirian siswa sebesar 12,69 atau berada pada interval $X \geq 12$ yang berarti bahwa tingkat nilai kemandirian siswa di DIY tergolong **sangat baik**.

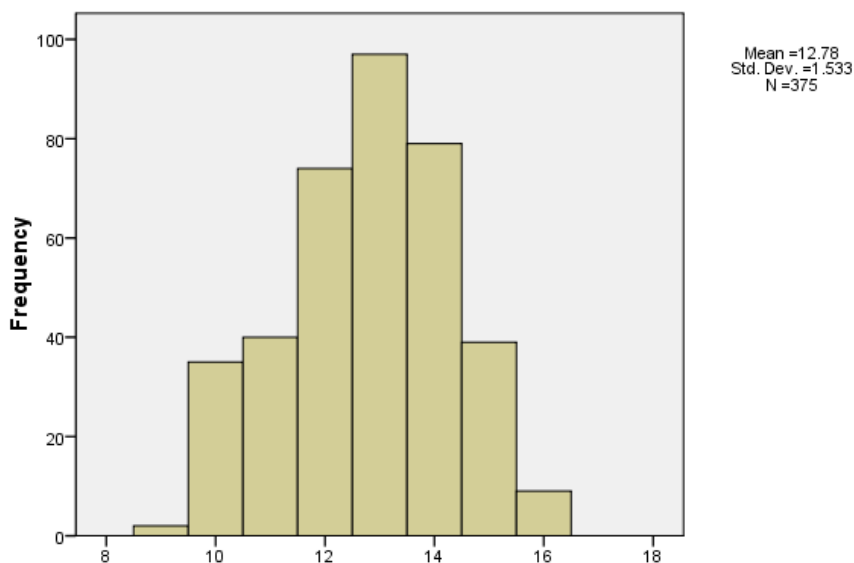
4) Kedisiplinan

Instrumen yang digunakan untuk mengukur nilai kedisiplinan siswa di DIY berupa angket yang terdiri dari 4 item pernyataan yang terdiri dari pernyataan positif dan negatif, yang masing-masing item pernyataan mempunyai 4 alternatif jawaban dengan rentang skor 1-4. Berikut ini adalah hasil analisis data nilai kedisiplinan siswa di DIY.

Tabel 24. Hasil Uji Nilai Kedisiplinan

Skor Kedisiplinan Siswa di DIY

N	Valid	375
	Missing	0
Mean		12.78
Median		13.00
Mode		13
Std. Deviation		1.533
Range		7
Minimum		9
Maximum		16



Gambar 8. Kecenderungan Frekuensi Nilai Kedisiplinan

Dari data statistik dan grafik histogram diatas dapat diketahui bahwa jumlah responden sebanyak 375 siswa, memiliki nilai rata-rata kedisiplinan sebesar 12,78 dengan nilai terendah 9 dan tertinggi 16 dengan *range* 7, dan nilai standar deviasi 1,5. Kecenderungan nilai kedisiplinan ditentukan setelah skor rerata skor keseluruhan (\bar{X}) dan simpangan baku skor keseluruhan (SBx) diketahui. Selanjutnya untuk mengetahui kategori nilai kedisiplinan siswa di DIY dapat dilakukan dengan mengubah skor menjadi data kualitatif (data interval) dengan skala empat. Kecenderungan nilai kedisiplinan siswa ditentukan setelah skor maksimal ideal dan skor minimal ideal diketahui, selanjutnya rerata skor keseluruhan (\bar{X}) dan simpangan baku skor keseluruhan (SBx) dapat dihitung sebagai berikut.

Skor maksimal ideal = butir kriteria x skor tertinggi

$$= 4 \times 4$$

$$= 16$$

Skor minimal ideal = butir kriteria x skor terendah

$$= 4 \times 1$$

$$= 4$$

$$(\bar{X}) = \frac{1}{2} (\text{skor maksimal ideal} + \text{skor minimal ideal})$$

$$= \frac{1}{2} (16+4)$$

$$= 10$$

$$SBx = \frac{1}{6} (\text{skor maksimal ideal} - \text{skor minimal ideal})$$

$$= \frac{1}{6} (16-4)$$

$$= 2$$

Dari perhitungan di atas, peneliti membuat interval kategori dari skor mentah ke dalam skala empat. Berikut ini adalah kriteria kecenderungan skor nilai kedisiplinan siswa di DIY.

Tabel 25. Konversi Skor kedisiplinan ke Kategori

No.	Interval Skor	Kategori
1.	$X \geq 12$	Sangat baik
2.	$12 > X \geq 10$	Baik
3.	$10 > X \geq 8$	Kurang baik
4.	$X < 8$	Sangat kurang baik

Dari hasil analisis data dapat diketahui bahwa nilai rata-rata dari nilai kedisiplinan siswa sebesar 12,78 atau berada pada interval $X \geq 12$ yang berarti bahwa tingkat nilai kedisiplinan siswa di DIY tergolong **sangat baik**.

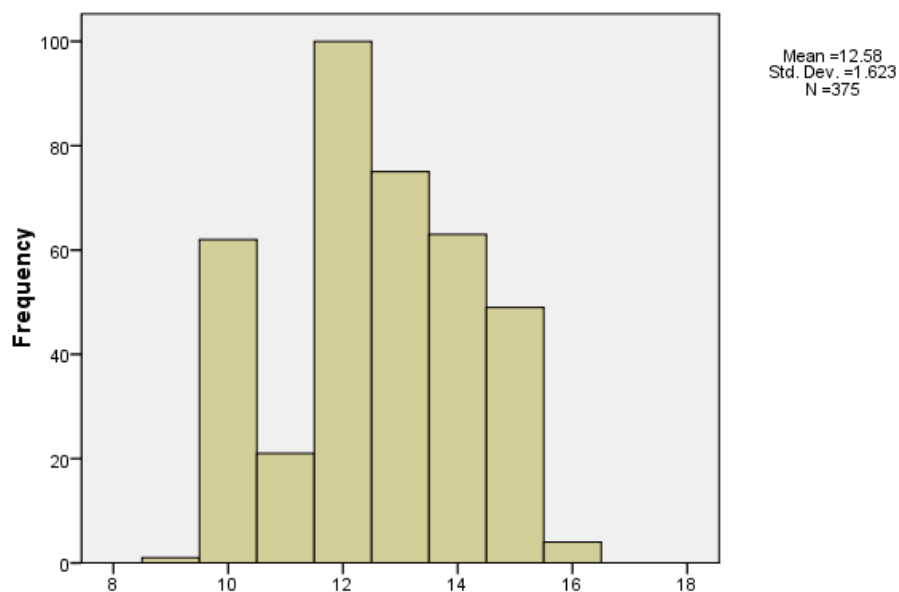
5) Tanggungjawab

Instrumen yang digunakan untuk mengukur nilai tanggungjawab siswa di DIY berupa angket yang terdiri dari 4 item pernyataan yang terdiri dari pernyataan positif dan negatif, yang masing-masing item pernyataan mempunyai 4 alternatif

jawaban dengan rentang skor 1-4. Berikut ini adalah hasil analisis data nilai tanggungjawab siswa di DIY.

Tabel 26. Hasil Uji Nilai Tanggungjawab
Skor Tanggungjawab Siswa di DIY

N	Valid	375
	Missing	0
Mean		12.58
Median		13.00
Mode		12
Std. Deviation		1.623
Range		7
Minimum		9
Maximum		16



Gambar 9. Kecenderungan Frekuensi Nilai Tanggungjawab

Dari data statistik dan grafik histogram diatas dapat diketahui bahwa jumlah responden sebanyak 375 siswa, memiliki nilai rata-rata tanggungjawab sebesar 12,58 dengan nilai terendah 9 dan tertinggi 16 dengan *range* 7, dan nilai standar deviasi 1,62. Kecenderungan nilai tanggungjawab ditentukan setelah skor rerata

skor keseluruhan (\bar{X}) dan simpangan baku skor keseluruhan (SBx) diketahui. Selanjutnya untuk mengetahui kategori nilai tanggungjawab siswa di DIY dapat dilakukan dengan mengubah skor menjadi data kualitatif (data interval) dengan skala empat. Kecenderungan nilai tanggungjawab siswa ditentukan setelah skor maksimal ideal dan skor minimal ideal diketahui, selanjutnya rerata skor keseluruhan (\bar{X}) dan simpangan baku skor keseluruhan (SBx) dapat dihitung sebagai berikut.

$$\begin{aligned}\text{Skor maksimal ideal} &= \text{butir kriteria} \times \text{skor tertinggi} \\ &= 4 \times 4 \\ &= 16\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Skor minimal ideal} &= \text{butir kriteria} \times \text{skor terendah} \\ &= 4 \times 1 \\ &= 4\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(\bar{X}) &= \frac{1}{2} (\text{skor maksimal ideal} + \text{skor minimal ideal}) \\ &= \frac{1}{2} (16+4) \\ &= 10\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}SBx &= \frac{1}{6} (\text{skor maksimal ideal} - \text{skor minimal ideal}) \\ &= \frac{1}{6} (16-4) \\ &= 2\end{aligned}$$

Dari perhitungan di atas, peneliti membuat interval kategori dari skor mentah ke dalam skala empat. Berikut ini adalah kriteria kecenderungan skor nilai tanggungjawab siswa di DIY.

Tabel 27. Konversi Skor Tanggungjawab ke Kategori

No.	Interval Skor	Kategori
1.	$X \geq 12$	Sangat baik
2.	$12 > X \geq 10$	Baik
3.	$10 > X \geq 8$	Kurang baik
4.	$X < 8$	Sangat kurang baik

Dari hasil analisis data dapat diketahui bahwa nilai rata-rata dari nilai tanggungjawab siswa sebesar 12,58 atau berada pada interval $X \geq 12$ yang berarti bahwa tingkat nilai tanggungjawab siswa di DIY tergolong **sangat baik**.

6) Kerja Keras

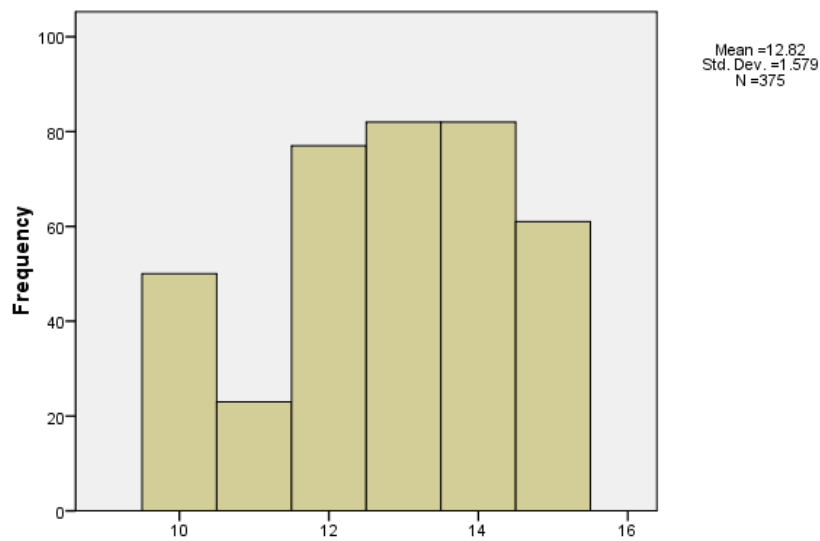
Instrumen yang digunakan untuk mengukur nilai kerja keras siswa di DIY berupa angket yang terdiri dari 4 item pernyataan yang terdiri dari pernyataan positif dan negatif, yang masing-masing item pernyataan mempunyai 4 alternatif jawaban dengan rentang skor 1-4. Berikut ini adalah hasil analisis data nilai kerja keras siswa di DIY.

Tabel 28. Hasil Uji Nilai Kerja Keras

Skor Kerja Keras Siswa di DIY

N	Valid	375
	Missing	0
Mean		12.82
Median		13.00
Mode		13 ^a
Std. Deviation		1.579
Range		5
Minimum		10
Maximum		15

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown



Gambar 10. Kecenderungan Frekuensi Nilai Kerja Keras

Dari data statistik dan grafik histogram diatas dapat diketahui bahwa jumlah responden sebanyak 375 siswa, memiliki nilai rata-rata kerja keras sebesar 12,58 dengan nilai terendah 9 dan tertinggi 16 dengan *range* 7, dan nilai standar deviasi 1,62. Kecenderungan nilai kerja keras ditentukan setelah skor rerata skor keseluruhan (\bar{X}) dan simpangan baku skor keseluruhan (SBx) diketahui. Selanjutnya untuk mengetahui kategori nilai kerja keras siswa di DIY dapat dilakukan dengan mengubah skor menjadi data kualitatif (data interval) dengan skala empat. Kecenderungan nilai kerja keras siswa ditentukan setelah skor maksimal ideal dan skor minimal ideal diketahui, selanjutnya rerata skor keseluruhan (\bar{X}) dan simpangan baku skor keseluruhan (SBx) dapat dihitung sebagai berikut.

Skor maksimal ideal = butir kriteria x skor tertinggi

$$= 4 \times 4$$

$$= 16$$

Skor minimal ideal = butir kriteria x skor terendah

$$= 4 \times 1$$

$$= 4$$

$$(\bar{X}) = \frac{1}{2} (\text{skor maksimal ideal} + \text{skor minimal ideal})$$

$$= \frac{1}{2} (16+4)$$

$$= 10$$

$$SBx = \frac{1}{6} (\text{skor maksimal ideal} - \text{skor minimal ideal})$$

$$= \frac{1}{6} (16-4)$$

$$= 2$$

Dari perhitungan di atas, peneliti membuat interval kategori dari skor mentah ke dalam skala empat. Berikut ini adalah kriteria kecenderungan skor nilai kerja keras siswa di DIY.

Tabel 29. Konversi Skor Kerja Keras ke Kategori

No.	Interval Skor	Kategori
1.	$X \geq 12$	Sangat baik
2.	$12 > X \geq 10$	Baik
3.	$10 > X \geq 8$	Kurang baik
4.	$X < 8$	Sangat kurang baik

Dari hasil analisis data dapat diketahui bahwa nilai rata-rata dari nilai kerja keras siswa sebesar 12,82 atau berada pada interval $X \geq 12$ yang berarti bahwa tingkat nilai kerja keras siswa di DIY tergolong **sangat baik**.

7) Kesederhanaan

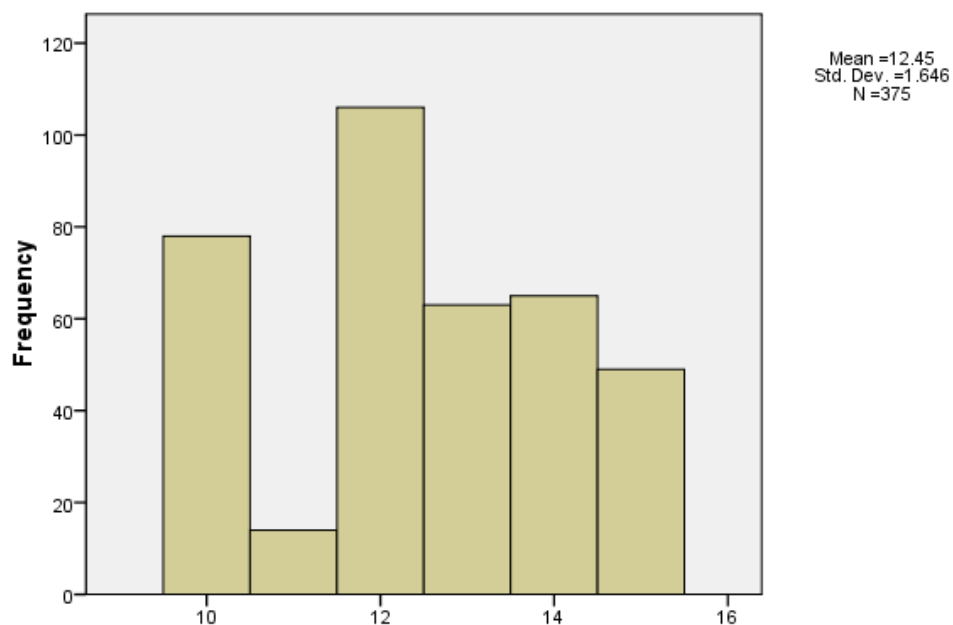
Instrumen yang digunakan untuk mengukur nilai kesederhanaan siswa di DIY berupa angket yang terdiri dari 4 item pernyataan yang terdiri dari pernyataan positif dan negatif, yang masing-masing item pernyataan mempunyai 4 alternatif

jawaban dengan rentang skor 1-4. Berikut ini adalah hasil analisis data nilai kesederhanaan siswa di DIY.

Tabel 30. Hasil Uji Nilai Kesederhanaan

Skor Kesederhanaan Siswa di DIY

N	Valid	375
	Missing	0
Mean		12.45
Median		12.00
Mode		12
Std. Deviation		1.646
Range		5
Minimum		10
Maximum		15



Gambar 11. Kecenderungan Frekuensi Nilai Kesederhanaan

Dari data statistik dan grafik histogram diatas dapat diketahui bahwa jumlah responden sebanyak 375 siswa, memiliki nilai rata-rata kesederhanaan sebesar 12,45 dengan nilai terendah 10 dan tertinggi 15 dengan *range* 5, dan nilai standar deviasi 1,65. Kecenderungan nilai kesederhanaan ditentukan setelah skor rerata

skor keseluruhan (\bar{X}) dan simpangan baku skor keseluruhan (SBx) diketahui. Selanjutnya untuk mengetahui kategori nilai kesederhanaan siswa di DIY dapat dilakukan dengan mengubah skor menjadi data kualitatif (data interval) dengan skala empat. Kecenderungan nilai kesederhanaan siswa ditentukan setelah skor maksimal ideal dan skor minimal ideal diketahui, selanjutnya rerata skor keseluruhan (\bar{X}) dan simpangan baku skor keseluruhan (SBx) dapat dihitung sebagai berikut.

Skor maksimal ideal = butir kriteria x skor tertinggi

$$= 4 \times 4$$

$$= 16$$

Skor minimal ideal = butir kriteria x skor terendah

$$= 4 \times 1$$

$$= 4$$

$$(\bar{X}) = \frac{1}{2} (\text{skor maksimal ideal} + \text{skor minimal ideal})$$

$$= \frac{1}{2} (16+4)$$

$$= 10$$

$$SBx = \frac{1}{6} (\text{skor maksimal ideal} - \text{skor minimal ideal})$$

$$= \frac{1}{6} (16-4)$$

$$= 2$$

Dari perhitungan di atas, peneliti membuat interval kategori dari skor mentah ke dalam skala empat. Berikut ini adalah kriteria kecenderungan skor nilai kesederhanaan siswa di DIY.

Tabel 31. Konversi Skor Kesederhanaan ke Kategori

No.	Interval Skor	Kategori
1.	$X \geq 12$	Sangat baik
2.	$12 > X \geq 10$	Baik
3.	$10 > X \geq 8$	Kurang baik
4.	$X < 8$	Sangat kurang baik

Dari hasil analisis data dapat diketahui bahwa nilai rata-rata dari nilai kesederhanaan siswa sebesar 12,45 atau berada pada interval $X \geq 12$ yang berarti bahwa tingkat nilai kesederhanaan siswa di DIY tergolong **sangat baik**.

8) Keberanian

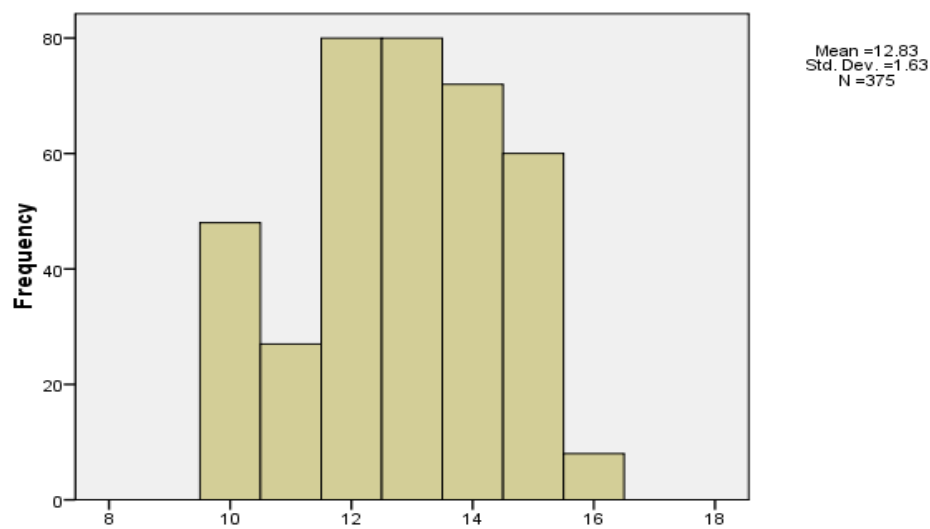
Instrumen yang digunakan untuk mengukur nilai keberanian siswa di DIY berupa angket yang terdiri dari 4 item pernyataan yang terdiri dari pernyataan positif dan negatif, yang masing-masing item pernyataan mempunyai 4 alternatif jawaban dengan rentang skor 1-4. Berikut ini adalah hasil analisis data nilai keberanian siswa di DIY.

Tabel 32. Hasil Uji Nilai Keberanian

Skor Keberanian Siswa di DIY

N	Valid	375
	Missing	0
Mean		12.83
Median		13.00
Mode		12 ^a
Std. Deviation		1.630
Range		6
Minimum		10
Maximum		16

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown



Gambar 12. Kecenderungan Frekuensi Nilai Keberanian

Dari data statistik dan grafik histogram diatas dapat diketahui bahwa jumlah responden sebanyak 375 siswa, memiliki nilai rata-rata keberanian sebesar 12,83 dengan nilai terendah 10 dan tertinggi 16 dengan *range* 6, dan nilai standar deviasi 1,63. Kecenderungan nilai keberanian ditentukan setelah skor rerata skor keseluruhan (\bar{X}) dan simpangan baku skor keseluruhan (SBx) diketahui. Selanjutnya untuk mengetahui kategori nilai keberanian siswa di DIY dapat dilakukan dengan mengubah skor menjadi data kualitatif (data interval) dengan skala empat. Kecenderungan nilai keberanian siswa ditentukan setelah skor maksimal ideal dan skor minimal ideal diketahui, selanjutnya rerata skor keseluruhan (\bar{X}) dan simpangan baku skor keseluruhan (SBx) dapat dihitung sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
 \text{Skor maksimal ideal} &= \text{butir kriteria} \times \text{skor tertinggi} \\
 &= 4 \times 4 \\
 &= 16
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Skor minimal ideal} &= \text{butir kriteria} \times \text{skor terendah} \\
 &= 4 \times 1
 \end{aligned}$$

$$= 4$$

$$\begin{aligned}(\bar{X}) &= \frac{1}{2} (\text{skor maksimal ideal} + \text{skor minimal ideal}) \\&= \frac{1}{2} (16+4) \\&= 10\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}SBx &= \frac{1}{6} (\text{skor maksimal ideal} - \text{skor minimal ideal}) \\&= \frac{1}{6} (16-4) \\&= 2\end{aligned}$$

Dari perhitungan di atas, peneliti membuat interval kategori dari skor mentah ke dalam skala empat. Berikut ini adalah kriteria kecenderungan skor nilai keberanian siswa di DIY.

Tabel 33. Konversi Skor Kesederhanaan ke Kategori

No.	Interval Skor	Kategori
1.	$X \geq 12$	Sangat baik
2.	$12 > X \geq 10$	Baik
3.	$10 > X \geq 8$	Kurang baik
4.	$X < 8$	Sangat kurang baik

Dari hasil analisis data dapat diketahui bahwa nilai rata-rata dari nilai keberanian siswa sebesar 12,83 atau berada pada interval $X \geq 12$ yang berarti bahwa tingkat nilai keberanian siswa di DIY tergolong **sangat baik**.

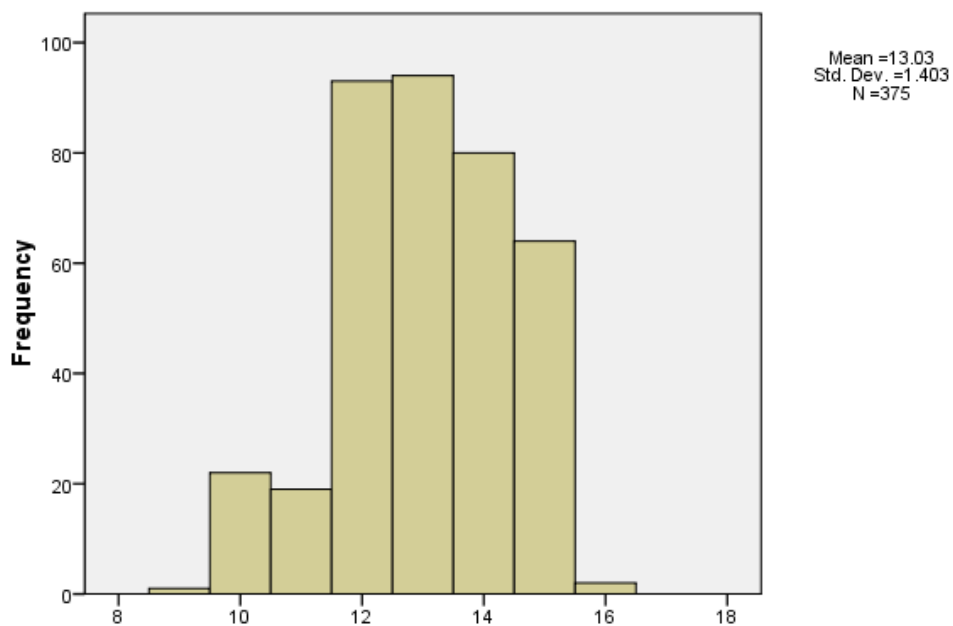
9) Keadilan

Instrumen yang digunakan untuk mengukur nilai keadilan siswa di DIY berupa angket yang terdiri dari 4 item pernyataan yang terdiri dari pernyataan positif dan negatif, yang masing-masing item pernyataan mempunyai 4 alternatif jawaban dengan rentang skor 1-4. Berikut ini adalah hasil analisis data nilai keadilan siswa di DIY.

Tabel 34. Hasil Uji Nilai Keadilan

Skor Keadilan Siswa di DIY

N	Valid	375
	Missing	0
Mean		13.03
Median		13.00
Mode		13
Std. Deviation		1.403
Range		7
Minimum		9
Maximum		16



Gambar 13. Kecenderungan Frekuensi Nilai Keadilan

Dari data statistik dan grafik histogram diatas dapat diketahui bahwa jumlah responden sebanyak 375 siswa, memiliki nilai rata-rata keadilan sebesar 13,03 dengan nilai terendah 9 dan tertinggi 16 dengan *range* 7, dan nilai standar deviasi 1,4. Kecenderungan nilai keadilan ditentukan setelah skor rerata skor keseluruhan (\bar{X}) dan simpangan baku skor keseluruhan (SBx) diketahui. Selanjutnya untuk

mengetahui kategori nilai keadilan siswa di DIY dapat dilakukan dengan mengubah skor menjadi data kualitatif (data interval) dengan skala empat. Kecenderungan nilai keadilan siswa ditentukan setelah skor maksimal ideal dan skor minimal ideal diketahui, selanjutnya rerata skor keseluruhan (\bar{X}) dan simpangan baku skor keseluruhan (SBx) dapat dihitung sebagai berikut.

$$\begin{aligned}\text{Skor maksimal ideal} &= \text{butir kriteria} \times \text{skor tertinggi} \\ &= 4 \times 4 \\ &= 16\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Skor minimal ideal} &= \text{butir kriteria} \times \text{skor terendah} \\ &= 4 \times 1 \\ &= 4\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(\bar{X}) &= \frac{1}{2} (\text{skor maksimal ideal} + \text{skor minimal ideal}) \\ &= \frac{1}{2} (16+4) \\ &= 10\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{SBx} &= \frac{1}{6} (\text{skor maksimal ideal} - \text{skor minimal ideal}) \\ &= \frac{1}{6} (16-4) \\ &= 2\end{aligned}$$

Dari perhitungan di atas, peneliti membuat interval kategori dari skor mentah ke dalam skala empat. Berikut ini adalah kriteria kecenderungan skor nilai keadilan siswa di DIY.

Tabel 35. Konversi Skor Keadilan ke Kategori

No.	Interval Skor	Kategori
-----	---------------	----------

1.	$X \geq 12$	Sangat baik
2.	$12 > X \geq 10$	Baik
3.	$10 > X \geq 8$	Kurang baik
4.	$X < 8$	Sangat kurang baik

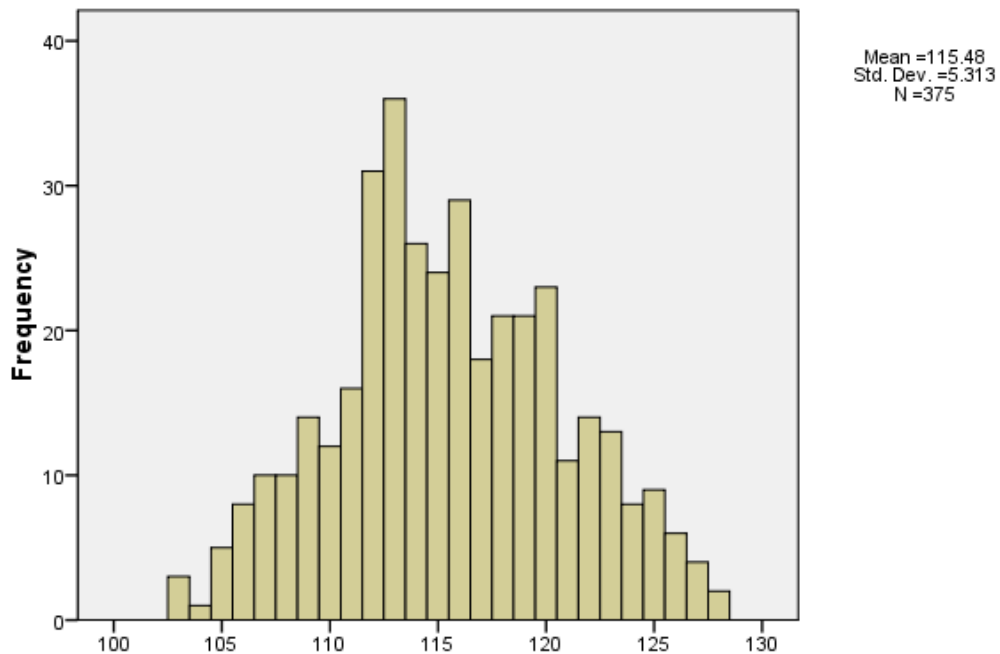
Dari hasil analisis data dapat diketahui bahwa nilai rata-rata dari nilai keadilan siswa sebesar 13,03 atau berada pada interval $X \geq 12$ yang berarti bahwa tingkat nilai keadilan siswa di DIY tergolong **sangat baik**.

Hasil analisis data nilai-nilai antikorupsi siswa yang meliputi kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggungjawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan diatas tergolong sangat baik karena termasuk dalam interval $X \geq \bar{X} + SBx$. Selanjutnya yaitu menganalisis variabel perilaku antikorupsi siswa di DIY. Instrumen yang digunakan untuk mengukur perilaku antikorupsi siswa berupa angket yang terdiri dari 36 item pernyataan terdiri dari pernyataan positif dan negatif, yang masing-masing item pernyataan mempunyai 4 alternatif jawaban dengan rentang 1-4. Berikut ini adalah hasil analisis data variabel perilaku antikorupsi siswa di DIY.

Tabel 36. Hasil Uji Perilaku Antikorupsi

Skor Perilaku Antikorupsi Siswa di DIY

N	Valid	375
	Missing	0
Mean		115.48
Median		115.00
Mode		113
Std. Deviation		5.313
Range		25
Minimum		103
Maximum		128



Gambar 14. Kecenderungan Frekuensi Perilaku Antikorupsi Siswa

Dari data statistik dan grafik histogram diatas dapat diketahui bahwa jumlah responden sebanyak 375 siswa, memiliki nilai rata-rata perilaku antikorupsi sebesar 115,48 dengan nilai terendah 103 dan tertinggi 128 dengan range 25, dan nilai standar deviasi 5,3. Kecenderungan variabel perilaku antikorupsi ditentukan setelah skor rerata skor keseluruhan (\bar{X}) dan simpangan baku skor keseluruhan (SBx) diketahui. Selanjutnya untuk mengetahui kategori perilaku antikorupsi siswa di

DIY dapat dilakukan dengan mengubah skor menjadi data kualitatif (data interval) dengan skala empat. Kecenderungan variabel perilaku antikorupsi ditentukan setelah skor maksimal ideal dan skor minimal ideal diketahui, selanjutnya rerata skor keseluruhan (\bar{X}) dan simpangan baku skor keseluruhan (SBx) dapat dihitung sebagai berikut.

$$\begin{aligned}\text{Skor maksimal ideal} &= \text{butir kriteria} \times \text{skor tertinggi} \\ &= 36 \times 4 \\ &= 144\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Skor minimal ideal} &= \text{butir kriteria} \times \text{skor terendah} \\ &= 36 \times 1 \\ &= 36\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(\bar{X}) &= \frac{1}{2} (\text{skor maksimal ideal} + \text{skor minimal ideal}) \\ &= \frac{1}{2} (144+36) \\ &= 90\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{SBx} &= \frac{1}{6} (\text{skor maksimal ideal} - \text{skor minimal ideal}) \\ &= \frac{1}{6} (144-36) \\ &= 18\end{aligned}$$

Dari perhitungan di atas, peneliti membuat interval kategori dari skor mentah ke dalam skala empat. Berikut ini adalah kriteria kecenderungan skor perilaku antikorupsi siswa di DIY.

Tabel 37. Konversi Skor Perilaku Antikorupsi ke Kategori

No.	Interval Skor	Kategori
1.	$X \geq 108$	Sangat baik
2.	$108 > X \geq 90$	Baik
3.	$90 > X \geq 72$	Kurang baik
4.	$X < 72$	Sangat kurang baik

Dari hasil analisis data dapat diketahui bahwa nilai rata-rata dari perilaku antikorupsi siswa sebesar 115,48 atau berada pada interval $X \geq 108$ yang berarti bahwa tingkat perilaku antikorupsi siswa di DIY tergolong **sangat baik**. Selain itu, dari hasil analisis data ini dapat diketahui bahwa berdasarkan asal sekolah, jurusan, dan jenis kelamin siswa memiliki kriteria perilaku antikorupsi sebagai berikut. Berdasarkan asal sekolah siswa, sebanyak 112 siswa di SMAN 1 Sleman diketahui bahwa nilai rata-rata dari perilaku antikorupsi siswa sebesar 116,98 atau berada pada interval $X \geq 108$ yang berarti bahwa tingkat perilaku antikorupsi siswa di SMAN 1 Sleman tergolong **sangat baik**. Selanjutnya sebanyak 133 siswa di SMAN 2 Bantul diketahui bahwa nilai rata-rata dari perilaku antikorupsi siswa sebesar 115,45 atau berada pada interval $X \geq 108$ yang berarti bahwa tingkat perilaku antikorupsi siswa di SMAN 2 Bantul tergolong **sangat baik**. Dan sebanyak 130 siswa di SMAN 6 Yogyakarta diketahui bahwa nilai rata-rata dari perilaku antikorupsi siswa sebesar 114,21 atau berada pada interval $X \geq 108$ yang berarti bahwa tingkat perilaku antikorupsi siswa di SMAN 6 Yogyakarta tergolong **sangat baik**.

Berdasarkan jurusannya, sebanyak 256 siswa jurusan IPA diketahui bahwa nilai rata-rata dari perilaku antikorupsi siswa sebesar 115,34 atau berada pada interval $X \geq 108$ yang berarti bahwa tingkat perilaku antikorupsi siswa berjenis kelamin laki-laki tergolong **sangat baik**. Sedangkan sebanyak 119 siswa jurusan IPS diketahui bahwa nilai rata-rata dari perilaku antikorupsi siswa sebesar 115,85 atau berada pada interval $X \geq 108$ yang berarti bahwa tingkat perilaku antikorupsi siswa berjenis kelamin laki-laki tergolong **sangat baik**.

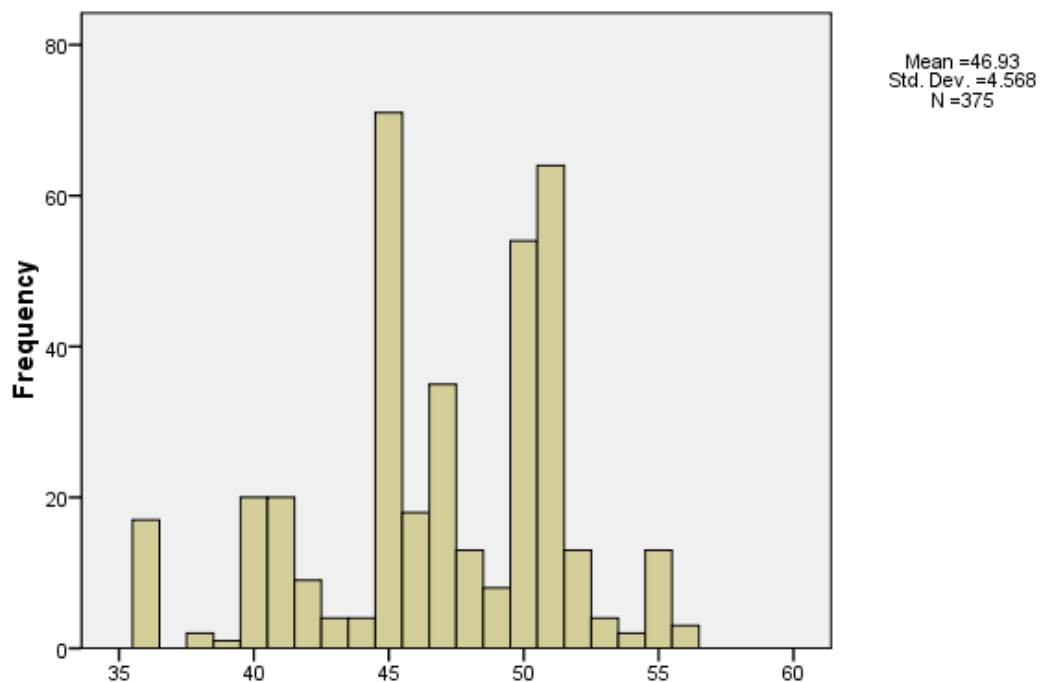
Berdasarkan jenis kelaminnya, sebanyak 137 siswa berjenis kelamin laki-laki diketahui bahwa nilai rata-rata dari perilaku antikorupsi siswa sebesar 115,48 atau berada pada interval $X \geq 108$ yang berarti bahwa tingkat perilaku antikorupsi siswa berjenis kelamin laki-laki tergolong **sangat baik**. Sedangkan sebanyak 238 siswa berjenis kelamin perempuan diketahui bahwa nilai rata-rata dari perilaku antikorupsi siswa sebesar 115,48 atau berada pada interval $X \geq 108$ yang berarti bahwa tingkat perilaku antikorupsi siswa berjenis kelamin perempuan tergolong **sangat baik**.

c. Integritas Siswa

Variabel integritas yaitu terdiri dari item-item pernyataan yang bertujuan untuk menjelaskan ciri-ciri pribadi yang berintegritas dalam diri siswa. Instrumen yang digunakan untuk mengukur integritas siswa berupa angket yang terdiri dari 15 item pernyataan, yang masing-masing item pernyataan mempunyai 4 alternatif jawaban dengan rentang 1-4. Berikut ini adalah hasil analisis data variabel integritas siswa di DIY

Tabel 38. Hasil Uji Integritas siswa

Integritas Siswa di DIY		
N	Valid	375
	Missing	0
Mean		46.93
Median		47.00
Mode		45
Std. Deviation		4.568
Range		20
Minimum		36
Maximum		56



Gambar 15. Kecenderungan Frekuensi Integritas Siswa

Dari data statistik dan grafik histogram diatas dapat diketahui bahwa jumlah responden sebanyak 375 siswa, memiliki nilai rata-rata integritas siswa sebesar 46,93 dengan nilai terendah 36 dan tertinggi 56 dengan range 20, dan nilai standar deviasi 4,57. Kecenderungan variabel integritas siswa ditentukan setelah skor rerata skor keseluruhan (\bar{X}) dan simpangan baku skor keseluruhan (SBx) diketahui. Selanjutnya untuk mengetahui kategori integritas siswa di DIY dapat dilakukan dengan mengubah skor menjadi data kualitatif (data interval) dengan skala empat. Menurut Mardapi (2008: 123) acuan pengubahan skor menjadi skala empat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 39. Konversi Skor ke Kategori

No.	Skor	Kategori
1.	$X \geq \bar{X} + 1.SBx$	Sangat baik
2.	$\bar{X} + 1.SBx > X \geq \bar{X}$	Baik
3.	$\bar{X} > X \geq (\bar{X} - 1.SBx)$	Kurang baik
4.	$X < (\bar{X} - 1.SBx)$	Sangat kurang baik

Keterangan:

\bar{X} = rerata skor keseluruhan = $\frac{1}{2}$ (skor maksimal ideal+skor minimal ideal)

SBx = simpangan baku skor keseluruhan = $\frac{1}{6}$ (skor maksimal ideal-skor minimal ideal)

X = skor yang dicapai

Skor maksimal ideal = butir kriteria x skor tertinggi

Skor minimal ideal = butir kriteria x skor terendah

Kecenderungan variabel integritas siswa ditentukan setelah skor maksimal ideal dan skor minimal ideal diketahui, selanjutnya rerata skor keseluruhan (\bar{X}) dan simpangan baku skor keseluruhan (SBx) dapat dihitung sebagai berikut.

Skor maksimal ideal = butir kriteria x skor tertinggi

$$= 15 \times 4$$

$$= 60$$

Skor minimal ideal = butir kriteria x skor terendah

$$= 15 \times 1$$

$$= 15$$

$$(\bar{X}) = \frac{1}{2} (\text{skor maksimal ideal} + \text{skor minimal ideal})$$

$$= \frac{1}{2} (60+15)$$

$$= 37,5$$

$$SBx = \frac{1}{6} (\text{skor maksimal ideal} - \text{skor minimal ideal})$$

$$= \frac{1}{6} (60-15)$$

$$= 7,5$$

Dari perhitungan di atas, peneliti membuat interval kategori dari skor mentah ke dalam skala empat. Berikut ini adalah kriteria kecenderungan skor integritas siswa di DIY.

Tabel 40. Konversi Skor Integritas ke Kategori

No.	Interval Skor	Kategori
1.	$X \geq 45$	Sangat baik
2.	$45 > X \geq 37,5$	Baik
3.	$37,5 > X \geq 30$	Kurang baik
4.	$X < 30$	Sangat kurang baik

Dari hasil analisis data dapat diketahui bahwa nilai rata-rata dari integritas siswa sebesar 46,93 atau berada pada interval $X \geq 45$ yang berarti bahwa tingkat integritas siswa di DIY tergolong **sangat baik**. Selain itu, dari hasil analisis data ini dapat diketahui bahwa berdasarkan asal sekolah, jurusan, dan jenis kelamin siswa memiliki kriteria perilaku antikorupsi yang berbeda-beda. Berdasarkan asal sekolah siswa, sebanyak 112 siswa di SMAN 1 Sleman diketahui bahwa nilai rata-rata dari integritas siswa sebesar 46,39 atau berada pada interval $X \geq 45$ yang berarti bahwa tingkat perilaku antikorupsi siswa di SMAN 1 Sleman tergolong **sangat baik**. Selanjutnya sebanyak 133 siswa di SMAN 2 Bantul diketahui bahwa nilai rata-rata dari perilaku antikorupsi siswa sebesar 47,21 atau berada pada interval $X \geq 45$ yang berarti bahwa tingkat perilaku antikorupsi siswa di SMAN 2 Bantul tergolong **sangat baik**. Dan sebanyak 130 siswa di SMAN 6 Yogyakarta diketahui bahwa nilai rata-rata dari perilaku antikorupsi siswa sebesar 47,12 atau berada pada

interval $X \geq 45$ yang berarti bahwa tingkat perilaku antikorupsi siswa di SMAN 6 Yogyakarta tergolong **sangat baik**.

Berdasarkan jurusanannya, sebanyak 256 siswa jurusan IPA diketahui bahwa nilai rata-rata dari perilaku antikorupsi siswa sebesar 46,93 atau berada pada interval $X \geq 45$ yang berarti bahwa tingkat perilaku antikorupsi siswa berjenis kelamin laki-laki tergolong **sangat baik**. Sedangkan sebanyak 119 siswa jurusan IPS diketahui bahwa nilai rata-rata dari perilaku antikorupsi siswa sebesar 47,01 atau berada pada interval $X \geq 45$ yang berarti bahwa tingkat perilaku antikorupsi siswa berjenis kelamin laki-laki tergolong **sangat baik**.

Berdasarkan jenis kelaminnya, sebanyak 137 siswa berjenis kelamin laki-laki diketahui bahwa nilai rata-rata dari perilaku antikorupsi siswa sebesar 46,93 atau berada pada interval $X \geq 45$ yang berarti bahwa tingkat perilaku antikorupsi siswa berjenis kelamin laki-laki tergolong **sangat baik**. Sedangkan sebanyak 238 siswa berjenis kelamin perempuan diketahui bahwa nilai rata-rata dari perilaku antikorupsi siswa sebesar 46,94 atau berada pada interval $X \geq 45$ yang berarti bahwa tingkat perilaku antikorupsi siswa berjenis kelamin perempuan tergolong **sangat baik**.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis data penelitian yang telah dilakukan (baik data kualitatif dan kuantitatif), dapat diungkapkan pembahasan penelitian tentang implementasi pendidikan antikorupsi sebagai upaya pembentukan warga negara muda berintegritas di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kajian dalam pembahasan ini terdiri dari dua substansi dan beberapa elemen di dalamnya, yaitu pada substansi

pertama membahas tentang implementasi pendidikan antikorupsi, terdiri dari implementasi pendidikan antikorupsi melalui kurikuler dan implementasi pendidikan antikorupsi melalui ekstrakurikuler. Pada submateri kedua yaitu warga negara muda berintegritas di DIY, terdiri dari persepsi antikorupsi siswa, perilaku antikorupsi siswa, dan integritas warga negara muda.

1. Implementasi Pendidikan Antikorupsi

Pemberantasan korupsi harus dilaksanakan secara konsisten dengan memberikan lebih pemahaman dan kesadaran yang dilakukan melalui sosialisasi. Sosialisasi dapat dilakukan dalam lingkungan keluarga, perusahaan/instansi-instansi, masyarakat, dan khususnya sekolah agar tidak terjadi korupsi di masa yang akan datang (Gephart, 2016: 49-77). Bentuk sosialisasi ini dapat dimunculkan melalui sistem pendidikan formal ataupun sekolah. Proses sosialisasi perlu diberikan kepada warga negara agar mereka memiliki kebajikan yang diperlukan untuk melindungi berbagai bentuk kebebasan. Kebajikan dalam diri warga negara harus dikembangkan serta ditanamkan (Peterson, 2011:88).

Sekolah sebagai pelaksana pendidikan sebaiknya menjalankan proses perubahan sikap dan mental yang terjadi pada diri seseorang. Melalui jalur yang lebih sistematis akan mudah dalam melakukan perubahan terhadap perilaku manusia yang korup. Sekolah sebagai pendidikan formal dapat melakukan proses pembudayaan. Perihal pendidikan antikorupsi, sekolah memiliki cara dalam membentuk nuansa dan atmosfer yang mendukung upaya untuk menginternalisasi nilai-nilai antikorupsi (Harmanto, 2012: 102).

Meski *Transparency International* (2004: 58) menyebutkan jika perubahan dalam sikap dan perilaku masyarakat tidak akan segera terjadi dan dampak pendidikan antikorupsi hanya akan terasa dalam jangka panjang. Karena pada dasarnya Korupsi berkaitan dengan moral. Korupsi merupakan salah satu tindakan immorality, sehingga perlu ditangani secara inklusif dan berkelanjutan (Miller, 2016: 23-24). Namun adanya makna antikorupsi yang dilatih akan membuat orang lebih jujur, dan meningkatkan kesadaran warga ke tingkat yang lebih baru. Level baru yang dimaksud di sini yaitu dengan bangkitnya integritas tanpa kompromi dalam diri seorang individu. Integritas tanpa kompromi dapat ditunjukkan dengan tetap setia pada apa yang diyakini, seperti menjunjung kejujuran, keadilan, dan “melakukan hal yang benar” tanpa kompromi, bahkan ketika dalam keadaan yang membuatnya sulit (Basabose, 2019: 53).

Pendidikan antikorupsi yang berfokus pada penanaman nilai-nilai, akan menguatkan nilai-nilai antikorupsi yang di internalisasi pada diri warga negara muda sebagai pedoman hidup agar tidak melakukan tindakan korupsi. Pendidikan antikorupsi sebaiknya tidak sekadar mengondisikan para siswa untuk tahu, lebih dari itu pembelajaran antikorupsi harus mengutamakan hasil belajar yang bermakna dengan mengalami Siswa diberikan kesempatan untuk membuat keputusan dan pilihan untuk dirinya sendiri (Gurning, Mudjiman dan Haryano, 2014: 94). Dengan demikian pendidikan antikorupsi merupakan usaha sadar dan terencana dalam mewujudkan generasi antikorupsi melalui proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai antikorupsi.

Dalam implementasi pendidikan antikorupsi, Manurung (2012: 240) menawarkan desain yang dapat digunakan untuk para pendidik. Ada tiga bentuk desain kurikulum pendidikan korupsi, yaitu: kurikulum formal, kurikulum operasional, dan kurikulum yang tersirat. Dalam penelitian ini desain implementasi pendidikan antikorupsi yaitu melalui kurikulum operasional dan kurikulum tersirat. Pada kurikulum operasional berupa pengimplementasian pendidikan antikorupsi pada kurikulum di sekolah ke dalam proses pembelajaran di kelas dengan dikembangkan oleh guru sesuai dengan kondisi kekinian dan kebutuhan belajar siswa. Dan pada kurikulum yang tersirat memuat nilai-nilai moral dan etika filosofi yang menjadi landasan dalam mencapai keberhasilan dari kehidupan dengan dikembangkan oleh guru sesuai spirit, etos kerja dan idealisme guru.

Secara kurikulum operasional, penanaman nilai-nilai antikorupsi dapat dilakukan secara terintegrasi dalam semua mata pelajaran. Guru dapat memilih nilai-nilai apa yang akan ditanamkan sesuai dengan materi pelajarannya. Guru turut ikut bertanggungjawab dalam penanaman nilai-nilai antikorupsi kepada siswa sehingga pemahaman siswa tentang nilai antikorupsi tidak melulu bersifat informatif-kognitif, melainkan bersifat terapan pada setiap mata pelajaran (Shobirin, 2014: 114). Tamba (2017: 518) menyebutkan jika pendidikan antikorupsi yang dilakukan secara kurikuler dapat dilakukan melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), karena antara keduanya memiliki relevansi yang sama yaitu penanaman nilai-nilai. Hal ini dipertegas oleh Sim dan Low (2012: 387) bahwa pendidikan kewarganegaraan

sebagai instrumental pendidikan karakter, juga sebagai pendidikan nilai dalam membentuk perilaku tertentu yang dicita-citakan.

Selanjutnya secara kurikulum tersirat, penanaman nilai-nilai antikorupsi dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan diluar pembelajaran misalnya dalam kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan insidental. Penanaman nilai-nilai antikorupsi dengan model ini tentunya lebih mengutamakan kegiatan yang menuntut kreativitas dan pemahaman siswa dalam penanaman dan pengolahan nilai-nilai antikorupsi. Melalui model ini siswa akan mendapatkan pengalaman-pengalaman konkrit tentang antikorupsi. Sampai pada aspek penting dalam penanaman nilai-nilai antikorupsi yaitu melalui pembudayaan dalam seluruh aktivitas dan suasana sekolah. Melalui proses pembudayaan ini akan menimbulkan suatu pembiasaan dalam menumbuhkan budaya antikorupsi di sekolah (Shobirin, 2014: 114-116).

a. Implementasi Pendidikan Antikorupsi Melalui Program Kurikuler (PPKn)

Sekolah dipandang sebagai wahana yang tepat dalam melaksanakan pendidikan kewarganegaraan dengan skala yang lebih luas. Melalui pendidikan kewarganegaraan diharapkan dapat memberikan dampak dengan menjangkau isu-isu sosial diluar gerbang sekolah (McMurray dan Niens, 2012: 208). Salah satu isu yang penting untuk dijangkau oleh siswa saat ini yaitu korupsi. Karena masalah korupsi masih menjadi persoalan primer baik dalam lingkup nasional maupun global. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pendidikan kewarganegaraan berbasis pendidikan antikorupsi kepada siswa.

Dalam memprogramkan pendidikan antikorupsi yang diberikan kepada siswa, dapat melalui program intrakurikuler/mata pelajaran (Manurung, 2012: 241-242). Tamba (2017: 518) menambahkan jika pendidikan antikorupsi secara konsep merupakan upaya melalui jalur pendidikan untuk mengendalikan serta mengembangkan sikap antikorupsi. Hal ini memiliki relevansi dengan pendidikan kewarganegaraan karena keduanya memfokuskan pada pembentukan sikap yang sesuai dengan sistem nilai yang diterima oleh masyarakat. Implementasi pendidikan antikorupsi dapat di insersi ke dalam pendidikan kewarganegaraan/PPKn. Proses insersi ini adalah bagian dari wujud pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Tujuan dilakukannya pendidikan antikorupsi ialah untuk mengembangkan kompetensi para siswa. Beberapa aspek kompetensi pendidikan antikorupsi yang harus dimiliki siswa sebagai berikut. Pertama, tahu (pengetahuan), bahwa para siswa diajarkan untuk tahu, sadar, dan paham tentang perilaku antikorupsi. Kedua, bisa (keterampilan), bahwa para siswa dilatih untuk bisa mempraktekkan perilaku antikorupsi, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Dan ketiga, terbiasa (sikap), bahwa para siswa dibiasakan untuk menunjukkan perilaku antikorupsi dalam hidupnya, dimana saja, kapan saja, dan dalam suasana bagaimanapun (Anas, dkk, 2018: 8-9). Adapun kompetensi dari pendidikan antikorupsi ini memiliki kesamaan dengan kompetensi dari pendidikan kewarganegaraan, antara lain pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan, dan watak-watak kewarganegaraan (Branson, 1998: 16-26; Kerr, 1999: 14).

Dam, Geijssel, Reumerman, dan Ledoux (2011: 356) memandang, jika pendidikan kewarganegaraan dapat menambah pengembangan kompetensi anak muda yang memungkinkan mereka untuk melakukan tugas sosial dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan kewarganegaraan merupakan cabang ilmu pengetahuan yang bertujuan mendidik siswa agar menjadi warga negara yang aktif, terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam kehidupan bernegara (Molina-Giro'n, 2015: 47-72). Pendidikan kewarganegaraan adalah sarana dalam mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap warga negara muda kelak agar siap untuk berpartisipasi sebagai warga negara (Quaynor, 2011: 33-57).

Pendidikan kewarganegaraan akan mempersiapkan warga negara muda agar siap menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Mayoritas negara telah melakukannya, menempatkan pendidikan kewarganegaraan sebagai media adaptasi dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Dalam agenda akademik pendidikan kewarganegaraan adalah program untuk merealisasikan cita-cita yang ideal (Sundström dan Fernández, 2013: 105-106). Bagi bangsa Indonesia, cita-cita ideal yang penting untuk diwujudkan yaitu bisa terlepas dari jeratan korupsi yang secara masif masih menggerogoti. Dalam melepaskan jeratan korupsi ini maka penting untuk memberikan pendidikan antikorupsi kepada warga, khususnya siswa sebagai warga negara muda.

Pendidikan antikorupsi adalah upaya untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi melalui sikap warga negara muda agar generasi mendatang mengembangkan sikap menolak secara tegas terhadap segala bentuk korupsi. Mentalitas antikorupsi ini dapat terwujud jika pemberantasan korupsi dilakukan

sampai ke akar-akarnya, berarti ada serangkaian usaha mendidik generasi muda untuk melahirkan para generasi yang tidak bersedia menerima dan memaafkan suatu perbuatan korupsi yang terjadi (Sumiarti, 2007: 8).

Bentuk pendidikan antikorupsi yang diberikan melalui mata pelajaran PPKn, dapat dilakukan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap perencanaan mengembangkan pendidikan antikorupsi melalui mata pelajaran PPKn dapat dimulai melalui penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Tidak adanya materi atau kompetensi dasar (KD) mengenai antikorupsi dalam kurikulum 2013 sehingga Bapak/Ibu Guru dalam merancang model pembelajaran berbasis pendidikan antikorupsi dengan menyisipkan materi antikorupsi pada kompetensi dasar (KD) yang relevan, dan menginternalisasi nilai-nilai antikorupsi ke dalam setiap kegiatan belajar mengajar (KBM). Kompetensi Dasar (KD) yang relevan dengan materi antikorupsi seperti ancaman terhadap Integrasi Nasional. Jika dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya (Kurikulum KTSP), materi tentang antikorupsi sebenarnya masih menjadi materi pokok yang tercantum dalam kompetensi dasar yaitu menganalisis upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dan menampilkan peran serta dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia (BSNP, 2006: 100).

Materi tentang antikorupsi yang tersirat tentunya membuat Bapak/Ibu Guru di SMAN 1 Sleman, SMAN 2 Bantul, dan SMAN 6 Yogyakarta untuk lebih kreatif dalam memanfaatkan media. Selain menggunakan PPT atau LCD-Proyektor dalam pelaksanaan pembelajaran, Bapak/Ibu Guru mempersilahkan siswa menggunakan

hp-nya untuk mencari materi ketika sedang menganalisis tentang tindakan pejabat yang korup.

Materi antikorupsi yang dikembangkan diharapkan tidak hanya menyentuh ranah kognitif, saja, dan tidak sebagai pembelajaran yang menekankan pemahaman dan hafalan. Namun bagi (Handoyo, 2009: 1), pendidikan antikorupsi harus menyentuh ranah afektif dan psikomotor sehingga dapat membentuk sikap dan perilaku antikorupsi siswa. Sehingga pendekatan pembelajaran yang digunakan berupa Saintifik dengan didukung model pembelajaran *discovery learning* dan *problem Based Learning* (PBL), serta metode pembelajaran seperti tanya jawab, wawancara, diskusi, bermain peran, dan kuis.

Implementasi pendidikan antikorupsi melalui PPKn yang dilakukan di SMAN 1 Sleman, SMAN 2 Bantul, dan SMAN 6 Yogyakarta memiliki karakteristik masing-masing. Di SMAN 1 Sleman secara umum dilakukan dengan memperhatikan RPP, dimulai dengan memberikan motivasi kepada siswa untuk jujur, disiplin, tanggung jawab, berani, dan kerja keras. Di SMAN 2 Bantul dilakukan dengan tidak hanya terpaku pada muatan materi saja, tetapi juga pada nilai yang penting untuk ditanamkan kepada siswa, Penanamannya melalui pembiasaan-pembiasaan seperti membiasakan siswa untuk jujur ketika ulangan. Dalam hal ini siswa dibiasakan untuk berani melakukan ulangan tanpa ada pengawasan. Selain itu siswa harus dibiasakan untuk disiplin masuk kelas, mengumpulkan tugas. Sedangkan di SMAN 6 Yogyakarta dilakukan melalui model portofolio. Melalui model portofolio ini beberapa nilai antikorupsi dapat di

internalisasi, seperti kejujuran, kedisiplinan, kerja keras, tanggung jawab, keberanian.

Dalam penanaman nilai-nilai antikorupsi yang orientasinya yaitu pada perkembangan moral siswa, guru memiliki peran secara filosofis. Guru memiliki peran dalam perkembangan moral siswa melalui "*hidden curriculum*" yang diwujudkan dalam lingkungan antarpribadi di sekolah dan di ruang kelas. Penanaman nilai-nilai antikorupsi secara *hidden curriculum* berarti dapat dilakukan melalui kurikulum pendidikan karakter tidak tertulis secara eksplisit, tetapi dapat di internalisasi melalui aktivitas di dalam kelas seperti melalui pembiasaan-pembiasaan yang mereka lakukan di dalam kelas (Nucci dan Narvaez, 2008: 175). Berikut adalah bentuk pembiasaan yang dilakukan siswa dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi pada pembelajaran PPKn.

- 1) Nilai Kejujuran: membiasakan siswa untuk tidak mencontek, siswa diperintahkan untuk menemukan suatu konsep, teori melalui sumber yang tersedia dan secara jujur merangkum hasil presentasi dalam kertas serta melakukan refleksi dengan menyimpulkan materi yang telah dibahas.
- 2) Nilai Kepedulian: meminta siswa untuk memperhatikan kebersihan dan kerapian ruang kelas dan saling tukar informasi sehingga memperoleh pengetahuan baru dan menekankan pembelajaran berbasis lingkungan di setiap materinya.
- 3) Nilai Kemandirian: membiasakan siswa tidak bergantung kepada teman dalam mengerjakan tugas, seperti mengamati dan membaca materi, menyusun daftar

pertanyaan yang belum dimengerti, dan merangkum hasil presentasi dalam kertas.

- 4) Nilai Kedisiplinan: memerintahkan siswa untuk tidak terlambat masuk kelas, memeriksa presensi kehadiran dan kesiapan siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, serta rutin melakukan kegiatan literasi dengan mencari dan membaca berbagai referensi dari berbagai sumber guna menambah pengetahuan dan pemahaman tentang materi.
- 5) Nilai Tanggungjawab: membiasakan siswa untuk tidak lalai terhadap tugas yang diberikan dengan menyelesaikan tugas dan menyusun laporan hasil telaah tentang materi yang telah dipelajari dan menyajikan hasil analisis tentang materi.
- 6) Nilai Kerja Keras: membiasakan siswa untuk tidak menunda dalam menyelesaikan tugas secara tuntas, dengan mencari informasi lanjutan melalui membaca berbagai sumber lain yang relevan dari buku, internet, web, media sosial.
- 7) Nilai Kesederhanaan: melakukan refleksi manfaat proses pembelajaran yang telah dilaksanakan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan.
- 8) Nilai Keberanian: siswa secara bergantian diberikan kesempatan untuk mempresentasikan di depan kelompok lain tentang hasil analisis, pengamatan, dan diskusi, serta menanyakan hal-hal yang belum dimengerti.
- 9) Nilai Keadilan: membagi siswa menjadi beberapa kelompok secara merata dengan cara berhitung berurutan tanpa memilih-milih teman dalam kelompoknya.

Dalam pelaksanaan pembelajaran PPKn, agar pendidikan antikorupsi lebih bermakna maka dapat ditunjang dengan memberikan penguatan. Penguatan yang diberikan bisa berupa verbal maupun non-verbal (Asril, 2010: 79). Penguatan secara verbal berupa dorongan yang membuat siswa merasa puas dan berbesar hati sehingga ia akan lebih terdorong untuk lebih aktif melakukan perilaku yang positif tersebut. Contohnya seperti memberikan teguran kepada siswa yang melakukan pelanggaran, mengingatkan mereka untuk jujur, disiplin, kerja keras, serta memberikan motivasi kepada mereka bahwa keberhasilan yang besar itu dimulai dari keberhasilan yang kecil.

Sedangkan penguatan secara non-verbal bisa diberikan dengan melakukan pendekatan kepada siswa dengan memberikan sentuhan atau menyentuh pundak siswa agar tidak mengulangi perilaku yang melanggar peraturan, acungan jempol ketika siswa tepat dalam menjawab atau mengerjakan tugas sesuai perintah, atau dengan memberikan *treatment* hukuman kegiatan kepada mereka, seperti membersihkan kelas. Terpenting dalam penguatan implementasi pendidikan antikorupsi melalui pembelajaran PPKn ini yaitu adanya teladan dari Bapak/Ibu Guru pengampu. Karena Guru dalam lingkup persekolahan secara tidak langsung juga mengemban tugas untuk mengajarkan siswa tentang kewarganegaraan. Seorang guru harus mampu memberikan edukasi terhadap siswa bagaimana hidup bernegara secara baik (*virtue*) (Kissling, 2018: 289-230).

Pada akhirnya, melalui beberapa aktivitas yang kontra terhadap pelanggaran nilai-nilai antikorupsi akan menghasilkan sebuah iklim antikorupsi. Khususnya dalam pembelajaran PPKn akan membangun iklim antikorupsi tersendiri di kelas.

Iklm kelas dapat digambarkan sebagai konsep umum yang difokuskan pada kerja sama dalam kegiatan belajar mengajar dan keadilan penilaian (Schulz, Ainley, Fraillon, Kerr & Losito, 2009: 30).

Iklm antikorupsi yang ada di kelas-kelas dapat digambarkan pada aktivitas siswa yang melakukan analisis terhadap suatu permasalahan dengan mencari pemecahan masalahnya. Ditambah dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengekspresikan pemikiran antikorupsi mereka melalui kegiatan diskusi. Secara aktivitas, siswa diharapkan berani jujur dalam menyampaikan pendapatnya dan tanggungjawab terhadap apa yang disampaikannya.

Pentingnya iklim ruang kelas dalam pendidikan kewarganegaraan secara positif dapat mempengaruhi pandangan siswa terhadap pengambilan keputusan di sekolah dan persepsi siswa tentang iklim sekolah (Schulz, Ainley, Fraillon, Kerr & Losito, 2009: 30). Aktivitas semacam ini tentunya akan meningkatkan kemampuan pengamatan yang dimiliki siswa sehingga menghasilkan sebuah persepsi mereka sendiri (McCowan, 2009: 25). Persepsi dalam lingkup siswa dibangun melalui diskusi masalah politik dan sosial dengan melihat sejauh mana pengetahuan kewarganegaraan siswa dan harapan siswa untuk menentukan pilihan ketika mereka mencapai usia dewasa.

Selanjutnya pada tahap evaluasi, dapat dilakukan dengan memberikan penilaian yang termuat dalam proses evaluasi terhadap implementasi pendidikan antikorupsi kepada siswa. Dalam evaluasi pendidikan antikorupsi melalui pembelajaran PPKn dapat dilakukan pada akhir pembelajaran yaitu dengan memberikan arahan kepada siswa agar tidak melakukan tindakan korupsi meskipun

dalam bentuk sekecil apapun, dan tidak melakukan hal-hal lain yang sifatnya melanggar norma atau peraturan.

Lebih jelas Manurung (2012: 239) menyebutkan jika evaluasi pendidikan antikorupsi bersifat kuratif-negatif. Maksudnya pendidikan antikorupsi dapat dinilai dari kriteria berkurangnya perilaku buruk atau berkurangnya sikap tidak disiplin siswa yang terjadi dalam kegiatan sekolah. Misalnya kriteria tentang jumlah siswa yang tidak sering terlambat, tidak bolos, tidak mencontek, tidak terlibat tawuran, tidak terlibat kejahatan, dll. Semuanya dimulai dengan kata kunci “tidak”. Atau dalam bahasa Gong dan Wang (2012: 571-572) yaitu kecenderungan untuk menolak godaan terlibat dalam tindakan korupsi baik dalam perilaku sendiri dan juga mempertimbangkan perilaku korup orang lain sebagai etika yang tidak dapat diterima.

b. Implementasi Pendidikan Antikorupsi Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler

Implementasi pendidikan antikorupsi yang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan diluar pembelajaran, dapat dilakukan dalam kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan insidental. Model pendidikan antikorupsi seperti itu sebenarnya masih memiliki hubungan dengan Pendidikan Kewarganegaraan. Menurut Wong, Lee, Chan, dan Kennedy (2016: 6) Pendidikan Kewarganegaraan tidak sebatas pada pendidikan yang ada di dalam kelas saja, lebih daripada itu pendidikan kewarganegaraan dapat dilakukan secara ekstrakurikuler dan tersirat di lingkungan sekolah.

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan salah satu jalur dalam pembinaan kesiswaan, hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik

Indonesia Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan. Bentuk kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti dan dilaksanakan siswa baik di sekolah maupun diluar sekolah bertujuan agar siswa dapat memperkaya dan memperluas wawasan pengetahuan dan mendorong pembinaan sikap dan nilai-nilai. Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, menjelaskan bahwa ekstrakurikuler adalah kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh peserta didik diluar jam belajar kurikuler dan kegiatan ko-kurikuler dibawah bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan. Dengan demikian tujuan pembinaan siswa yang dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler sendiri yaitu untuk menyiapkan siswa agar menjadi warga masyarakat yang berakhlak mulia, demokratis, menghormati hak-hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan masyarakat madani.

Belum adanya kebijakan khusus tentang program pendidikan antikorupsi sehingga dalam pelaksanaannya di integrasi ke dalam kegiatan ekstrakurikuler. Implementasi pendidikan antikorupsi dengan model ini lebih mengutamakan kegiatan yang menuntut kreativitas dan pemahaman siswa dalam penanaman dan pengolahan nilai-nilai antikorupsi. Keunggulan model ini siswa mendapatkan pengalaman-pengalaman konkrit tentang antikorupsi. Perencanaannya dilakukan setiap tahun secara implisit dengan melibatkan siswa dari berbagai ekstrakurikuler yang mereka ikuti. Bapak/Ibu Guru selalu mendampingi siswa mulai dari penyusunan program kerja sampai dengan pelaksanaan dan pelaporan

pertanggungjawaban. Dalam pelaksanaannya, siswa diharapkan berpartisipasi pada semua kegiatan yang dilakukan sekolah.

Penerapan pendidikan antikorupsi melalui kegiatan ekstrakurikuler dilakukan dengan menginternalisasi nilai-nilai antikorupsi pada setiap kegiatan ekstrakurikuler, yaitu dengan memberikan para siswa tanggung jawab di setiap kegiatan, seperti sebagai panitia pelaksana atau penanggung jawab kegiatan ekstrakurikuler. Atau siswa yang tergabung dalam ekstrakurikuler akan membentuk program kerja dan mendapatkan anggaran dalam melaksanakan program kerjanya. Siswa yang tergabung di masing-masing ekstrakurikuler harus bertanggung jawab dalam menjalankan program kerja serta mengolah dana sebaik mungkin. Selanjutnya siswa membuat laporan pertanggung jawaban (LPJ) untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang digunakan untuk program kerja kegiatan. Dari pemberian tanggung jawab semacam itu siswa akan terlatih untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi.

Dalam penerapan pendidikan antikorupsi melalui ekstrakurikuler, masing-masing sekolah memiliki jenis ekstrakurikuler tersendiri. Di SMAN 1 Sleman, ekstrakurikuler yang dimiliki yaitu ekstrakurikuler seperti pramuka yang merupakan ekstrakurikuler wajib diikuti oleh kelas X dan XI. Selain itu ada ekstrakurikuler pilihan seperti KIR, jurnalistik, band, seni tari, karawitan, palang merah remaja (PMR), pencak silat, bola voli, bola basket, futsal, bulu tangkis, dan seni baca Al Qur'an.

Selanjutnya beberapa jenis ekstrakurikuler yang ada di SMAN 2 Bantul meliputi Keagamaan (Rohani Islam, Rohani Kristen, dan Katolik); Keolahragaan

(basket, bola voli, karate, Pencak silat); Kepemimpinan (Paskibra / Pleton inti); Palang Merah Remaja; Seni (Teater, Band, Seni Tari, Paduan Suara); Kelompok Ilmiah Remaja (*Smadaba Research Community*); Kelompok Majalah kreasi; Kewirausahaan; dan Pembinaan Olimpiade Sains dan Teknologi.

Sedangkan jenis ekstrakurikuler di SMAN 6 Yogyakarta, dimulai dari bidang olahraga, meliputi PBB, Bola Voli, Futsal, Basket Ball, Bulutangkis, dan Bela diri Karate; bidang keterampilan berbahasa meliputi Bahasa Perancis, Bahasa Jepang, dan English Study Club; bidang kesenian meliputi Paduan Suara, Teater, Karawitan, Nasyid, Seni Baca Al-Quran, Seni Tari, dan Seni Musik; bidang keahlian meliputi KIR (Kelompok Ilmiah Remaja), Jurnalistik, dan Fotografi; bidang sosial-kemasyarakatan meliputi PMR dan Pecinta alam.

Meskipun dalam implementasi pendidikan antikorupsi melalui kegiatan ekstrakurikuler memiliki kelemahan dengan tidak adanya struktur yang tetap dalam kerangka pendidikan dan pengajaran tentang antikorupsi. Namun dalam pelaksanaannya, kegiatan ekstrakurikuler sangat efektif dalam membiasakan siswa untuk mengamalkan nilai-nilai antikorupsi. Aspek penting yang ditekankan dalam pembiasaan kepada siswa adalah penanaman nilai-nilai antikorupsi yang dilakukan melalui pembudayaan. Melalui proses pembudayaan akan menimbulkan suatu pembiasaan dalam perilaku-perilaku siswa sehingga menumbuhkan budaya antikorupsi di sekolah. Berikut contoh penanaman nilai-nilai antikorupsi yang dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.

- 1) Nilai Kejujuran: siswa diajarkan dan dibiasakan untuk berbicara, bertindak, dan mengolah dana secara jujur

- 2) Nilai Kepedulian: siswa dibiasakan untuk peduli terhadap teman yang lain dengan saling tolong-menolong, dan peduli terhadap lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya serta membersihkan tempat yang kotor
- 3) Nilai Kemandirian: siswa dibiasakan untuk mengerjakan tugas/instruksi dengan tidak bergantung orang lain
- 4) Nilai Kedisiplinan: siswa dibiasakan untuk menghargai waktu dengan datang latihan tepat waktu, dan menyelesaikan tugas sesuai dengan target
- 5) Nilai Tanggungjawab: siswa dibiasakan untuk tanggung jawab terhadap tugas yang diemban, dan menerima hukuman ketika instruksi yang dijalankan tidak sesuai perintah
- 6) Nilai Kerja Keras: siswa dibiasakan untuk berlatih secara sungguh-sungguh dan menyelesaikan tugas sesuai instruksi
- 7) Nilai Kesederhanaan: siswa dibiasakan untuk tidak berlebihan dalam berpakaian dan berperilaku
- 8) Nilai Keberanian: siswa dibiasakan untuk berani menyampaikan pendapat di depan umum, dan berani dalam mengambil resiko
- 9) Nilai Keadilan: siswa dibiasakan untuk tidak membedakan dalam berteman, dan adil dalam membagi tugas

Proses pembudayaan nilai-nilai antikorupsi diatas pada akhirnya akan membentuk perilaku antikorupsi siswa. Melalui beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti oleh siswa, secara sistematis siswa akan dilatih dalam mengamalkan nilai-nilai antikorupsi. Khususnya dalam melatih kejujuran para siswa masing-masing sekolah menerapkan kantin kejujuran.

Agar pembudayaan nilai-nilai antikorupsi diatas lebih bermakna bagi siswa, kiranya dilakukan dengan memberikan penguatan kepada para siswa. Penguatan yang diberikan kepada siswa dapat berupa penguatan verbal dan Penguatan non-verbal (Asril, 2010: 79). Penguatan verbal diberikan dengan memberikan dorongan agar membuat siswa merasa puas dan berbesar hati sehingga siswa akan terdorong untuk lebih aktif melakukan perilaku yang positif. Bentuk penguatan verbal yang diberikan berupa motivasi untuk tidak melakukan pelanggaran dan memberikan gambaran tentang korupsi dengan menjelaskan bahwa awal mulanya korupsi itu dari yang kecil-kecil, seperti korupsi waktu, uang 10 ribu, 20 ribu, pelanggaran-pelanggaran kecil semacam ini jika tidak langsung diberi penjelasan maka akan menjadi kebiasaan.

Selanjutnya bentuk penguatan non-verbal terhadap penerapan pendidikan antikorupsi dapat dilakukan melalui mimik atau gestur tubuh, pemberian simbol atau benda, dengan memberikan sentuhan, melakukan pendekatan serta melalui kegiatan yang menyenangkan. Bentuk penguatan berupa mimik secara umum dilakukan dengan memberikan senyuman. Selanjutnya secara simbolik terhadap penguatan pendidikan antikorupsi dapat berupa ada simbol-simbol dan tulisan berupa pentingnya kejujuran, hindari korupsi yang ditempel di dinding-dinding sekolah di SMAN 1 Sleman.

Sekolah memiliki karakteristik berupa etos, budaya, dan iklim yang dapat mempengaruhi pengembangan pengetahuan anak muda tentang kewarganegaraan, dan kecenderungan kompetensi mereka sebagai warga negara. Lebih jelasnya iklim sekolah sebagai lingkungan belajar yang demokratis dibangun melalui

kontribusi guru terhadap etos demokratis di sekolah (Schulz, Ainley, Fraillon, Kerr & Losito, 2009: 30). Dalam hal ini sekolah dan pendekatan guru kepada siswa menjadi faktor penting untuk diperhatikan dalam membangun iklim antikorupsi di lingkungan sekolah.

Sekolah sebagai organisasi yang memiliki struktur manajemen memiliki otoritas dalam membangun iklim antikorupsi di lingkungan sekolah. Iklim antikorupsi yang dibangun dapat dilakukan dengan memberikan contoh kepada siswa dalam mengelola sebuah organisasi, seperti mengajarkan siswa untuk menjunjung prinsip akuntabilitas dan transparansi (keterbukaan). Dalam prinsip akuntabilitas sekolah dapat melakukannya melalui pertanggungjawaban terhadap produk kebijakan atau keputusan yang dikeluarkan.

SMAN 2 Bantul dalam mengajarkan siswa untuk menjunjung prinsip akuntabilitas, pada setiap akhir semester mengadakan forum dialog yang diikuti oleh Bapak/Ibu Guru bersama siswa. Bentuk kegiatan dalam forum dialog tersebut berupa evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler yang telah berlangsung selama satu semester. Pada saat itu masalah yang dibahas yaitu tentang batas maksimal berada di lingkungan sekolah yang dianggap sudah tidak relevan lagi karena siswa pada jam atau batas waktu tersebut masih berada di lingkungan sekolah untuk mempersiapkan lomba atau kegiatan sekolah. Selanjutnya dalam prinsip transparansi dapat dilakukan dengan mempublikasikan hasil penganggaran atau penggunaan dana BOS (bantuan operasional sekolah). Seperti yang dilakukan oleh SMAN 1 Sleman dalam memberikan informasi keuangan sekolah yang ditempel dalam papan

pengumuman. Aspek penting selanjutnya yaitu pendekatan yang dilakukan oleh guru dalam memberikan penguatan pendidikan antikorupsi kepada siswa. Pendekatan ini berupa penyampaian perhatian kepada siswa yang bermasalah (melanggar peraturan) atau kegembiraan terhadap hasil pekerjaan mereka.

Selain itu bentuk penguatan pendidikan antikorupsi dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang secara langsung dapat berkenaan dengan siswa. Dalam penguatan ini masing-masing sekolah memiliki jenis kegiatan yang berbeda-beda. Di SMAN 1 Sleman dalam memberikan penguatan pendidikan antikorupsi melalui kegiatan dilakukan dengan mengundang pihak luar sekolah seperti mengundang kyai atau ustaz dalam memberikan ceramah kepada siswa tentang pentingnya hidup jujur, mengundang Kodim dalam rangka kegiatan penguatan karakter siswa agar disiplin, kerja keras, tanggung jawab, berani, selanjutnya ada kegiatan ke pesantren selama tiga hari menginap di sana dan ke yayasan yatim piatu dalam rangka bakti sosial.

Dan di SMAN 2 Bantul kegiatan yang dilakukan dalam memberikan penguatan terhadap pendidikan antikorupsi yaitu melalui kegiatan-kegiatan yang bekerja sama dengan pihak luar sekolah, seperti bekerja sama dengan kapolsek, Lembaga pemasyarakatan, pondok pesantren, panti asuhan, panti jompo dan pihak lainnya dengan tujuan sebagai upaya penguatan karakter siswa dengan mengembangkan pendidikan antikorupsi kepada siswa. Kegiatan-kegiatan semacam itu dapat dikategorikan sebagai bentuk penguatan non-verbal melalui kegiatan, tujuannya untuk memperkuat karakter siswa agar tidak terjebak dalam perilaku yang korup.

Bentuk penguatan pendidikan antikorupsi melalui kegiatan di SMAN 6 Yogyakarta dilakukan dengan kegiatan kewirausahaan, dalam kegiatan tersebut siswa akan berkenaan langsung dengan uang, lalu siswa dapat mengelola uang tersebut dan harus mempertanggungjawabkan. SMAN 6 Yogyakarta sebagai sekolah pelaksana program kewirausahaan tentunya sangat unggul dalam mengembangkan pendidikan antikorupsi melalui program kewirausahaan. Dalam pelaksanaannya siswa membuat olahan makanannya sendiri untuk dijual. Selanjutnya olahan makanannya dijual kepada teman-temannya dengan meletakkannya di sudut kelas. Siswa yang membeli bisa melatakan uang yang telah disediakan, dan mengambil kembaliannya sendiri. Siswa juga dapat membuat wilayah perdagangan seperti bazaar untuk menjajakan dagangannya.

Baik penguatan secara verbal maupun non-verbal bertujuan untuk memberikan informasi atau (*feedback*) terhadap perbuatan dan pemahaman siswa melalui sebuah koreksi atau tindakan dorongan (Usman, 2006: 80; Rahim, 2008: 117; Asril, 2010: 79). Kegiatan ekstrakurikuler merupakan bagian dari proses yang sistematis dan sadar dalam membudayakan warga negara muda agar memiliki kedewasaan sebagai bekal perjalanan hidup selanjutnya. Dilakukannya pendidikan antikorupsi melalui kegiatan ekstrakurikuler semata-mata agar siswa menumbuh-kembangkan pribadi yang berintegritas, dengan memiliki kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggungjawab, etos kerja keras, sederhana, berani, dan adil yang baik sehingga secara tegas mereka terlatih untuk mengamalkan perilaku antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi pendidikan antikorupsi dalam penelitian ini memiliki dua model pendekatan, yaitu secara kurikuler dan ekstrakurikuler. Implementasi pendidikan antikorupsi secara kurikuler yaitu diberikan melalui mata pelajaran PPKn, dengan dilakukan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap perencanaan mengembangkan pendidikan antikorupsi melalui mata pelajaran PPKn dapat dimulai melalui penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Dalam pelaksanaannya dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi dilakukan secara *hidden curriculum* atau melalui pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan siswa di dalam kelas. Sedangkan implementasi pendidikan antikorupsi yang diberikan melalui kegiatan ekstrakurikuler dalam pelaksanaannya sangat efektif dalam membiasakan siswa untuk mengamalkan nilai-nilai antikorupsi. Pendidikan antikorupsi yang diberikan kepada siswa dapat berupa tanggung jawab di setiap kegiatan yang dilaksanakan, seperti sebagai panitia pelaksana atau penanggung jawab kegiatan ekstrakurikuler. Atau siswa yang tergabung dalam ekstrakurikuler akan membentuk program kerja dan mendapatkan anggaran dalam melaksanakan program kerjanya. Siswa membuat laporan pertanggung jawaban (LPJ) untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang digunakan untuk program kerja kegiatan. Pada tahap evaluasi, baik implementasi pendidikan antikorupsi yang dilakukan melalui kurikuler maupun ekstrakurikuler bersifat kuratif-negatif atau dinilai dari kriteria berkurangnya perilaku buruk atau berkurangnya sikap negatif. Semuanya dimulai dengan kata kunci “tidak”.

2. Warga Negara Muda Berintegritas di DIY

Korupsi adalah masalah moral dan konteks korupsi saat ini telah mempertontonkan bahwa moralitas telah menurun. Korupsi dapat digambarkan sebagai upaya sadar atau pengalihan sumber daya yang disengaja dari kepuasan kepentingan umum ke kepentingan diri. Korupsi adalah perbuatan yang buruk, dan korupsi adalah perbuatan yang salah. Kita bebas memilih untuk menjadi seorang korup atau memilih untuk jujur. Dalam memilih korupsi secara bebas, kita bebas menentang hati nurani kita. Namun tanpa berharap bahwa tindakan pelanggaran seperti itu di universalkan. Di sinilah kita melihat bahwa korupsi secara moral tidak dapat diterima. Agar berkelanjutan, upaya anti-korupsi pada dasarnya harus dimulai dengan menanamkan nilai-nilai etika dalam diri orang-orang dari generasi sekarang dan masa depan (Basabose, 2019: 52-53).

Beberapa dekade ini kata integritas sering disebut-sebut. Terutama ketika banyak media memberikan kritik kepada para pejabat publik yang harus bekerja secara bersih dari tindakan korupsi. Kewaspadaan terhadap tindakan korupsi ini tentunya menempatkan integritas menjadi elemen penting untuk dibangun dalam diri warga negara. Integritas kini menjadi sebuah nilai tujuan yang harus di tumbuh kembangkan, khususnya kepada siswa sebagai warga negara muda penerus bangsa.

Keseriusan Bangsa Indonesia dalam menumbuh kembangkan nilai integritas pada diri siswa ditunjukkan dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Salah satu tujuan dalam Perpres tersebut yaitu ingin membangun dan membekali Peserta Didik sebagai generasi emas Indonesia Tahun 2045 dengan jiwa Pancasila dan

pendidikan karakter yang baik. Dalam menyempurnakan tujuan tersebut, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal dimana pada pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa nilai integritas menjadi salah satu nilai dasar yang ditanamkan kepada siswa.

Urgensi penanaman nilai integritas dilakukan agar siswa sebagai person mampu memerangi segala bentuk tindakan korupsi. Korupsi yang menggerogoti akuntabilitas diri seseorang menurut Endro (2017: 145) penting untuk dilawan dengan meningkatkan integritas pada diri orang tersebut. Secara mendasar korupsi sebagai antonim dari integritas dapat merusak atau memperkecil kemungkinan terwujudnya kebaikan umum, seperti pada sektor pendidikan, korupsi seperti penghambat dari pembentukan/pembangkitan generasi, pada seorang manusia korupsi mengacu pada sesuatu yang berhenti untuk menjadi, atau kemerosotan pada kecenderungan manusia berperilaku dari yang semestinya.

Integritas merupakan keutamaan/kebajikan yang mendorong individu untuk melakukan upaya partisipatif dalam mewujudkan kehidupan bersama yang baik. Integritas akan menimbulkan daya dorong untuk mengarahkan berfungsinya partikularitas dalam diri individu demi kebaikan umum yang sebanyak mungkin manusia bisa ikut merasakan. Pada kasus manusia atau institusi yang dikendalikan manusia, integritas merupakan suatu karakter baik manusia atau budaya baik organisasi yang menimbulkan daya dorong untuk mewujudkan keputusan dan tindakan bagi kebaikan bersama. Dengan demikian ekspresi integritas adalah

sebuah antitesis terhadap perilaku atau tindakan korupsi dengan mengarahkannya pada fungsi partikularitas demi kebaikan bersama yang di manifestasi pada sebuah pribadi yang berintegritas, persepsi antikorupsi serta perilaku antikorupsi.

a. Pribadi Berintegritas Siswa di DIY

Siswa sebagai warga negara muda tentunya menjadi sebuah investasi bangsa dengan turut merefleksikan peran mereka melalui praktik sosial dan budaya sebelum bertindak sebagai warga negara seutuhnya (Biesta, Lawy, & Kelly, 2009: 2). Melalui beberapa bentuk pendidikan antikorupsi baik secara kurikuler maupun ekstrakurikuler yang diterima siswa di lingkungan sekolah secara langsung akan membantu siswa untuk merefleksikan peran mereka sebagai warga negara muda yang berintegritas.

Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui bahwa nilai rata-rata dari integritas siswa sebesar 46,93 atau berada pada interval $X \geq 45$ yang berarti bahwa tingkat integritas siswa di DIY tergolong sangat baik. Selain itu, dari hasil analisis data ini dapat diketahui bahwa berdasarkan asal sekolah, jurusan, dan jenis kelamin siswa memiliki kriteria perilaku antikorupsi yang berbeda-beda. Berdasarkan asal sekolah siswa, sebanyak 112 siswa di SMAN 1 Sleman diketahui bahwa nilai rata-rata dari integritas siswa sebesar 46,39 atau berada pada interval $X \geq 45$ yang berarti bahwa tingkat perilaku antikorupsi siswa di SMAN 1 Sleman tergolong sangat baik. Selanjutnya sebanyak 133 siswa di SMAN 2 Bantul diketahui bahwa nilai rata-rata dari perilaku antikorupsi siswa sebesar 47,21 atau berada pada interval $X \geq 45$ yang berarti bahwa tingkat perilaku antikorupsi siswa di SMAN 2 Bantul tergolong sangat baik. Dan sebanyak 130 siswa di SMAN 6 Yogyakarta diketahui bahwa nilai

rata-rata dari perilaku antikorupsi siswa sebesar 47,12 atau berada pada interval $X \geq 45$ yang berarti bahwa tingkat perilaku antikorupsi siswa di SMAN 6 Yogyakarta tergolong sangat baik.

Berdasarkan jurusan, sebanyak 256 siswa jurusan IPA diketahui bahwa nilai rata-rata dari perilaku antikorupsi siswa sebesar 46,93 atau berada pada interval $X \geq 45$ yang berarti bahwa tingkat perilaku antikorupsi siswa berjenis kelamin laki-laki tergolong sangat baik. Sedangkan sebanyak 119 siswa jurusan IPS diketahui bahwa nilai rata-rata dari perilaku antikorupsi siswa sebesar 47,01 atau berada pada interval $X \geq 45$ yang berarti bahwa tingkat perilaku antikorupsi siswa berjenis kelamin laki-laki tergolong sangat baik.

Berdasarkan jenis kelamin siswa, sebanyak 137 siswa berjenis kelamin laki-laki diketahui bahwa nilai rata-rata dari perilaku antikorupsi siswa sebesar 46,93 atau berada pada interval $X \geq 45$ yang berarti bahwa tingkat perilaku antikorupsi siswa berjenis kelamin laki-laki tergolong sangat baik. Sedangkan sebanyak 238 siswa berjenis kelamin perempuan diketahui bahwa nilai rata-rata dari perilaku antikorupsi siswa sebesar 46,94 atau berada pada interval $X \geq 45$ yang berarti bahwa tingkat perilaku antikorupsi siswa berjenis kelamin perempuan tergolong sangat baik.

Dalam menjelaskan integritas secara kompleks maka ada beberapa karakteristik yang penting untuk dipahami. Beberapa karakteristik tersebut secara konsisten dapat menunjukkan seorang memiliki integritas yang baik. Dengan mengadopsi penjelasan Gostick dan Telford (2006) beberapa karakteristik tersebut meliputi sadar akan hal kecil, menemukan yang benar, bertanggung jawab,

membudayakan kepercayaan, menepati janji, peduli pada kebaikan yang lebih besar, jujur dan rendah hati, bertindak bagaikan diawasi; dan konsisten. Kesembilan karakteristik tersebut merupakan nilai yang penting untuk dikembangkan serta ditanamkan kepada diri anak sejak dini. Karena nilai-nilai yang ditanamkan sejak dini akan menciptakan konsistensi sikap mental anak dalam menjalankan kehidupannya.

Gea (2014: 951) menyebutkan jika integritas merupakan sesuatu yang terkait langsung dengan diri individu. Integritas diri berkaitan dengan sikap selalu mengedepankan tanggung jawab, kepercayaan, dan kesetiaan terhadap janji. Orang yang berintegritas adalah seseorang yang dapat diandalkan dan dapat diprediksi perkataannya, maksudnya apa yang dia kehendaki dan lakukan seperti apa yang dia katakan, terlebih makna ucapan dan tindakannya sangat logis, masuk akal, dan tertata rapi tidak menyimpan kejutan yang buruk (Šamánková, Příhodová, dan Preiss, 2018: 113).

Mintrop (2012: 699-700) menjelaskan bahwa dalam mengekspresikan integritas dalam diri, ada standar hak moral yang harus terpenuhi. Standar-standar ini mungkin tidak selalu tampak, tetapi seseorang dapat memperoleh akses kepada mereka melalui refleksi dengan ketulusan, kesungguhan, dan komitmen. Seorang yang memiliki integritas dapat dijelaskan ketika mereka mengembangkan rasa benar dan salah, mengamati tindakan, dan mengakui, dengan tetap setia kepada prinsip meskipun lingkungan tidak menghargai perilaku tersebut. Integritas dapat dijelaskan secara mendalam sebagai rasa moral atau kecukupan adaptif dalam menghadapi kekuatan lingkungan yang mengancam harga diri individu, yang

berupa penilaian negatif, sanksi, dan sejenisnya. Integritas pribadi menjadi jantung dari terbentuknya integritas publik dalam masyarakat yang dibentuk secara bebas. Dalam kasus memerangi korupsi, integritas merupakan identitas kebajikan yang harus diutamakan. Pribadi berintegritas akan mengutamakan sebuah kebajikan dengan mendorong untuk mengelola berfungsinya partikularitas atau keterbatasan kekuasaan (kompetensi, sumber daya, kemampuan individu serta organisasi) demi kepentingan atau kebaikan bersama.

Sebuah studi menjelaskan arti pentingnya integritas dalam diri individu yang berdampak pada kemajuan organisasi yang dipimpinnya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Cecchetti, Allegrini, dan Monteduro (2018: 71-74) menunjukkan bahwa integritas menjadi komponen penting dalam memajukan badan usaha milik negara (BUMN). Penelitian ini mengeksplorasi hubungan antara beberapa dewan direksi yang berkomitmen untuk memerangi korupsi. Dalam memerangi korupsi serta keinginan untuk memajukan BUMN, hal mendasar yang dibutuhkan yaitu integritas personal dewan direksi. Perdebatan yang terjadi dalam lingkup dewan direksi berkontribusi pada penerapan transparansi serta menjaga integritas di BUMN. Selain itu integritas merupakan karakter yang universal, yang harus dimiliki oleh siapa pun dan dalam profesi apa pun. Contoh lain yang menyebutkan pentingnya integritas dalam diri individu yaitu dalam penelitian Pratama, W., Pardjono, P., & Sofya, H. (2019: 49-53) yang menyebutkan bahwa integritas merupakan salah satu karakter yang harus dimiliki oleh seorang pelaut dalam industri perkapalan. Dia menjelaskan bahwa karakter integritas penting untuk dimiliki oleh seorang pelaut karena akan membawa dirinya untuk selalu

berusaha melakukan hal yang benar, mewujudkan apa yang pernah dikatakan atau dijanjikan, hidup berdasarkan etika, mau belajar dari masalah dan kegagalan. Dengan demikian, integritas merupakan karakter universal yang harus dimiliki oleh setiap personal.

Dengan demikian ekspresi integritas dalam diri individu tercermin pada ciri-ciri pribadi berikut. Pertama, memiliki fisik yang sehat dan bugar, maksudnya memiliki kemampuan hidup sosial yang semakin baik, kekayaan rohani yang semakin mendalam, dan mental yang kuat dan sehat. Kedua, kadar konflik dalam dirinya rendah, maksudnya dia tidak sedang berperang melawan dirinya sendiri (pribadinya menyatu) dan memiliki lebih banyak energi untuk tujuan produktif. Ketiga, memiliki kemampuan dalam menata batin sampai pada tahap kebebasan batin sehingga tidak mudah diombang-ambing oleh gejolak emosi dan perasaan diri. Keempat, memiliki kedekatan hidup pada Tuhan sehingga mampu menanggung risiko dan konsekuensi dari pilihan hidupnya yang religius. Kelima, seorang yang tidak mengalami banyak keraguan, dalam arti tidak bingung terhadap mana yang benar atau salah, dan baik atau buruk. Keenam, memiliki kemampuan hidup secara jernih, melihat hidup dengan apa adanya, dan bukan karena hanya keinginannya. Dalam kasus ini bagaimana seseorang tidak lagi bersikap emosional, melainkan lebih objektif terhadap pengamatannya. Ketujuh, dapat membaktikan tugas, kewajiban atau panggilan tertentu yang dipandang sebagai sesuatu penting (Gea, 2006: 25).

b. Persepsi Antikorupsi Siswa di DIY

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, dapat diuraikan bahwa dari 375 siswa di DIY menjadi sampel penelitian ini, siswa yang memiliki persepsi positif sebanyak 263 siswa, dan siswa yang memiliki persepsi negatif sebanyak 112 siswa. Berikut beberapa karakteristik persepsi siswa yang ditinjau berdasarkan asal sekolah, jurusan, dan jenis kelamin. Berdasarkan asal sekolah siswa, ada 112 siswa di SMAN 1 Sleman yang menjadi sampel, sebanyak 75 siswa memiliki persepsi positif tentang antikorupsi, dan sebanyak 37 siswa memiliki persepsi negatif tentang antikorupsi. Selanjutnya di SMAN 2 Bantul ada 133 siswa yang menjadi sampel, sebanyak 111 siswa memiliki persepsi positif tentang antikorupsi, dan sebanyak 22 siswa memiliki persepsi negatif tentang antikorupsi. Terakhir di SMAN 6 Yogyakarta ada 130 siswa yang menjadi sampel, sebanyak 77 siswa memiliki persepsi positif tentang antikorupsi, dan sebanyak 53 siswa memiliki persepsi negatif tentang antikorupsi.

Berdasarkan latar belakang jurusan siswa, ada 256 siswa jurusan IPA dan 119 siswa jurusan IPS. Dari 256 siswa jurusan IPA sebanyak 179 siswa memiliki persepsi positif tentang antikorupsi, dan sebanyak 77 siswa memiliki persepsi negatif tentang antikorupsi. Dan dari 119 siswa jurusan IPS, dapat diketahui bahwa 84 siswa memiliki persepsi positif tentang antikorupsi, dan 35 siswa memiliki persepsi negatif tentang antikorupsi.

Selanjutnya ditinjau berdasarkan dari jenis kelamin siswa, diketahui bahwa ada 137 siswa berjenis kelamin laki-laki dan 238 siswa berjenis kelamin perempuan. Dari 137 siswa laki-laki, sebanyak 100 siswa memiliki persepsi positif

tentang antikorupsi, dan sebanyak 32 siswa memiliki persepsi negatif tentang antikorupsi. Dari 238 siswa perempuan, sebanyak 163 siswa memiliki persepsi positif tentang antikorupsi, dan sebanyak 75 siswa memiliki persepsi negatif tentang antikorupsi.

Menurut Robbin (2002: 14) persepsi positif merupakan pendapat/penilaian individu terhadap suatu objek atau informasi dengan pandangan yang sesuai dengan yang diharapkan dari objek yang dipersepsikan atau dari aturan yang ada. Sedangkan persepsi negatif merupakan pendapat/penilaian individu terhadap objek atau informasi tertentu dengan pandangan yang berlawanan dengan yang diharapkan dari objek yang dipersepsikan atau dari aturan yang ada. Penyebab munculnya persepsi negatif seseorang karena adanya ketidaktahuan individu terhadap objek yang menjadi sumber persepsinya. Dengan demikian, dalam membangun persepsi antikorupsi siswa maka penting untuk memberikan pengetahuan perihal antikorupsi kepada siswa sejak awal agar siswa dalam perkembangannya memiliki persepsi yang positif terhadap antikorupsi.

Persepsi antikorupsi sendiri dalam penjelasan BPS (2017: 15) adalah pendapat atau penilaian terhadap beberapa perilaku antikorupsi di masyarakat, baik dalam lingkup keluarga, komunitas, dan publik. Untuk mengetahui bentuk perilaku antikorupsi, maka sebelumnya penting untuk mengetahui bentuk-bentuk perilaku korupsi. Karena dengan mengetahui bentuk-bentuk perilaku korupsi maka dapat membentuk antitesis terhadap perilaku korupsi tersebut yang berupa persepsi antikorupsi.

Dalam mengidentifikasi persepsi terhadap perilaku korupsi, ada empat dimensi yang dapat digunakan untuk menganalisis, yaitu jenis, aktivitas, sektor, dan tempat (Graycar dan Sidebottom, 2012: 388). Berdasarkan analisis yang dilakukan (Graycar dan Sidebottom, 2012: 388) maka dapat diketahui bahwa jenis perilaku korupsi dapat berupa suap, pemerasan, penyelewengan, transaksi pribadi, perlindungan, penyalahgunaan jabatan, membuat/mengeksploitasi konflik kepentingan, dan nepotisme, kolusi, atau pilih kasih.

Selanjutnya ditinjau berdasarkan aktivitasnya, yang masih berhubungan dengan jenis perilaku korupsi maka aktivitas perilaku korupsi berdasarkan aktivitasnya dapat berupa penunjukkan personil/anggota, pembelian/pengadaan barang-barang, penyampaian program atau layanan, pembuatan sesuatu baik berupa konstruksi/ manufaktur, pembangunan, kegiatan pengontrolan (pengaturan/ perizinan), dan administrasi. Sedangkan ditinjau berdasarkan sektor perilaku korupsi maka dapat diketahui sektor-sektor yang rawan terjadi korupsi meliputi konstruksi, kesehatan, administrasi perpajakan, energi, lingkungan dan air, kehutanan, bea cukai dan imigrasi, sistem hukum, bantuan bencana, dan pendidikan. Beberapa jenis, aktivitas, dan sektor yang rawan diserang korupsi tersebut maka harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh, karena korupsi dapat terjadi dimana saja baik dalam lingkup negara, wilayah, lokalitas, bahkan tempat kerja. Keempat dimensi perilaku korupsi tersebut penting untuk dipahami agar bentuk perilaku korupsi dalam keempat dimensi tersebut dapat diantisipasi pada sebuah persepsi antikorupsi.

BPS (2017) menjelaskan bahwa persepsi antikorupsi merupakan dimensi yang mendasar mempengaruhi perilaku antikorupsi. BPS menyebutkan bahwa dalam dimensi persepsi antikorupsi yang dibangun, ada 3 rumpun yang menjadi akar atau kebiasaan pelanggaran perilaku korupsi di masyarakat. Rumpun tersebut meliputi keluarga, komunitas dan publik. Oleh karena itu, dalam membangun persepsi antikorupsi warga khususnya siswa penting untuk membangun persepsi antikorupsi mereka terhadap perilaku korupsi di lingkungan keluarga, komunitas dan publik.

Meskipun secara global indeks persepsi korupsi atau pandangan terhadap perilaku korupsi masyarakat Indonesia tidak tergolong baik atau berada di tengah-tengah dibandingkan dengan negara-negara lain (berada di posisi 89 dari 172 negara dengan nilai 38) (*Transparency International*, 2018). Namun, secara internal BPS merilis hasil penelitian tentang persepsi antikorupsi dengan menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh menyebutkan bahwa untuk indeks persepsi antikorupsi masyarakat Indonesia tergolong sangat baik/sangat antikorupsi dengan indeks 3,86 diantara rentangan 3,76-5,0 (BPS, 2018: 14). Senada dengan penelitian ini, bahwa persepsi antikorupsi yang dimiliki siswa juga tergolong sangat baik dengan nilai rata-rata sebesar 71,85 berada pada interval $X \geq 66$ yang berarti bahwa tingkat persepsi antikorupsi siswa di DIY tergolong sangat baik.

c. Perilaku Antikorupsi Siswa di DIY

Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui bahwa nilai rata-rata dari perilaku antikorupsi siswa sebesar 115,48 atau berada pada interval $X \geq 108$ yang berarti bahwa tingkat perilaku antikorupsi siswa di DIY tergolong sangat baik.

Selain itu, dari hasil analisis data ini dapat diketahui perilaku antikorupsi berdasarkan asal sekolah, jurusan, dan jenis kelamin siswa yang masing-masing memiliki kriteria perilaku antikorupsi tersendiri. Berdasarkan asal sekolah siswa, sebanyak 112 siswa di SMAN 1 Sleman diketahui bahwa nilai rata-rata dari perilaku antikorupsi siswa sebesar 116,98 atau berada pada interval $X \geq 108$ yang berarti bahwa tingkat perilaku antikorupsi siswa di SMAN 1 Sleman tergolong sangat baik. Selanjutnya sebanyak 133 siswa di SMAN 2 Bantul diketahui bahwa nilai rata-rata dari perilaku antikorupsi siswa sebesar 115,45 atau berada pada interval $X \geq 108$ yang berarti bahwa tingkat perilaku antikorupsi siswa di SMAN 2 Bantul tergolong sangat baik. Dan sebanyak 130 siswa di SMAN 6 Yogyakarta diketahui bahwa nilai rata-rata dari perilaku antikorupsi siswa sebesar 114,21 atau berada pada interval $X \geq 108$ yang berarti bahwa tingkat perilaku antikorupsi siswa di SMAN 6 Yogyakarta tergolong sangat baik.

Berdasarkan jurusanannya, sebanyak 256 siswa jurusan IPA diketahui bahwa nilai rata-rata dari perilaku antikorupsi siswa sebesar 115,34 atau berada pada interval $X \geq 108$ yang berarti bahwa tingkat perilaku antikorupsi siswa berjenis kelamin laki-laki tergolong sangat baik. Sedangkan sebanyak 119 siswa jurusan IPS diketahui bahwa nilai rata-rata dari perilaku antikorupsi siswa sebesar 115,85 atau berada pada interval $X \geq 108$ yang berarti bahwa tingkat perilaku antikorupsi siswa berjenis kelamin laki-laki tergolong sangat baik.

Berdasarkan jenis kelamin siswa, sebanyak 137 siswa berjenis kelamin laki-laki diketahui bahwa nilai rata-rata dari perilaku antikorupsi siswa sebesar 115,48 atau berada pada interval $X \geq 108$ yang berarti bahwa tingkat perilaku antikorupsi

siswa berjenis kelamin laki-laki tergolong sangat baik. Sedangkan sebanyak 238 siswa berjenis kelamin perempuan diketahui bahwa nilai rata-rata dari perilaku antikorupsi siswa sebesar 115,48 atau berada pada interval $X \geq 108$ yang berarti bahwa tingkat perilaku antikorupsi siswa berjenis kelamin perempuan tergolong sangat baik.

Dalam mengamalkan perilaku antikorupsi siswa melakukannya dapat melalui beberapa tindakan yang kecil, seperti datang tepat waktu, tidak membolos, tidak mencontek, tidak berbohong, ketika meminjam barang teman harus izin pemiliknya, mengembalikan barang yang dipinjam, mentaati peraturan, dan selektif terhadap penggunaan uang atau ketika menjadi bendahara kegiatan atau mendapatkan amanah dalam bentuk finansial harus memaksimalkan penggunaan dana sebaik-baiknya serta ikhlas sehingga tidak perlu mendapatkan imbalan.

Perilaku antikorupsi merupakan tindakan menolak/tidak permisif (mengizinkan) terhadap segala perilaku korupsi (BPS, 2017: 11). Secara internal faktor penyebab perilaku korupsi datang dari diri pribadi atau individu. Pada faktor internal ini penyebab perilaku korupsi sangat ditentukan oleh kuat tidaknya nilai-nilai antikorupsi yang tertanam dalam diri setiap individu. Nilai-nilai antikorupsi tersebut antara lain kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggungjawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan (Puspito, Elwina, Utari, dan Kurniadi, 2011: 75-81). Oleh karena itu, penting untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi ini sehingga setiap individu mampu menerapkannya dan dapat mengatasi segala kejahatan korupsi yang ada. Berikut adalah hasil analisis data tentang nilai-nilai antikorupsi siswa di DIY.

1) Kejujuran

Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui bahwa nilai rata-rata dari nilai kejujuran siswa sebesar 12,59 atau berada pada interval $X \geq 12$ yang berarti bahwa tingkat nilai kejujuran siswa di DIY tergolong sangat baik. Kejujuran merupakan nilai di kehidupan sehari-hari yang menjadi fondasi awal melakukan pencegahan tindakan korupsi. Kejujuran mengacu pada aspek karakter, moral, dan berkonotasi pada atribut positif dan berbudi luhur seperti integritas. Adanya kejujuran tidak diiringi dengan kebohongan, penipuan, dan penyimpangan lainnya.

Dalam mencerminkan perilaku antikorupsi, perbuatan yang mencerminkan nilai jujur penting untuk selalu dipertahankan. Ada beberapa contoh perbuatan yang dapat mencerminkan nilai kejujuran seorang siswa. Beberapa contoh perilaku yang mencerminkan nilai kejujuran, yaitu seperti melakukan pekerjaan yang seharusnya diselesaikan, tidak menyontek atau menyalin pekerjaan orang lain, tidak meminta uang lebih yang tidak sesuai kebutuhan yang seharusnya, lebih apa adanya mengerjakan sesuatu sesuai dengan kemampuan diri sendiri, membayar barang sesuai harga ketika membeli di koperasi kejujuran, izin meninggalkan kelas sesuai dengan keperluannya, dan tidak menutupi kesalahan yang dilakukan.

Menurut Zuriah (2007: 83), kejujuran adalah berani menyampaikan dengan apa adanya, tidak berbohong atau tidak menipu orang lain dengan kata lain menyampaikan informasi sesuai fakta yang terjadi. Pendapat di atas diperkuat Samani & Hariyanto (2013:124), bahwa kejujuran harus tetap disampaikan walaupun dapat membahayakan diri sendiri. Karena tidak bisa di pungkiri bahwa banyak orang yang hidup dengan kepentingan menggunakan cara-cara yang tidak

baik sehingga terkadang orang jujur akan dikucilkan bahkan dimusuhi. Penanaman nilai kejujuran dalam era modernitas mendesak untuk dilakukan kepada generasi masa depan karena dapat menyelamatkan bangsa dari penipuan dan pencurian. Dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak dalam penanaman nilai kejujuran kepada anak-anak, agar mereka memahami tentang pentingnya kejujuran dan kepercayaan (Xu, dkk, 2013: 257-258).

2) Kepedulian

Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui bahwa nilai rata-rata dari nilai kepedulian siswa sebesar 12,74 atau berada pada interval $X \geq 12$ yang berarti bahwa tingkat nilai kepedulian siswa di DIY tergolong sangat baik. Peduli merupakan tindakan yang didasari pada keprihatinan terhadap masalah orang lain penting untuk ditanamkan kepada generasi muda. Nilai kepedulian sebagai salah satu cerminan antikorupsi individu dapat diterapkan melalui sikap peduli terhadap diri sendiri. Bila dalam diri sendiri sudah peduli, maka menjadi energi positif yang akan menular kepada orang sekitar.

Kepedulian merupakan sebuah sikap berperipikahan untuk melibatkan diri dalam persoalan atau kondisi di sekitar. Orang-orang yang peduli tentunya akan melakukan sesuatu dalam memberikan inspirasi, perubahan ataupun kebaikan. Berikut beberapa contoh perilaku antikorupsi yang mencerminkan nilai kepedulian seseorang, yaitu seperti menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif, membuang sampah pada tempatnya, menyirami tanaman yang ada di sekitar kelas, membantu teman yang sedang membutuhkan, menjaga kondisi kelas agar tetap bersih, tidak egois dengan memahami pendapat orang lain, tidak mudah emosi dan terjerumus

dalam pergaulan yang salah, dan tidak terpengaruh oleh modernisasi dan perilaku konsumtif dengan melakukan pola hidup mewah.

3) Kemandirian

Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui bahwa nilai rata-rata dari nilai kemandirian siswa sebesar 12,69 atau berada pada interval $X \geq 12$ yang berarti bahwa tingkat nilai kemandirian siswa di DIY tergolong sangat baik. Pada dasarnya perkembangan kemandirian seseorang merupakan perkembangan eksistensial manusia. Seseorang dikatakan mandiri ketika sikap yang ditunjukkan tidak bergantung pada orang lain untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Perkembangan kemandirian seseorang dipengaruhi oleh berbagai stimulasi, seperti dari lingkungan dan potensi keturunan (Rosikah dan Listianingsih, 2016: 72).

Ali dan Asrori (2006: 188) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa sistem pendidikan di sekolah turut mempengaruhi perkembangan kemandirian seorang remaja. Melalui proses pendidikan yang tidak mengembangkan prinsip demokrasi dan cenderung menekankan pada proses indoktrinasi maka akan menghambat kemandirian siswa. Pemberian sanksi hukuman yang tidak tepat dirasa juga menjadi penghambat dalam perkembangan kemandirian siswa.

Adapun perilaku mandiri dalam diri seseorang adalah tidak bergantung pada orang lain. Secara umum orang yang dikenal mandiri identik dengan selalu memecahkan masalahnya tanpa menggantungkan bantuan orang lain. Berikut adalah contoh perilaku antikorupsi yang mencerminkan nilai kemandirian, seperti mampu mengatur diri sendiri sebelum mengatur orang lain, memiliki komitmen untuk dapat menyelesaikan tugas tepat waktu, tidak melempar pekerjaan kepada

orang lain, tidak bergantung bantuan orang lain untuk menyelesaikan tanggungjawab (mengerjakan tugas dengan kemampuan sendiri), tidak mudah putus asa dalam menghadapi kendala dan hambatan yang dilalui. Bila kemandirian telah tertanam dalam diri seseorang, maka ia akan menghindari perbuatan-perbuatan yang korup dengan tidak merugikan orang lain. Dengan demikian penting untuk membiasakan hidup mandiri siswa agar tidak mudah terpengaruh dan terjerumus dalam kejahatan korupsi.

4) Kedisiplinan

Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui bahwa nilai rata-rata dari nilai kedisiplinan siswa sebesar 12,78 atau berada pada interval $X \geq 12$ yang berarti bahwa tingkat nilai kedisiplinan siswa di DIY tergolong sangat baik. Seseorang dikatakan disiplin ketika melakukan perbuatan yang patuh terhadap peraturan, baik peraturan yang bersifat normatif dan subjektif. Setiap individu dapat mengimplementasikan sikap disiplin dimulai dari hal yang kecil seperti mengatur waktu dan memanfaatkan peluang dengan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan tugas, datang ke sekolah tepat waktu, belajar dengan rajin, taat terhadap peraturan sekolah, mengikuti upacara dengan tertib, melakukan tugas piket sesuai jadwal, dan berdoa sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar dst.

Menurut Gordon (1996: 3) disiplin merupakan perilaku yang diperoleh dari pelatihan yang dilakukan secara terus menerus. Disiplin penting diterapkan untuk mengatur kehidupan dari berbagai aspek. Banyak manfaat yang didapat dalam menerapkan pola hidup disiplin, secara pribadi manfaatnya yaitu menjadi lebih

tertib dan teratur, serta dapat membawa pola kebiasaan yang dibawa sampai masa depannya kelak. Selain itu disiplin adalah salah satu cara agar dipercaya orang lain.

Tujuan utama dari sikap disiplin adalah untuk mengarahkan anak supaya mampu mengontrol dirinya sendiri. Selain itu agar anak dapat melakukan aktivitasnya dengan terarah, sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku. Berikut beberapa contoh perilaku antikorupsi yang mencerminkan nilai kedisiplinan, yaitu seperti mengatur dan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan tugas, taat terhadap peraturan sekolah, tidak mudah ingkar terhadap janji yang sudah dibuat, tidak lupa berdoa sebelum melakukan kegiatan belajar, dan tidak terlambat atau datang tepat waktu.

5) Tanggungjawab

Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui bahwa nilai rata-rata dari nilai tanggungjawab siswa sebesar 12,58 atau berada pada interval $X \geq 12$ yang berarti bahwa tingkat nilai tanggungjawab siswa di DIY tergolong sangat baik. Tanggung jawab adalah kesadaran seseorang atas perbuatan atau tingkah laku yang dilakukannya, baik yang disengaja maupun tidak disengaja (Rosikah dan Listianingsih, 2016: 75-76). Tanggungjawab juga dapat diartikan sebagai perwujudan kesadaran terhadap kewajiban yang dimiliki.

Seorang individu juga memiliki tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Tanggung jawab ini dilakukan untuk memenuhi kewajiban serta mengembangkan potensi kepribadian yang melekat dalam diri setiap individu. Selain itu, dalam memecahkan suatu persoalan yang dihadapi, setiap individu memiliki pendapat sendiri untuk menyelesaikannya. Karena manusia sebagai makhluk yang bermoral,

maka setiap individu yang menyelesaikan masalahnya sendiri harus tetap memperhatikan baik dan buruk atas keputusan yang diambilnya. Berikut adalah contoh perilaku antikorupsi yang mencerminkan nilai dari tanggung jawab, seperti berusaha menjalankan amanah dengan baik, berusaha mengerjakan tugas dan kewajiban dengan sungguh-sungguh, menyelesaikan tugas sampai tuntas, tidak mudah terpengaruh untuk melakukan tindakan yang tidak baik, tidak mengesampingkan segala tugas yang diterima, membuat manajemen waktu agar pekerjaan tidak terbengkalai, menyimpan dan melaporkan keuangan sesuai dengan jumlah pemasukan dan pengeluaran, sebagai siswa tidak lupa untuk belajar, dan mengembalikan barang yang dipinjam.

6) Kerja Keras

Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui bahwa nilai rata-rata dari nilai kerja keras siswa sebesar 12,82 atau berada pada interval $X \geq 12$ yang berarti bahwa tingkat nilai kerja keras siswa di DIY tergolong sangat baik. Kerja keras yaitu tidak berhenti pada tugas atau pekerjaan yang telah diselesaikan, namun lebih mengarah pada visi besar dalam mencapai kebaikan atau kemaslahatan manusia dan lingkungannya. Setiap orang yang bersungguh-sungguh dan pantang menyerah pasti mendapatkan apa yang diinginkan serta meraih cita-cita yang diimpikan (Rosikah dan Listianingsih, 2016: 79). Perilaku antikorupsi seseorang yang mencerminkan nilai kerja keras yaitu selalu berupaya untuk menuntaskan suatu pekerjaan dengan hasil yang terbaik dan menghindari perilaku instan atau jalan pintas yang mengarah pada kecurangan.

Orang yang bekerja keras dapat disebut sebagai orang yang ulet dan gigih. Seseorang yang penuh kegigihan dan kepercayaan diri yang tinggi akan lebih kuat dalam melaksanakan kewajibannya. Berikut beberapa contoh perilaku antikorupsi yang mencerminkan nilai kerja keras, yaitu seperti berusaha mengenali potensi diri dan mengembangkannya demi meraih cita-cita yang diinginkan, berkeyakinan teguh bahwa kewajiban yang saya emban dapat terselesaikan dengan baik, berusaha dengan belajar secara terus menerus, mampu melawan rasa malas, tidak mudah menyerah atau bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan pekerjaan, dan tidak minta bantuan orang lain untuk menyelesaikan tugas.

7) Kesederhanaan

Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui bahwa nilai rata-rata dari nilai kesederhanaan siswa sebesar 12,45 atau berada pada interval $X \geq 12$ yang berarti bahwa tingkat nilai kesederhanaan siswa di DIY tergolong sangat baik. Hidup sederhana adalah hidup bersahaja tanpa memperlihatkan kemewahan. Kesederhanaan merupakan sikap menjaga kesopanan, perkataan, dan tingkah laku yang mencerminkan kerendahan hati dan tidak sombong. Perilaku antikorupsi yang mencerminkan nilai kesederhanaan adalah selalu berpenampilan apa adanya, tidak berlebihan, tidak pamer maupun ria.

Menerapkan pola hidup sederhana bagi Rosikah dan Listianingsih (2016: 80-81) akan membawa hidup lebih tenteram dan terhindar dari praktik-praktik tindakan korupsi. Karena dengan hidup sederhana tidak akan membawa pola hidup yang berlebihan. Berikut adalah beberapa contoh perilaku antikorupsi yang mencerminkan nilai kesederhanaan, yaitu seperti berusaha melepaskan hal yang

tidak penting, seperti keinginan mengikuti perkembangan *style*, tidak gengsi membawa bekal makanan dari rumah, suka berpenampilan apa adanya, tidak senang terlihat menonjol dari teman-teman yang lain, tidak membeli barang yang tidak sesuai kebutuhan, dan membelanjakan uang saku sesuai kebutuhan. Perilaku sederhana ini penting untuk diterapkan karena dengan sederhana kita kemungkinan bisa tidak terjerumus pada perilaku korupsi. Misalnya dengan sederhana kita tidak terjebak dalam sifat gengsi, yang dapat melakukan kecurangan atau menjatuhkan teman.

8) Keberanian

Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui bahwa nilai rata-rata dari nilai kesederhanaan siswa sebesar 12,45 atau berada pada interval $X \geq 12$ yang berarti bahwa tingkat nilai kesederhanaan siswa di DIY tergolong sangat baik. Adagium “berani karena benar, dan takut karena salah”. Ungkapan tersebut menandakan bahwa orang berani adalah yang melakukan kebenaran, sedang mereka yang takut adalah yang melakukan kesalahan. Keberanian seseorang dapat ditunjukkan dengan berbagai cara dan bentuk. Perlu diketahui bahwa diri sendirilah yang menjadi faktor terbesar dalam membangun keberanian. Seringkali seorang merasa gagal membangun keberanian karena dipengaruhi beberapa hal seperti kenyataan dari luar, ucapan orang lain, membayangkan dampak yang ditimbulkan, dan beberapa faktor lainnya. Padahal kemauan dan tekad diri sendiri lebih utama yang mendasari rasa berani dari seseorang muncul, dibandingkan pengaruh dari luar yang membuat rasa takut menjadi lebih tinggi.

Perilaku antikorupsi yang mencerminkan nilai keberanian meliputi berani jujur, berani menolak ajakan untuk berbuat curang, berani melaporkan adanya kecurangan dan berani mengakui kesalahan. Meskipun terkadang keberanian seseorang menciut karena pengaruh pengalaman buruk atau tekanan dari pihak lain. Namun keberanian dalam mengungkapkan kebenaran harus tetap selalu dijaga. Berikut beberapa contoh perilaku antikorupsi yang mencerminkan nilai keberanian, yaitu seperti berusaha menuruti hati dan naluri diri sendiri, mengatakan apa yang dirasakan dan diketahui (menegur teman yang melakukan pelanggaran atau melaporkan teman yang mencontek), menyampaikan pertanyaan, pendapat/gagasan, serta kritik dalam forum diskusi atau dialog, tidak mengelak terhadap perbuatan sendiri yang diketahui orang lain, tidak menerima suap untuk melakukan hal-hal yang menyimpang, dan berani mengambil peran dalam *event-event*/kegiatan sekolah.

9) Keadilan

Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui bahwa nilai rata-rata dari nilai keberanian siswa sebesar 12,83 atau berada pada interval $X \geq 12$ yang berarti bahwa tingkat nilai keberanian siswa di DIY tergolong sangat baik. Secara implisit, keadilan diartikan sebagai penilaian yang diberikan kepada siapa pun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni bertindak secara proporsional dan tidak melanggar hukum. Nilai keadilan dapat dilihat dari sikap yang selalu menghargai perbedaan dan tidak pilih kasih. Berikut beberapa perilaku antikorupsi yang mencerminkan nilai keadilan, yaitu seperti memberikan hak orang lain sesuai yang seharusnya dia terima, membuat keputusan yang adil atau tanpa memihak dan menghindari adanya

nepotisme, tidak menuntut mendapatkan hak sebelum melakukan kewajiban atau pekerjaan, tidak suka membedakan teman dan pilih kasih terhadap mereka (soal gender atau tingkat kekayaan), membagi seksi/divisi sesuai kemampuan masing-masing siswa dengan disetujui oleh forum, dan bisa bekerja sama dengan semua orang dengan saling mendukung.

Sembilan nilai inilah yang penting untuk ditanamkan kepada siswa agar mereka menjadi pribadi yang berintegritas. Siswa nantinya sebagai generasi penerus agar senantiasa mengamalkan nilai-nilai antikorupsi dimana pun dan sampai kapan pun. Kesembilan nilai antikorupsi ini tentunya jika menjadi kulturisasi maka akan menjadi berita baik dalam mengurangi bahkan mencegah tindakan korupsi di masa depan sehingga keinginan dalam menuju pemerintahan yang bersih serta masyarakat yang madani dapat terwujud.

Berdasarkan hasil uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pribadi berintegritas, persepsi antikorupsi, serta perilaku antikorupsi siswa di DIY tergolong sangat baik. Hal ini tentunya menjadi informasi yang positif. Siswa sebagai warga negara muda yang berintegritas merupakan wujud kecil dari warga negara yang baik. Wujud dari warga negara yang baik sendiri dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan merupakan tujuan dasar dari pendidikan (EACEA, 2017: 21).

C. Temuan

Berdasarkan hasil pembahasan yang diuraikan diatas, maka dapat diketahui pokok-pokok temuan dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Implementasi Pendidikan antikorupsi yang dilakukan melalui kurikuler atau terintegrasi dalam mata pelajaran PPKn, yaitu dapat disisipkan dalam kompetensi dasar (KD) yang relevan yaitu ancaman terhadap integrasi nasional dan dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi dilakukan melalui pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran siswa di kelas seperti membiasakan siswa untuk tidak mencontek, membiasakan siswa tidak bergantung kepada teman dalam mengerjakan tugas, memerintahkan siswa untuk tidak terlambat masuk kelas, membiasakan siswa untuk tidak lalai dalam menyelesaikan tugas, membiasakan siswa untuk tidak menunda dalam menyelesaikan tugas, dan banyak kegiatan lain.
2. Implementasi Pendidikan antikorupsi yang dilakukan melalui ekstrakurikuler, selain dilakukan dalam kegiatan/aktivitas-aktivitas siswa di kegiatan ekstrakurikuler tersebut, juga dapat dilakukan dengan memberikan para siswa tanggung jawab di setiap kegiatan, seperti sebagai panitia pelaksana atau penanggung jawab kegiatan ekstrakurikuler. Atau siswa yang tergabung dalam ekstrakurikuler akan membentuk program kerja dan mendapatkan anggaran dalam melaksanakan program kerjanya. Siswa yang tergabung di masing-masing ekstrakurikuler harus bertanggung jawab dalam menjalankan program kerja serta mengolah dana sebaik mungkin. Selanjutnya siswa membuat laporan pertanggung jawaban (LPJ) untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang digunakan untuk program kerja kegiatan.

3. Persepsi antikorupsi siswa di DIY tergolong sangat baik, hal ini ditunjukkan pada persepsi positif mereka terhadap perilaku antikorupsi di lingkup keluarga, komunitas, dan publik.
4. Perilaku antikorupsi siswa di DIY tergolong sangat baik, hal ini ditunjukkan dari perilaku mereka dalam mengamalkan nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari.
5. Siswa sebagai warga negara muda di DIY memiliki pribadi berintegritas yang tergolong sangat baik, hal ini ditunjukkan dari beberapa ciri-ciri yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari.

D. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan semaksimal mungkin agar mencapai hasil yang memuaskan, dengan mengungkap bagaimana implementasi pendidikan antikorupsi membentuk warga negara muda dalam hal ini yaitu siswa sebagai warga negara muda berintegritas. Akan tetapi dalam proses dan hasil penelitian terdapat keterbatasan sebagai berikut.

1. Penelitian ini hanya dilakukan di tiga Kota/Kabupaten di DIY, yakni Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Kota Yogyakarta, sedangkan untuk Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunung Kidul karena keterbatasan waktu, sumber daya moneter, serta peneliti dalam ini sebagai peneliti tunggal maka kedua Kabupaten tersebut belum bisa diteliti.
2. Penelitian ini tidak bisa menggunakan semua sekolah di masing-masing Kota/Kabupaten di DIY sebagai objek penelitian, melainkan hanya

menggunakan satu sekolah di masing-masing Kota/Kabupaten sebagai sampel, yaitu SMAN 1 Sleman, SMAN 2 Bantul, dan SMAN 6 Yogyakarta.

3. Penelitian ini tidak bisa menggunakan semua siswa di masing-masing sekolah sebagai sampel penelitian, melainkan hanya kelas XI di masing-masing sekolah yang dijadikan sebagai sampel penelitian.
4. Penelitian ini tidak bisa melakukan penelitian pada seluruh pertemuan kegiatan belajar mengajar karena terbatasnya waktu.
5. Penelitian ini tidak bisa melakukan penelitian pada seluruh kegiatan ekstrakurikuler karena kegiatan ekstrakurikuler yang banyak dan terbatasnya waktu.
6. Penelitian ini tidak bisa meneliti dimensi pengalaman antikorupsi siswa karena dalam dimensi pengalaman antikorupsi yang diukur yaitu terkait aspek layanan publik sehingga tidak relevan untuk diukur pada siswa.